



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

"Situasi Kependudukan Saat Rasio Ketergantungan DIY
Diperkirakan Optimal"



2023

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

Situasi Kependudukan Saat Rasio Ketergantungan DIY

Diperkirakan Optimal



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Sebuah buku yang memuat hasil kajian atas kondisi demografis DIY dari sudut pandang administrasi kependudukan.

Buku Profil ini merupakan buku di bidang informasi kependudukan yang dipublikasikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Sumber data dan informasi dalam buku profil ini menggunakan data berbasis registrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah dikonsolidasikan di tingkat nasional dan data lintas sektor. Untuk memudahkan pembaca, buku ini tidak sekadar menampilkan tabel-tabel statistik tetapi juga dilengkapi dengan analisis. Selain itu kami menambahkan bab khusus bersifat tematik untuk mempertajam telaah terhadap fenomena aktual kependudukan di DIY. Pada tahun ini materi tematik yang diangkat adalah *Situasi Kependudukan saat Rasio Ketergantungan di DIY Diperkirakan Optimal*.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna karena beberapa keterbatasan di luar kemampuan tim penyusun. Meski demikian kami berharap para pembaca, khususnya civitas akademica, lembaga/instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemda DIY, dan OPD di pemerintah kabupaten/kota se-DIY, memperoleh referensi informasi kependudukan DIY yang cukup memadai melalui buku ini. Akhir kata, kami terbuka terhadap saran dan kritik para pembaca demi meningkatkan kualitas buku Profil Perkembangan Kependudukan DIY di tahun-tahun mendatang.

Yogyakarta, Agustus 2023
a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP 19650512 198602 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	4
C. Manfaat	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Sumber Data	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II DESKRIPSI WILYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	7
A. Letak Dan Kondisi Topografi.....	7
B. Demografi	12
C. Penggunaan Lahan	14
D. Ekonomi Dan Potensi Daerah	15
E. Sosial Budaya	18
BAB III JUMLAH KOMPOSISI PENDUDUK DAN STRUKTUR KELUARGA	22
A. Jumlah Penduduk	22
B. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk	26
C. Rasio Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan	27
D. Piramida Peduduk.....	30
E. Median Penduduk.....	33
F. Rasio Beban Tanggungan.....	35
G. Struktur Keluarga	38
1. Kepala Keluarga	38
2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	41
3. Status Perkawinan	42

4. Kepemilikan Akta Perkawinan	45
5. Stuktur Agama Penduduk	48
H. Disabilitas	49
BAB IV KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDUDUK DATANG DAN PERGI	52
A. Kepemilikan Akta Kelahiran.....	52
B. ASFR (<i>Age Spesific Fertility Rates</i>) dan TFR (<i>Total Fertility Rates</i>)	56
C. Angka Kematian Bayi	61
D. Angka Kematian Ibu	63
E. Penduduk Datang dan Pergi	65
BAB V PENDIDIKAN	68
A. Struktur Pendidikan Terakhir Penduduk	69
B. Struktur Pendidikan Penduduk Menurut Gender	71
C. Angka Partisipasi Kasar	75
D. Angka Partisipasi Murni	77
E. Angka Putus Sekolah	79
F. Rasio Sekolah Negeri / Swasta	81
G. Rasio Guru - Murid	84
1. Rasio Guru - Murid di SD dan MI	85
2. Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs.....	86
3. Rasio Guru - Murid di SMA dan MA	87
4. Rasio Guru - Murid di SMK.....	88
H. Jumlah Ruang Sekolah	90
I. Perbandingan Siswa Per Kelas	91
1. Jumlah Siswa Per Kelas di SD dan MI.....	91
2. Jumlah Siswa Per Kelas di SMP dan MTs.....	92
3. Jumlah Siswa Per Kelas di SMA dan MA.....	93
4. Jumlah Siswa Per Kelas di SMK.....	94
BAB VI KETENAGAKERJAAN	96
A. Angkatan Kerja	96
B. Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja.....	98

C. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja.....	100
D. Partisipasi Angkatan Kerja	102
E. Pengangguran Terbuka	103
F. Bukan Angkatan Kerja.....	103
BAB VII SITUASI KEPENDUDUKAN SAAT RASIO KETERGANTUNGAN D. I. YOGYAKARTA DIPERKIRAKAN OPTIMAL.....	106
A Rasio Ketergantungan: Salah Satu Indikator Penting Dalam Kependudukan.....	107
B. Gambaran Rasio Ketergantungan di Indonesia	110
C. Kondisi Kependudukan di DIY Saat Rasio Ketergantungan Diperkirakan Optimal	112
D. Implikasi dan Kebijakan	115
BAB VIII PENUTUP	121
Kesimpulan	121
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Kapanewon dan Kemantren Daerah Perbatasan di DIY	9
Tabel 2. 2.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%).....	17
Tabel 3. 1.	Jumlah Penduduk Per Kabupaten di DIY Tahun 2018-2022.....	23
Tabel 3. 2.	Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022.....	24
Tabel 3. 3.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk DIY, 2022.....	26
Tabel 3. 4.	Jumlah Penduduk Menurut Gender dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	27
Tabel 3. 5.	Kelompok Umur dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	28
Tabel 3. 6.	Jumlah Penduduk Usia Muda, Produktif dan Lanjut Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	36
Tabel 3. 7.	Penduduk Usia Muda, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Tua, dan Beban Tanggungan Tahun di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	37
Tabel 3. 8.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	38
Tabel 3. 9.	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	42
Tabel 3. 10.	Status Perkawinan Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	43
Tabel 3. 11.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	45
Tabel 3. 12.	Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	47
Tabel 3. 13.	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	49

Tabel 3. 14.	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	50
Tabel 4. 1.	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2022	53
Tabel 4. 2.	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-4, 5-17, dan 0-17 di Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2022.....	54
Tabel 4. 3.	Jumlah Perempuan Usia 15-49 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup dan ASFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	57
Tabel 4. 4.	Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup, ASFR dan TFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	59
Tabel 4. 5.	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022 ...	64
Tabel 5. 1.	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	69
Tabel 5. 2.	Perbandingan Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kabupaten/Kota se-DIY	73
Tabel 5. 3.	Jumlah Murid Angka Putus Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	81
Tabel 5. 4.	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	82
Tabel 5. 5.	Rasio Ideal Guru - Murid di Setiap Jenjang Pendidikan	84
Tabel 5. 6.	Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	90
Tabel 5. 7.	Standar Jumlah Rombongan Belajar dan Maksimal Siswa per Rombongan Belajar di Setiap Satuan Pendidikan.....	91
Tabel 6. 1.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	96
Tabel 6. 2.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	99
Tabel 6. 3.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	101

Tabel 6. 4.	Jumlah Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Gender Di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	104
Tabel 6. 5.	Jumlah Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021	97
Tabel 7. 1.	Rasio Ketergantungan Provinsi di Indonesia dan Proyeksinya, 2020-2030.....	111
Tabel 7.2.	Indikator Kunci Parameter Kependudukan DIY, 2020-2022	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	8
Gambar 2. 2.	Peta Ketinggian Daerah Istimewa Yogyakarta	11
Gambar 2. 3.	Peta Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peta Kepadatan Penduduk Provinsi di Indonesia	13
Gambar 2. 4.	Diagram Persentase Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2021	14
Gambar 2. 5.	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen)	15
Gambar 2. 6.	PDRB Per Kapita Harga Berlaku DIY 2020-2022	16
Gambar 2. 7.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia di DIY 2020-2022.....	19
Gambar 2. 8.	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022.....	20
Gambar 2. 9.	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022.....	21
Gambar 3. 1.	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo (a.), Bantul (b.), Gunung Kidul (c.), Sleman (d.), Kota Yogyakarta (e.) dan DIY (f.) 2022	32
Gambar 3. 2.	Umur Median Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.....	34
Gambar 3. 3.	Persentase Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	39
Gambar 3.4.	Persentase Kepemilikan Akta Pernikahan di Kabupaten/ Kota se-DIY Tahun 2022	46
Gambar 4. 1.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2022	53
Gambar 4. 2.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Golongan Usia di Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2022	55
Gambar 4. 3.	Nilai TFR DIY 2017 - 2022	61
Gambar 4. 4.	Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019-2022.....	62

Gambar 4. 5.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019-2022.....	63
Gambar 4. 6.	Penduduk Pergi AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2021-2022	66
Gambar 4. 7.	Penduduk Datang AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2021-2022	67
Gambar 5. 1.	Diagram Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	70
Gambar 5. 2.	Proporsi Jumlah Pendidikan Terakhir Menurut Gender di Kabupaten (a) Kulon Progo, (b) Bantul, (c) Gunungkidul, (d) Sleman, (e) Kota Yogyakarta, dan (f) DIY Tahun 2021 dan 2022	74
Gambar 5. 3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2021 dan 2022.....	76
Gambar 5. 4.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2021 dan 2022.....	78
Gambar 5. 5.	Rasio Sekolah Negeri dengan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	83
Gambar 5. 6.	Rasio Guru - Murid di SD dan MI Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	86
Gambar 5. 7.	Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022.....	87
Gambar 5. 8.	Rasio Guru - Murid di SMA dan MA Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022.....	88

Gambar 5. 9.	Rasio Guru-Murid di SMK Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	89
Gambar 5. 10.	Jumlah Siswa/Ruang di SD/MI Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	92
Gambar 5. 11.	Jumlah Siswa/Ruang di SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	93
Gambar 5. 12.	Jumlah Siswa/Ruang di SMA/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	94
Gambar5.13.	Jumlah Siswa/Ruang di SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022	95
Gambar 6. 1.	Persentase Angkatan Kerja Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	97
Gambar 6. 2.	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY 2022	102
Gambar 6. 3.	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2022.....	103
Gambar 6. 4.	Persentase Bukan Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY di Tahun 2022.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) memiliki nilai yang sangat penting dalam pembangunan. AbouZahr et al. (2019) menjelaskan bahwa sistem administrasi secara terstruktur menghasilkan bukti hukum tentang keberadaan seseorang tentang data diri, hubungan keluarga dan status sipil, serta memberikan indikator demografis dan kesehatan utama termasuk tingkat kesuburan, kematian dan pertumbuhan penduduk untuk semua wilayah administratif di suatu negara. Sistem semacam ini merupakan sumber data populasi nasional dan subnasional yang paling efektif dan efisien untuk pembuatan kebijakan di semua sektor, bahkan dapat diandalkan saat kondisi genting seperti Covid-19 sekalipun (Suthar et al., 2019; AbouZahr et al., 2019; Kelly et al., 2021; Yanuarita & Susanto, 2021). Bahkan data kependudukan yang bersumber dari sistem Adminduk ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan capaian dari SDGs, yang merupakan paradigma pembangunan yang digunakan saat ini (Setel et al., 2018; Mills et al., 2019)

AbouZahr et al. (2019) menjelaskan data kependudukan yang berasal dari sistem Adminduk yang berfungsi dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan tata kelola di tingkat nasional dan daerah serta memberikan keuntungan hukum dan perlindungan bagi individu. Selanjutnya dijelaskan

pula bahwa data kependudukan yang berasal dari sistem Adminduk juga memiliki keunggulan statistik dibandingkan sensus dan survei sampel karena menyediakan data terpilah yang andal di setiap tingkat geografis atau administratif, dengan biaya yang relatif rendah. Oleh karenanya banyak di beberapa di belahan dunia, utamanya di negara berpenghasilan rendah dan menengah memerlukan dukungan finansial dan teknis tambahan untuk mempertahankan sistem Adminduk mereka agar perolehan data kependudukan berfungsi secara penuh (Mikkelsen et al., 2015; AbouZahr et al., 2019). Muaranya tentu saja adalah pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan.

Salah satu produk dari pemanfaatan data kependudukan yang bersumber dari Adminduk adalah penyusunan profil perkembangan kependudukan. Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2010, profil perkembangan kependudukan memuat gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. Penyusunan profil perkembangan kependudukan disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor. Data registrasi diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sedangkan data dari lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang terkait. Penyusunan profil perkembangan kependudukan ini dilakukan berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Hasil akhirnya dari tersusunnya profil perkembangan kependudukan ini akan menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan

Penyusunan profil kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dilakukan secara kontinyu dan dapat diakses secara online dari 2017. Secara umum, Profil Perkembangan Kependudukan DIY memuat gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan yang terjadi di DIY pada tahun dasar berjalan. Profil ini menggambarkan masalah kependudukan yang

dihadapi DIY berdasarkan telaah dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Data yang digunakan untuk penyusunan profil ini adalah data registrasi yang bersumber dari rekaman data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan data dari lintas sektoral.

Pada 2023, disusun profil perkembangan kependudukan DIY dengan menggunakan tahun dasar 2022. Informasi dalam profil kependudukan DIY 2023 ini selain memuat informasi yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 65 Tahun 2009, juga memuat isu khusus yang ditambahkan pada bab terakhir. Isu khusus yang dikaji pada 2023 ini adalah tentang rasio ketergantungan dan respons kebijakan yang dapat dilakukan di masa depan. Pembahasan mengenai rasio ketergantungan di DIY menjadi isu menarik karena prediksi dari BPS, nilai rasio ketergantungan di DIY mengalami titik terendah (nilai optimal) antara periode 2020-2025. Saat nilai rasio ketergantungan berada pada titik terendah mengindikasikan bahwa hal tersebut merupakan tahun optimal dimana usia produktif sedang berada pada masa puncaknya. Asikin (2023) dalam paparannya juga menyatakan bahwa rasio ketergantungan terendah terjadi di sekitar 2022. Oleh karenanya momentum ini harus dipotret secara utuh untuk menyiapkan agenda kebijakan ke depan, dengan melihat struktur dan kondisi kependudukannya.

Momentum ini dipredikasi akan berlangsung selama sekali, dimana di Indonesia provinsi yang telah mengalami nilai rasio ketergantungan optimal (dengan nilai ketergantungan pada nilai terendah) adalah DKI Jakarta dan Bali (terjadi sebelum 2020). Informasi ini juga akan memberikan kontribusi ilmiah bagi para peneliti berikutnya untuk menjelaskan dan membandingkan kondisinya dengan provinsi lainnya di Indonesia ketika nilai rasio ketergantungannya berada pada nilai yang optimum. Karena momentumnya yang sangat tepat, maka isu rasio ketergantungan di DIY dengan melihatnya

dari perspektif data Adminduk sangat layak dibahas pada isu khusus laporan ini.

B. Tujuan

Buku profil ini disusun sebagai upaya menyajikan informasi dan realitas kependudukan dengan mencermati dinamika kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Manfaat

Profil kependudukan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mencermati perubahan dan implikasinya pada pembangunan, terutama terhadap kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Telaah dan analisis dalam buku ini dapat dimanfaatkan untuk memahami implikasi dinamika dan perubahan penduduk pada struktur umur, mobilitas, ketenagakerjaan dan pendidikan. Selain itu pada isu khusus yang dibahas, dengan mengetahui karakteristik penduduk saat kondisi optimal rasio ketergantungan terjadi, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kependudukan ke depan.

D. Ruang Lingkup

Profil kependudukan ini memuat pengolahan dan analisis data agregat penduduk kabupaten/kota yang mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi (umur), struktur keluarga, komponen yang terkait pada perubahan penduduk (angka kelahiran total TFR, kematian bayi, kematian ibu), pendidikan, dan ketenagakerjaan, penduduk datang/pindah dan kondisi kesehatan di DIY sebagai bagian dari faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk akibat kematian dan kelahiran. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa tahun sebelumnya untuk menelaah perubahan jumlah (bukan pertumbuhan) data dasar SIAK akibat kebijakan pengaktifan kembali status domisili

anggota keluarga sehingga perlu mencermati perubahannya serta untuk mencermati dinamika yang terjadi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dari perubahan tersebut dapat dipahami dinamika dan perubahan penduduk di tiap kabupaten/kota dan provinsi. Kemudian dapat dipakai sebagai rujukan untuk menyusun kebijakan dan keputusan terkait aspek kependudukan dan pembangunan di tiap daerah.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan profil kependudukan ini bersumber dari:

1. Data konsolidasi dan Bersih (DKB) Kemendagri semester II tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
2. Data pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di database SIAK Dukcapil kabupaten/kota se DIY sejak tahun 2018 sampai 2022.
3. Data registrasi sektoral, antara lain bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial dengan data dasar tahun 2022.

F. Sistematika Penulisan

Buku profil kependudukan ini memuat delapan pokok bahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup sumber data, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Membahas tentang kondisi umum wilayah mencakup letak dan topografi, demografi, penggunaan lahan, ekonomi dan potensi, serta sosial dan budaya

Bab III Jumlah, Komposisi Penduduk dan Struktur Keluarga

Membahas materi kuantitas penduduk terkait jumlah, komposisi dan struktur keluarga.

Bab IV Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Pindah

Menelaah aspek komponen kualitas penduduk kelahiran (angka kelahiran total), kematian (bayi dan ibu), penduduk datang dan pindah dari dan ke DIY.

Bab V Pendidikan

Membahas berbagai data statistik terkait kondisi pendidikan seperti, angka kelulusan setiap jenjang pendidikan, angka partisipasi kasar dan murni, angka putus sekolah, rasio guru dan murid, rasio sekolah negeri dan swasta.

Bab VI Ketenagakerjaan

Menelaah kondisi ketenagakerjaan, yang ada mencakup angkatan kerja, angkatan kerja yang bekerja, pengangguran terbuka, bukan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, dan struktur pekerjaan angkatan kerja

BAB VII Potret Rasio Ketergantungan dan Agenda Kebijakan Ke Depan

Membahas tentang kondisi rasio ketergantungan, rasio ketergantungan usia muda, rasio ketergantungan usia tua dan menghubungkannya dengan kondisi kependudukan di pembahasan sebelumnya.

BAB VIII Penutup

Memberikan informasi kesimpulan terkait hasil analisis dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini.

Daftar Pustaka

Memuat dokumen, dan buku yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

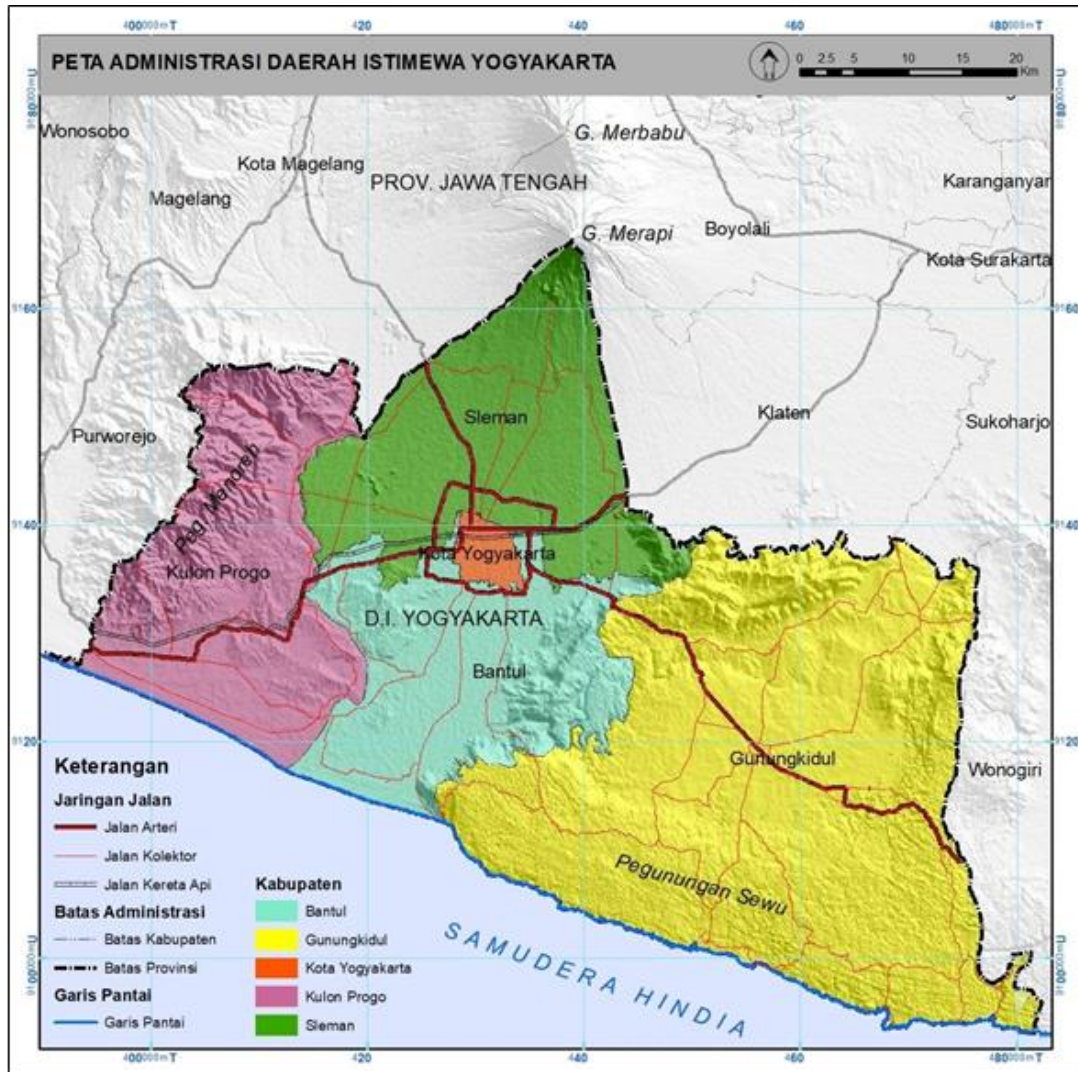
A. Letak dan Kondisi Topografi

Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis terletak diantara $110^{\circ} 00'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, $7^{\circ} 33'$ dan $8^{\circ} 12'$ Lintang Selatan. Provinsi ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa, di sisi bagian selatan. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, barat dan timur, serta Samudera Indonesia di bagian selatan. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara;
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut;
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut; dan
- Kabupaten Purworejo di bagian barat;

Luas Wilayah DIY adalah $3.185,80 \text{ km}^2$ atau sekitar $0,16\%$ dari luas Indonesia (Pemerintah Daerah DIY, 2022). Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman. Sedangkan 1 kota yaitu Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah terluas wilayah sebesar $45,69$ persen dari total luas wilayah DIY. Sedangkan luas wilayah paling kecil adalah di Kota Yogyakarta

(1,04 persen dari luas total wilayah DIY). Secara visual, peta DIY dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Single Basemap DIY, 2019)

Wilayah DIY terdiri dari 78 kapanewon/kemantren, 438 kalurahan/kelurahan, 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905 RW, dan 27.290 RT. Jika dikaitkan dengan wilayah perbatasan, maka ada 18 kapanewon/kemantren, dengan wilayah perbatasan sendiri dideskripsikan sebagai bagian dari wilayah kecamatan yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas darat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah lain dan wilayah kecamatan antar kabupaten/kota (Perda DIY Nomor 3

Tahun 2020). Wilayah perbatasan tersebut tersebar di 3 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 3 kemantren di Kota Yogyakarta, 6 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan 6 kapanewon di Kabupaten Sleman. Secara rinci nama kapanewon dan kemantren yang masuk ke dalam wilayah perbatasan DIY dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kapanewon dan Kemantren Daerah Perbatasan di DIY

No.	Kapanewon
1.	Kapanewon Temon, Kab. Kulon Progo
2.	Kapanewon Kokap, Kab. Kulon Progo
3.	Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo
4.	Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta
5.	Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta
6.	Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta
7.	Kapanewon Girisubo, Kab. Gunungkidul
8.	Kapanewon Rongkop, Kab. Gunungkidul.
9.	Kapanewon Ponjong, Kab. Gunungkidul
10.	Kapanewon Semin, Kab. Gunungkidul.
11.	Kapanewon Ngawen, Kab. Gunungkidul.
12.	Kapanewon Gedangsari, Kab. Gunungkidul.
13.	Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman
14.	Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman
15.	Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman
16.	Kapanewon Pakem, Kab. Sleman
17.	Kapanewon Turi, Kab. Sleman
18.	Kapanewon Tempel, Kab. Sleman

Pada aspek topografi, wilayah di DIY terbagi menjadi empat kategori (Bappeda DIY, 2021). Pertama, sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut. Kedua, sebesar 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter. Ketiga, sebesar 5,04% wilayah dengan

ketinggian antara 500-999 m. Keempat, sebesar 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Kondisi topografi DIY jika dipetakan akan menggambarkan hasil seperti pada Gambar 2.2.

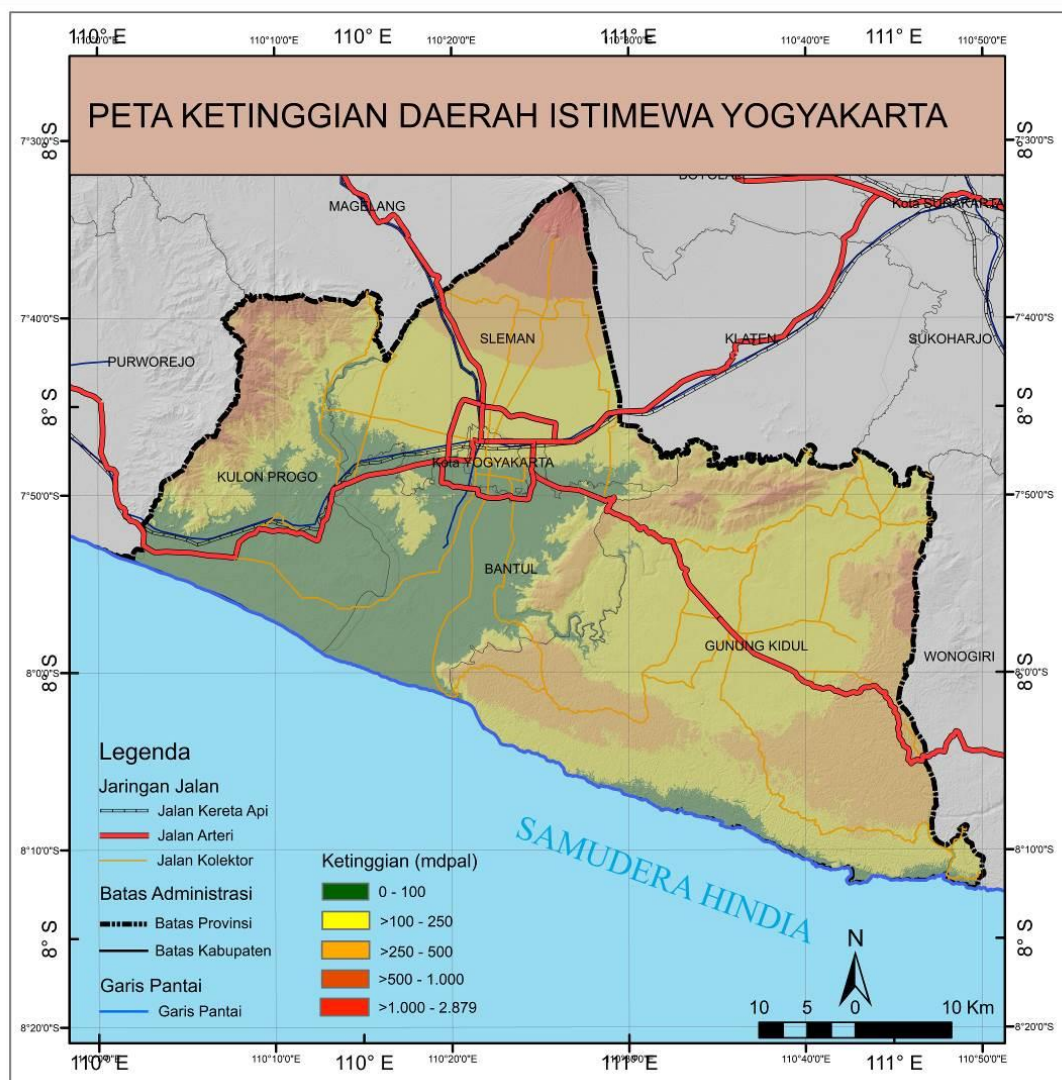
Berdasarkan satuan fisografisnya¹, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 satuan fisiografis berupa:

1. Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter. Satuan fisiografis ini tercatat seluas 1.656,25 km², terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter. Wilayahnya terbentang mulai dari kerucut gunungapi hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo pada ketinggian 0 - 80 meter, seluas 215,62 km. Wilayah ini merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah

¹ <https://jogjaprovo.go.id/berita/kondisi-geografis>

pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

4. Pegunungan Kulon Progo dengan ketinggian hingga 572 meter. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Gambar 2. 2. Peta Ketinggian Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Citra Digital Elevation Model, Shuttle Radar Topography Mission)

B. Demografi

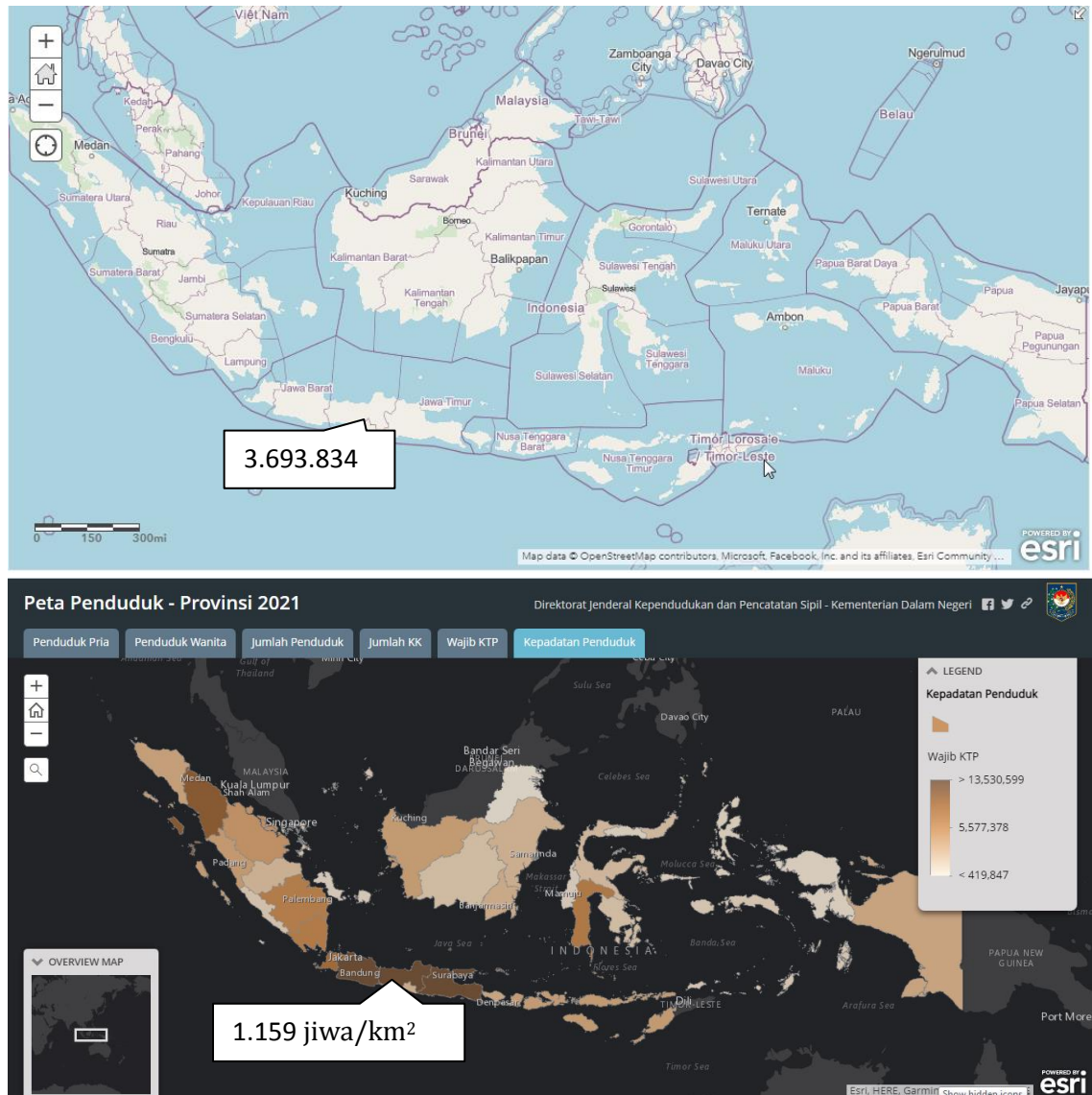
Kondisi demografi di DIY akan dilihat berdasarkan struktur dan prosesnya. Keduanya merupakan unsur pembentuk dalam melihat aspek demografi suatu wilayah (Swanson and Siegel, 2004; Tukiran, 2010). Struktur demografi di DIY akan dilihat berdasarkan jumlah, pertumbuhan, kepadatan dan distribusinya. Sedangkan proses demografi dilihat dari indikator fertilitas dan mortalitasnya.

Berdasarkan jumlahnya, penduduk di DIY pada 2022 sebesar 3.693.834 jiwa. Data ini bersumber dari data dasar Adminduk yang bersumber dari Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 16.388 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan pertumbuhannya, jumlah penduduk di DIY selama setahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 0,44 persen. Pertumbuhan penduduk ini sama dengan pertumbuhan penduduk selama periode 2018-2022 dimana pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,43 persen.

Berdasarkan kepadatannya, kepadatan di DIY pada 2022 sebesar 1.159 jiwa/km². Nilai ini naik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.154 jiwa/km². Kepadatan penduduk di DIY jika dibandingkan dengan kondisi kepadatan provinsi lain di Pulau Jawa maka masuk ke kategori yang lebih cerah (Lihat Gambar 2.3) Naiknya kepadatan penduduk ini sebagai konsekuensi dari bertambahnya jumlah penduduk di DIY.

Berdasarkan distribusinya, Kabupaten Sleman menjadi yang tertinggi persentase jumlah penduduknya di seluruh DIY. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman persentasenya sebesar 29,72 persen dari seluruh penduduk yang ada di DIY. Sedangkan persentase penduduk terendah ada di Kota Yogyakarta (11,18 persen). Jika melihat data lima tahun ke belakang, dengan menggunakan data dari hasil olahan DKB Kemendagri, pola distribusi penduduk yang ada di DIY ini seragam. Pola tersebut adalah tertinggi ada di Kabupaten Sleman dan terendah ada di Kota Yogyakarta. Akan tetapi jika dilihat kepadatannya, Kota Yogyakarta memiliki

nilai kepadatan penduduk yaitu sebesar 12.701 jiwa/km². Sedangkan Sleman sebesar 1.910 jiwa/km².



Gambar 2.3. Peta Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peta Kepadatan Penduduk Provinsi di Indonesia
 Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>, 2022

Pada proses demografi, indikator fertilitas di DIY menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022 nilai TFR di DIY

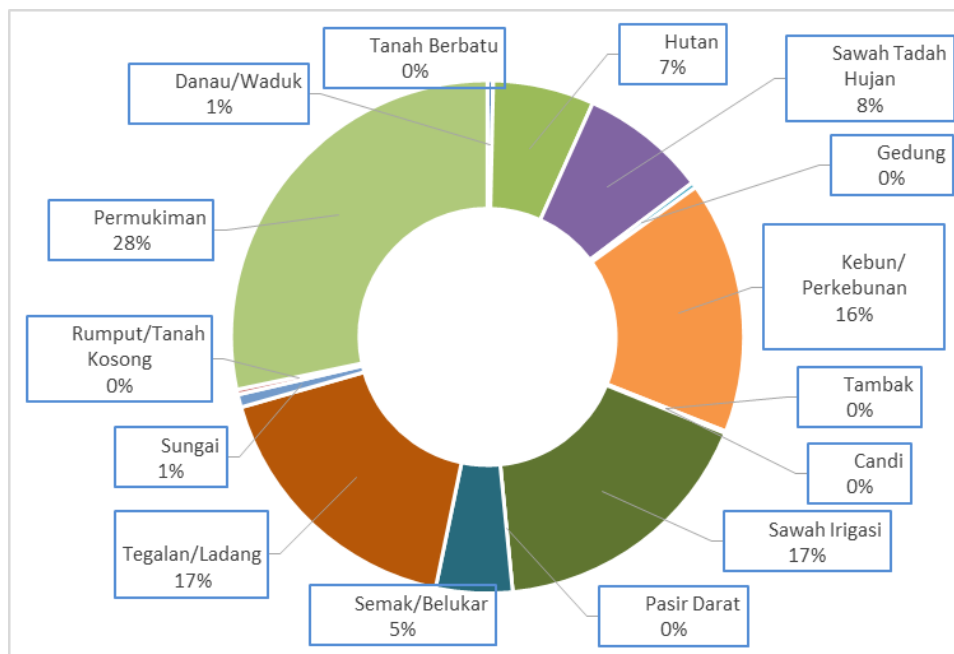
²Sumber:

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=526413dc740a4991860c22fb0c24bdc7>

diperkirakan sebesar 1,9. Pada indikator mortalitas diwakili oleh kematian ibu, dimana nilai absolutnya ada 48 kematian di DIY. Jumlah kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten Bantul dan terendah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Dari sisi penyebab kematian ibu, sebagian besar penyebab utama kematian ibu dikarenakan pendarahan dan infeksi.

C. Penggunaan Lahan

Data yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan lahan di DIY menggunakan data pada 2021 dengan sumber data dari Aplikasi Dataku, Dinas Perumahan dan Tata Ruang DIY, 2021. Penggunaan lahan di DIY didominasi oleh permukiman dengan luasan sebesar 90.030,39 hektar³. Persentasenya untuk permukiman sebesar 28 persen. Kemudian penggunaan lahan paling tinggi berikutnya dimanfaatkan untuk sawah irigasi (17 persen), tegalan/ladang (17 persen) dan kebun/perkebunan (16 persen). Secara detail persentase penggunaan lahan di DIY dapat dilihat pada Gambar 2.4.

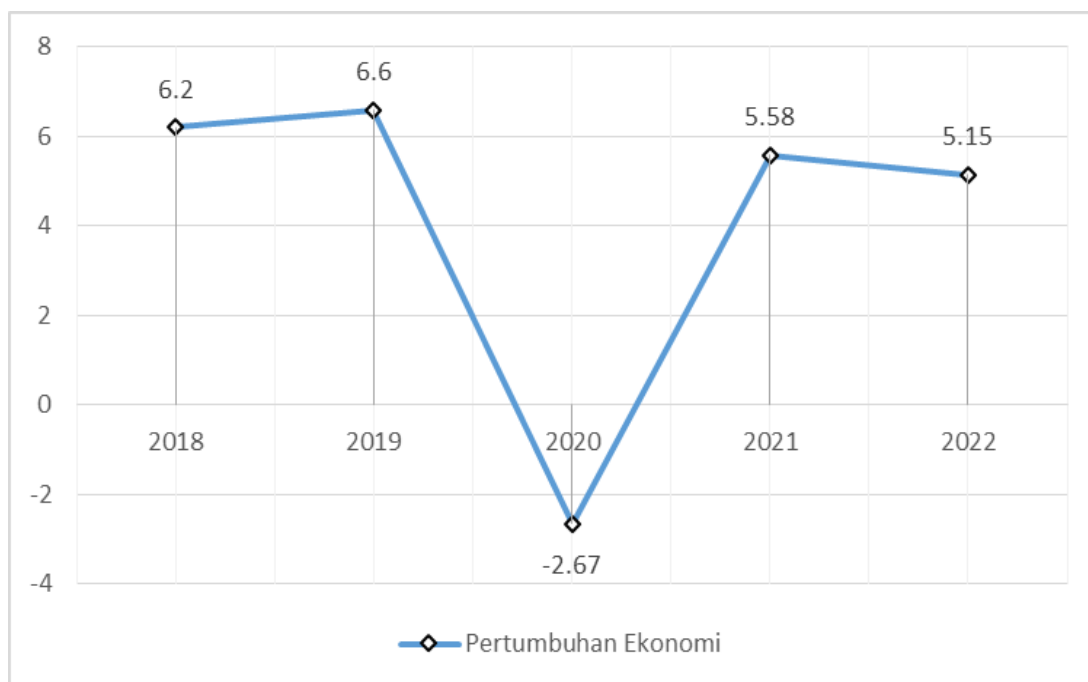


Gambar 2. 4. Diagram Persentase Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2021 (Sumber: Aplikasi Dataku, Dinas Perumahan dan Tata Ruang DIY, 2021)

³ http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/637-lahan-di-diy

D. Ekonomi dan Potensi Daerah

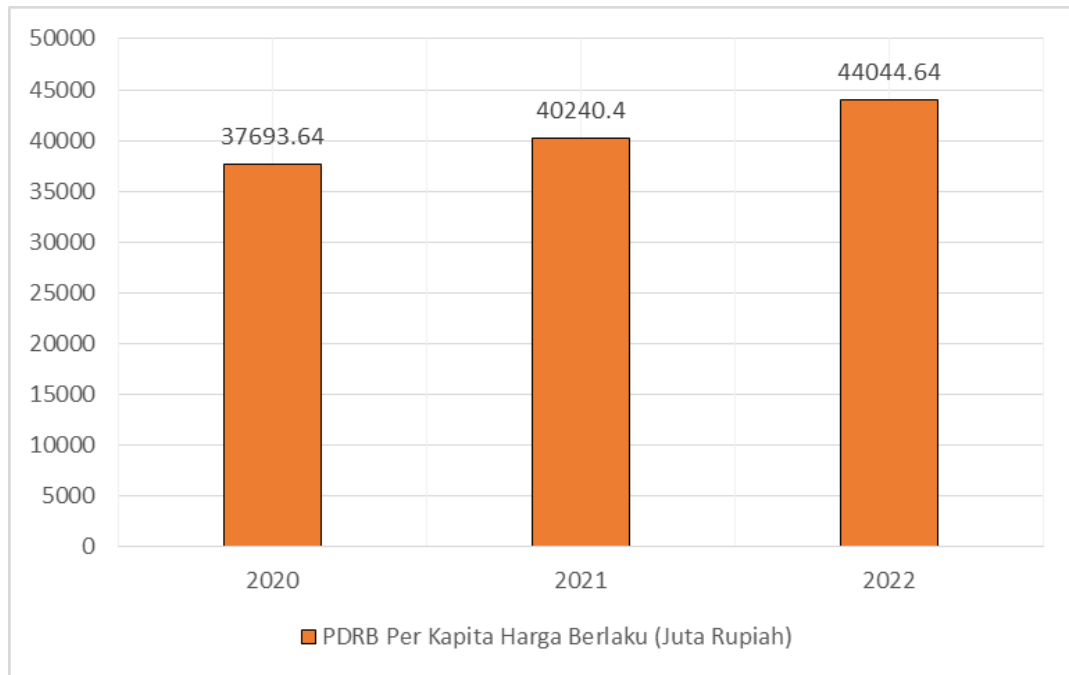
Kondisi ekonomi di DIY mengalami dinamika pada kurun waktu 2018-2022. Pada periode 2018-2019 kondisi ekonomi DIY mengalami kondisi yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang menyentuh angka 6,6 persen. Kemudian pada 2020 pertumbuhan ekonomi di DIY mengalami penurunan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Saat itu pertumbuhan ekonomi di DIY berada pada angka -2,67 persen (Lihat Gambar 2.4). Pada 2021 pertumbuhan ekonomi DIY mengalami *rebound* menjadi 5,58 persen. Dan pada 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi di DIY sebesar 5,15 persen.



Gambar 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi DIY 2018-2022 (dalam persen)
(Sumber: LKPJ Gubernur DIY 2021; BPS DIY, 2023)

Selama tiga tahun terakhir (periode 2020-2022), nilai PDRB di DIY mengalami kenaikan. Pada 2022, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku di DIY sebesar 165 690,21 triliun rupiah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan di DIY sebesar 112 898,32 triliun rupiah. Jika dihitung PDRB Per Kapita Harga Berlaku, pada 2022,

nilainya mencapai Rp 44.044,64 juta rupiah. Nilai ini memiliki tren kenaikan dibandingkan kondisi pada dua tahun sebelumnya (Gambar 2.6).



Gambar 2. 6. PDRB Per Kapita Harga Berlaku DIY 2020-2022
(Sumber: BPS DIY, 2023)

Kondisi perekonomian di DIY sejak 2021 telah menunjukkan kondisi yang semakin baik seiring mulai tertanganinya pandemi Covid-19. Sejak 2021, pertumbuhan di hampir semua sektor perekonomian di DIY menunjukkan nilai yang positif. Tren baik tersebut kemudian berlanjut pada 2022 dimana semua sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang positif (Lihat Tabel 2.2).

Pada 2022, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan, dengan pertumbuhan sebesar 18,26 persen. Hal ini diduga karena telah dibukanya secara masif pembatasan mobilitas sehingga sektor transportasi dan pergudangan dapat secara leluasa beroperasi. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor akomodasi dan makan minum dimana juga menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi dengan pertumbuhan sebesar 12,4 persen. Di sisi lain, terdapat beberapa

sektor ekonomi yang pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan di tahun sebelumnya. Salah satu contohnya adalah sektor jasa pendidikan. Pada 2022 pertumbuhannya hanya sebesar 0,98 persen, jauh dibanding capaian tahun-tahun sebelumnya dimana berkisar antara 4-7 persen.

Tabel 2.2.
Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	1,02	4,28	1,17	5,12
2	Pertambangan dan Penggalian	3,04	-8,84	-3,11	1,72
3	Industri Pengolahan	5,72	-4,31	0,30	1,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,43	-1,38	2,40	6,82
5	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	8,90	0,51	6,82	3,29
6	Konstruksi	14,38	-15,62	10,82	4,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,16	-4,51	1,51	4,82
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	-20,21	1,93	18,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-16,86	7,49	12,40
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	19,66	16,69	3,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,49	-1,06	1,45	5,24
12	Real Estat	5,93	1,27	0,57	2,82
13	Jasa Perusahaan	6,75	-14,89	8,09	7,16
14	Administrasi Pemerintah,Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	-2,24	-0,39	2,95
15	Jasa Pendidikan	6,57	4,47	5,00	0,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	19,18	4,47	3,99
17	Jasa Lainnya	6,25	-15,74	21,95	15,4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,59	-2,67	5,58	5,15

Sumber: BPS DIY, 2023

Berdasarkan sektor unggulannya, dalam laporan LKPJ Gubernur DIY 2021 disebutkan beberapa sektor yang merupakan sektor-sektor potensial. Sektor yang termasuk sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan kondisi pada 2022, dari ketiga sektor yang disebutkan sebagai sektor unggulan, seluruh sektor tersebut seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor industri pengolahan mengalami

pertumbuhan sebesar 1,76 persen. Sektor penyedia akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan sebesar 12,4 persen. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen. Sebagai catatan, nilai pertumbuhan di ketiga sektor unggulan di DIY ini jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya.

E. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di DIY dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Gini dan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Nilai IPM⁴ akan merepresentasikan pengukuran kondisi sosial secara menyeluruh tentang keberhasilannya dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Nilai ini menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan capaiannya, pada 2022, nilai IPM di DIY sebesar 80,64. Berdasarkan klasifikasinya, nilai IPM di DIY tergolong dalam kategori IPM tinggi karena telah di atas 80 persen. Capaian IPM pada 2022 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (Lihat Gambar 2.7).

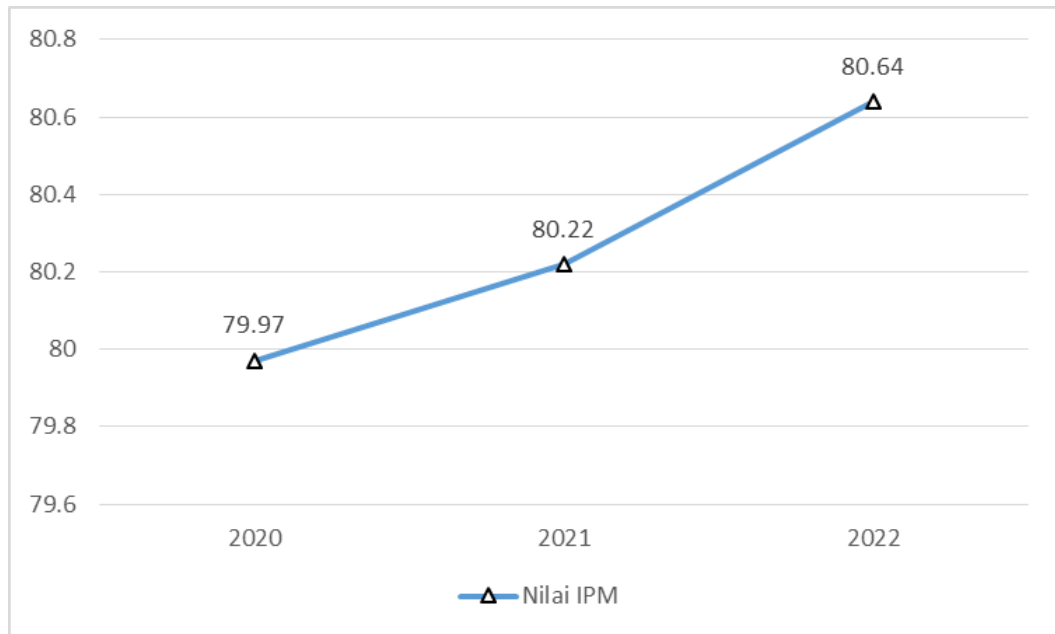
Nilai IPG⁵ digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketertinggalan pencapaian laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari BPS⁶, nilai IPG di DIY sebesar 94,99. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan di DIY mampu mengakses hasil pembangunan yang tidak kalah dengan capaian laki-laki. Dari seluruh kabupaten dan kota di DIY, sumbangan nilai IPG terbesar

⁴ <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

⁵ <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>

⁶ <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

diberikan oleh Kota Yogyakarta dimana nilainya 98,48. Sedangkan yang terkecil ada di kabupaten Gunungkidul dengan nilai IPG sebesar 85,82.

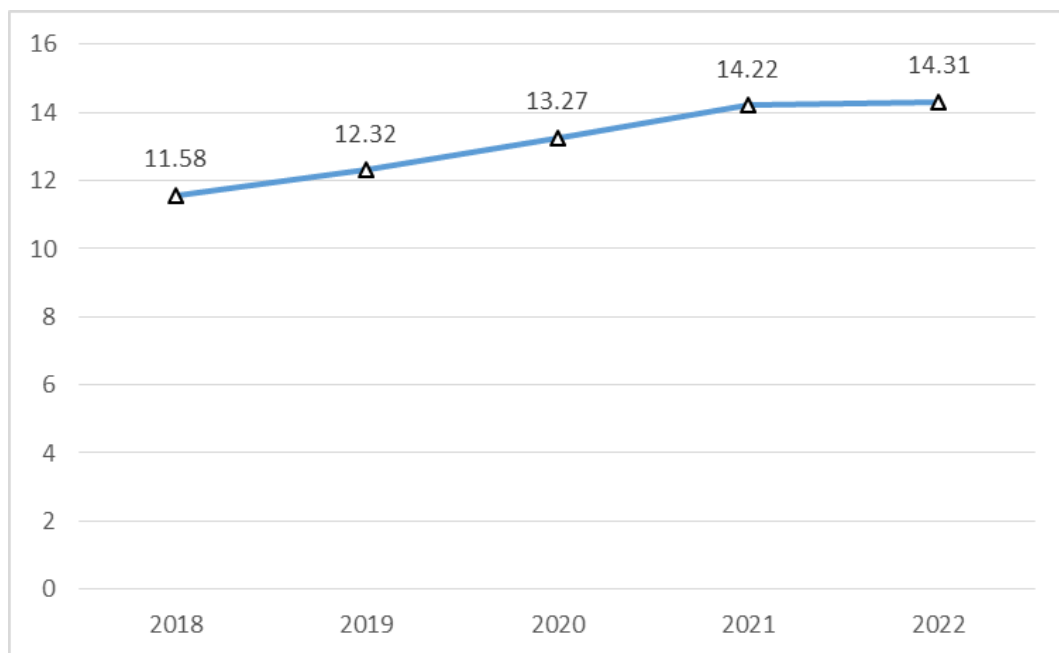


Gambar 2. 7. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di DIY 2020-2022
(Sumber: BPS DIY, 2023)

Kondisi sosial berikutnya yang dipotret adalah melihat apakah ada kesenjangan/ ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Indikator yang digunakan adalah indeks gini. Pada 2022, indeks gini di DIY sebesar 0,439, yang berarti memiliki kategori berada pada klasifikasi ketimpangan sedang. Jika ditarik ke belakang, nilai indeks gini di DIY sejak 2018 telah berada dalam kategori ketimpangan sedang. Target ke depan tentu saja nilai indeks gini dapat terus turun sehingga berada pada tingkat ketimpangan yang rendah.

Dari aspek budaya, indikator yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan kekayaan Budaya Benda dan Budaya Tak benda yang beragam sehingga pelestariannya menjadi sebuah prioritas. Kekayaan budaya benda yang dilestarikan tersebut terdiri dari Struktur, Situs, Benda Cagar Budaya, Bangunan

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Pelestarian budaya benda di DIY memiliki tren kenaikan dari 2018-2022 (Gambar 2.8). Pada 2022, Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan sebesar 14,31 persen. Dalam LKPJ AMJ Gubernur DIY 2017-2022 disebutkan bahwa faktor pendukung capaian kenaikan tersebut adalah banyaknya potensi budaya benda yang dimiliki oleh DIY yang didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya benda serta sinergitas antar stakeholder dalam upaya pelestarian budaya benda.



Gambar 2.8. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022

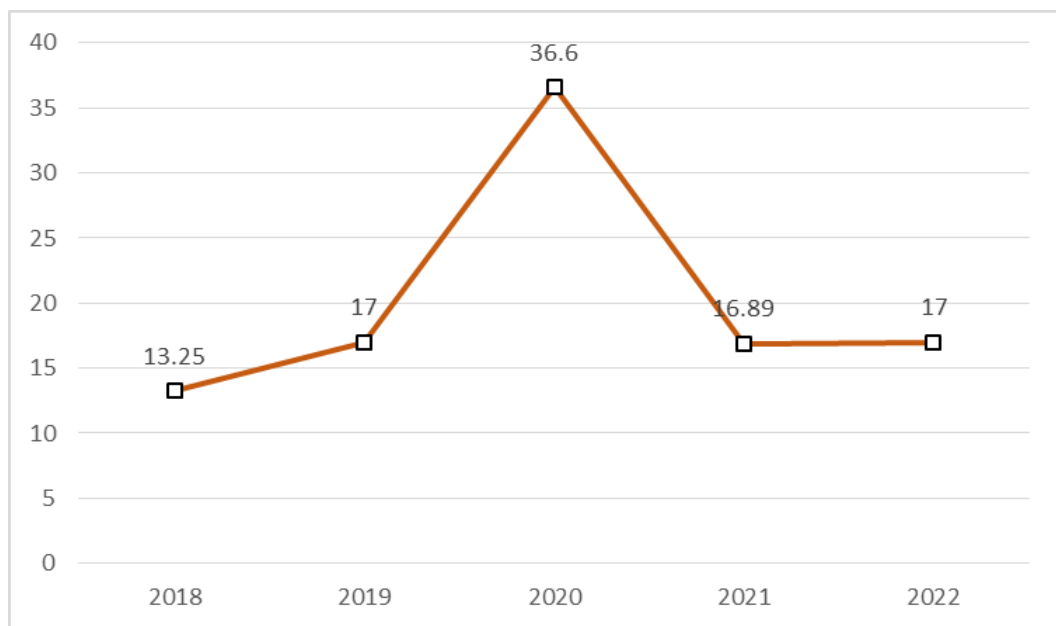
Sumber: Disbud DIY, 2022

Capaian indikator peningkatan budata tak benda yang dilestarikan juga menunjukkan kinerja yang baik dari 2018-2022. Pada 2022, persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan sebesar 17 persen (Gambar 2.8). Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan berupa Warisan Budaya Tak Benda yang dimiliki oleh DIY diantaranya Upacara Adat, Upacara Tradisi, Jenis Kesenian yang dibawakan oleh Kelompok Organisasi Seni

dan di sebarakan melalui Lembaga Budaya dan Lembaga Pendidikan Budaya. Dalam LKPJ AMJ Gubernur DIY 2017-2022 disebutkan bahwa:

“Capaian kinerja Program Pemda dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan, memiliki kinerja yang baik dari tahun 2018-2022. Terbukti dengan tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung dari capaian indikator ini adalah banyaknya potensi warisan budaya tak benda yang ada di DIY yang masih dipelihara dan dilestarikan. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya pembatasan atau kuota penetapan warisan budaya tak benda di tingkat nasional”.



Gambar 2.9. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2018-2022

Sumber: Disbud DIY, 2022 dalam LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022

BAB III

JUMLAH KOMPOSISI PENDUDUK DAN STRUKTUR KELUARGA

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Kemendagri menyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terlihat pada Tabel 3.1 jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar 3.631.015 jiwa yang terus naik menjadi sebesar 3.693.834 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data BPS DIY hasil sensus penduduk 2020 dalam kurun waktu tahun 2010-2021 yakni sebesar 0,58% per tahun. Jumlah penduduk Provinsi DIY ini menyumbang 1,36% dari jumlah penduduk total Indonesia.

Jumlah penduduk tiap Kabupaten/Kota di DIY pada periode 2018-2022 cenderung mengalami penambahan jumlah penduduk. Namun memasuki tahun 2019 hingga tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebanyak 5.240 jiwa dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 443.591 jiwa di tahun 2022 atau sebesar 12,01 persen dari penduduk DIY. Sedangkan, jumlah penduduk tertinggi tiap tahunnya pada periode 2018-2022 di Provinsi DIY berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk di tahun 2022 sebesar 1.097.955 jiwa (Terlihat pada Tabel 3.1) atau sekitar 29,72 persen atau hampir sepertiga dari penduduk DIY merupakan penduduk Sleman.

Kepadatan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh faktor luas wilayah Kabupaten Sleman yang relatif besar, selain itu juga berupa pembangunan yang masif terjadi di Kabupaten Sleman sehingga tersedia banyak fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Banyaknya fasilitas tersebut akan menarik penduduk untuk tinggal di Kabupaten Sleman karena mudahnya akses terhadap banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lainnya. Masifnya pembangunan tersebut juga akan mendorong perekonomian di Kabupaten Sleman sehingga menjadi magnet bagi pencari kerja untuk tinggal di daerah tersebut. Kondisi ini membuktikan bahwa faktor pembangunan dan ekonomi suatu wilayah menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk yang berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah (Rochaida, 2016).

Tabel 3. 1.
Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	448.114	447.246	443.003	442.874	443.591
Bantul	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
Gunungkidul	765.284	769.907	774.609	774.441	775.246
Sleman	1.063.938	1.075.575	1.082.754	1.088.109	1.097.955
Kota Yogyakarta	413.961	414.055	416.117	415.509	412.797
DIY	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.677.446	3.693.834

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2018 - 2022

Perubahan jumlah penduduk terjadi apabila adanya faktor demografi seperti tingkat kelahiran, angka kematian, dan harapan hidup. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi dari angka kematian, jumlah penduduk akan cenderung bertambah. Namun, jika angka kematian lebih tinggi atau harapan hidup rendah, jumlah penduduk dapat mengalami penurunan.

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di setiap tahunnya tersebut disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dari pada kematian yakni sebesar 1,89% per tahun dari hasil SP Tahun 2020. Selain itu, juga disebabkan oleh tingginya angka migrasi masuk dibandingkan dengan migrasi ke luar dengan rasio migrasi sebesar 1,16 di tahun 2022.

Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan DIY jumlah migrasi masuk tahun 2022 sebesar 79.713 jiwa sedangkan jumlah migrasi keluar sebanyak 68.702 jiwa.

Tingginya migrasi masuk tersebut sebagai bentuk migrasi pelajar yang disebabkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki citra sebagai kota pendidikan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, tidak mahal biaya hidup dan terkenalnya atas keramahan masyarakatnya yang membawa konsekuensi menarik banyak pelajar/mahasiswa dari berbagai daerah untuk bermigrasi ke Provinsi DIY dan menjadi salah satu faktor yang membuat jumlah penduduknya semakin meningkat setiap tahunnya. (Herawati, 2010). Oleh karena itu, Provinsi DIY merupakan daerah yang sering menjadi tujuan migrasi masuk dari daerah luar.

Tabel 3. 2.
Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Perubahan Penduduk Tahun 2018-2022				Rata-rata per Tahun (%)
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
Kulon Progo	-0,19	-0,96	-0,03	0,16	-0,25
Bantul	1,01	0,56	0,19	0,80	0,64
Gunungkidul	0,60	0,61	-0,02	0,10	0,32
Sleman	1,08	0,66	0,49	0,90	0,78
Kota Yogyakarta	0,02	0,50	-0,15	-0,66	-0,07
DIY	0,69	0,41	0,17	0,44	0,43

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2018 - 2022

Penambahan dan pengurangan jumlah penduduk suatu daerah dapat dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang relatif sedikit dan negatif di tiga kabupaten/kota pada tahun 2020-2021 yang terlihat pada Tabel 3.2 disebabkan oleh beberapa faktor, di mana pengaruh pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama yang dapat diidentifikasi. Penyebaran virus dan dampaknya terhadap sistem kesehatan telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian di berbagai wilayah, termasuk DIY.

Terlihat dari Tabel 3.2 bahwa Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta memiliki nilai negatif pada rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode tahun 2018-2022. Selain dikarenakan faktor demografi berupa penurunan angka kelahiran dan kematian yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi lambat atau bahkan negatif serta dampak COVID-19 juga dikarenakan adanya migrasi antarwilayah yang dapat mengurangi jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota yang ditunjukkan dari nilai migrasi netto yang negatif.

Nilai negatif pada migrasi *netto* menunjukkan terjadi perpindahan massa yang signifikan dari daerah tersebut ke daerah lain. Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintah rasio migrasi pada Kota Yogyakarta pada tahun 2020 dan 2021 tercatat berada dibawah angka 1 yaitu 0,89 dan 0,87 yang menunjukkan jumlah migrasi keluar lebih banyak dibandingkan migrasi masuk. Tercatat migrasi masuk oleh Biro Tata Pemerintah di tahun 2021 Kota Yogyakarta sebanyak 7.475 jiwa yang nilainya lebih sedikit dibandingkan migrasi keluar sebanyak 8.626 jiwa.

Adanya pengaruh pada manajemen data diantaranya terjadi konsolidasi data secara nasional atau penggabungan data dari berbagai sumber yang sebelumnya tidak terintegrasi dengan baik serta terjadi penonaktifan data yang belum melakukan perekaman atau terindikasi ganda (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2022). Hal tersebut dapat membuat jumlah penduduk tercatat menjadi lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi negatif.

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk sendiri ditunjukkan dengan nilai kepadatan penduduk (*population density*) yaitu banyaknya penduduk di suatu daerah dalam satuan kilometer persegi (BPS, 2022). Terlihat pada Tabel 3.3 distribusi penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebaran penduduknya belum merata yang mana cenderung lebih tinggi berada di daerah perkotaan. Distribusi penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terfokus pada Kota Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 12.701,45 jiwa/km² pada tahun 2022.

Tabel 3.3.

Distribusi dan Kepadatan Penduduk DIY, 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kulon Progo	443.591,00	12,01	586,28	756,62
Bantul	964.245,00	26,10	506,85	1.902,43
Gunungkidul	775.246,00	20,99	1.485,36	521,92
Sleman	1.097.955,00	29,72	574,82	1.910,08
Kota Yogyakarta	412.797,00	11,18	32,50	12.701,45
Jumlah	3.693.834,00	100,00	3.185,81	1.159,46

Sumber: Kemendagri. Hasil Olahan DKB Semester II Tahun 2022

Kota Yogyakarta secara geografis menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata di Provinsi DIY. Kota Yogyakarta memiliki banyak fasilitas pendidikan dan pusat kebudayaan yang menarik banyak mahasiswa dan pelaku pariwisata untuk tinggal di sana. Selain itu, Kota Yogyakarta juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai layanan publik, bisnis, dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga menimbulkan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kepadatan penduduk tertinggi disusul oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul memiliki kepadatan penduduk paling rendah dengan kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 521,92 jiwa/km². Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi di Provinsi DIY karena Kota Yogyakarta sebagai urban dan Sleman sebagai sub-urban yang terus mengalami proses modernisasi, industrialisasi, komersialisasi serta edukasi sehingga menjadi faktor penarik urbanisasi serta migrasi.

C. Rasio Penduduk Laki-laki dan Perempuan

Ukuran dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dihasilkan berupa rasio jenis kelamin. Ukuran rasio jenis kelamin menyatakan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi dan waktu tertentu (Zhao, 2010). Rasio jenis kelamin digunakan untuk menganalisis distribusi jenis kelamin dalam perencanaan pengembangan berwawasan gender, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya memperhatikan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

Tabel 3. 4.
Jumlah Penduduk Menurut Gender dan Rasio Laki-laki/Perempuan
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kota /Kabupaten	Penduduk		
	L	P	Rasio Jenis Kelamin
Kulon Progo	219.776	223.815	98,2
Bantul	479.742	484.503	99,0
Gunungkidul	383.742	391.504	98,0
Sleman	543.466	554.489	98,0
Kota Yogyakarta	201.198	211.599	95,1
Jumlah	1.827.924	1.865.910	98,0

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Nilai rasio jenis kelamin Provinsi DIY pada tahun 2022 sebesar 97,96 persen. Besar rasio tersebut berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Nilai rasio jenis kelamin di bawah 100 menunjukkan adanya ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan, dengan

kelebihan perempuan dalam populasi tersebut. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,03 persen di tahun 2021. Penurunan nilai rasio jenis kelamin berarti terdapat penurunan jumlah populasi laki-laki atau peningkatan jumlah populasi perempuan. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan demografi, pola migrasi, atau pergeseran kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan (Zeng, 2006).

Tabel 3. 5.
Kelompok Umur dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Golongan Umur	Rasio Laki-Laki/Perempuan (%)					
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
Umur 0-4	110,45	106,07	106,48	106,84	107,51	107,05
Umur 5-9	106,19	105,62	106,55	105,44	105,41	105,78
Umur 10-14	107,44	106,57	108,20	105,19	102,41	106,07
Umur 15-19	104,57	104,63	106,77	104,01	104,64	104,86
Umur 20-24	102,93	102,57	106,37	103,86	103,91	103,93
Umur 25-29	104,70	100,23	106,75	102,21	100,10	102,66
Umur 30-34	100,36	97,94	104,24	97,83	97,40	99,34
Umur 35-39	98,40	99,27	104,20	97,05	95,57	98,98
Umur 40-44	100,19	102,66	103,04	99,32	95,63	100,59
Umur 45-49	99,41	101,02	97,94	97,53	93,62	98,28
Umur 50-54	96,97	96,60	94,99	95,49	89,72	95,18
Umur 55-59	92,46	93,74	89,86	91,91	87,08	91,45
Umur 60-64	91,17	92,55	88,09	88,49	84,04	89,29
Umur 65-69	91,33	98,07	89,09	91,11	83,26	91,40
Umur 70-74	87,05	90,46	90,33	85,10	79,06	87,42
Umur 75 keatas	66,42	66,47	66,00	72,98	56,66	67,11
Rasio Total Jumlah Penduduk	98,20	99,02	98,02	98,01	95,08	97,96
Jumlah Penduduk	443.591	964.245	775.246	1.097.955	412.797	3.693.834

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Penurunan nilai rasio jenis kelamin dapat berdampak pada feminisasi struktur penduduk yang mengacu pada perubahan dalam komposisi jenis kelamin dalam populasi tertentu, ditandai dengan peningkatan proporsi populasi perempuan dibandingkan dengan populasi laki-laki. Feminisasi struktur penduduk dapat memiliki beberapa implikasi terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penurunan nilai rasio jenis kelamin juga menarik perhatian karena itu menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran dalam distribusi gender yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan keberlanjutan populasi.

Dominasi jumlah perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki tidak terjadi di semua kelompok umur. Jika melihat lebih detail terdapat sebuah pola dimana laki-laki masih mendominasi perempuan pada kelompok usia tertentu. Pada level kabupaten/kota dominasi jumlah laki-laki terlihat pada umur lima tahunan kelompok 0-44 tahun, kecuali di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terjadi pada rentang umur lima tahunan kelompok usia 0-29 tahun.

Secara umum, rasio jenis kelamin di Provinsi DIY menunjukkan pola yang semakin menurun dengan bertambahnya usia. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok usia 0-9 tahun sebesar 107 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu sebesar 67. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki.

Persentase penduduk lansia yang didominasi oleh perempuan ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Kesehatan RI (2013) bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki karena penduduk perempuan memiliki usia harapan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki. Demikian pula WHO (2009) menyatakan bahwa wanita memiliki harapan hidup yang lebih lama dibandingkan pria. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku hidup perempuan yang lebih perhatian terhadap kesehatan dibandingkan laki-laki serta faktor genetik perempuan memiliki sistem imun

yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan laki-laki yang kedua faktor tersebut menurunkan risiko terhadap penyakit (Beltekian, 2018). Persentase penduduk lansia perempuan yang lebih tinggi di suatu wilayah disebut dengan *feminization of later life* atau feminisasi penduduk usia tua (Sousa, dkk, 2018).

Feminisasi kelompok usia lansia dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan politik seperti dalam menghadapi tantangan finansial yang lebih besar saat mencapai usia lanjut serta dalam kebutuhan perawatan kesehatan yang lebih intensif dan biaya yang lebih tinggi. Dalam menghadapi feminisasi kelompok usia lansia, penting untuk memperhatikan isu-isu gender, termasuk pemenuhan hak-hak perempuan yang lebih tua. Diperlukan tindakan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi lansia terutama perempuan lansia.

D. Piramida Peduduk

Salah satu analisis demografi yang penting adalah analisis struktur umur penduduk. Selain menggunakan metode numerik, komposisi penduduk dapat pula digambarkan dengan menggunakan grafik. Salah satu grafik yang umum digunakan adalah piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu grafik diagram batang yang merefleksikan penduduk menurut jenis kelamin dengan sumbu vertikal (tegak) untuk rentang usia penduduk dan sumbu horizontal (datar) untuk menggambarkan jumlah populasi pada tiap rentang usia (Simosir dan Rajagukguk, 2015).

Pada teknik penggambaran piramida penduduk, bagian dasar piramida biasanya melambangkan kelompok usia muda dilanjutkan ke puncak piramida yang melambangkan kelompok usia tua. Bagian sebelah kiri dan kanan piramida penduduk menggambarkan jenis kelamin. Bagian sebelah kiri piramida merupakan gambaran jumlah populasi laki-laki, sedangkan bagian sebelah kanan menggambarkan jumlah populasi

perempuan. Piramida penduduk digunakan sebagai alat untuk menganalisis pola pertumbuhan populasi, ketimpangan jenis kelamin, dan implikasi sosial-ekonomi terkait (Simosir dan Rajagukguk, 2015).

Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur 5 tahunan digambarkan dengan piramida penduduk. Piramida penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tiap kabupaten/kotanya yang terlihat pada Gambar 3.1 termasuk kedalam jenis piramida penduduk stasioner. Hal tersebut dikarenakan ciri piramida penduduk stasioner bentuk di bagian dasar piramida kecil, banyaknya penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama dan mengecil pada kelompok umur usia tua (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010). Bentuk piramida stasioner terdapat pada wilayah yang mengalami tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah (Mantra, 2004).

Bentuk piramida stasioner terjadi di DIY diduga kuat terjadi karena faktor perpindahan penduduk (migrasi) pada kelompok usia sekolah, usia bekerja dan usia lansia (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021). Provinsi DIY memiliki banyak perguruan tinggi dan sekolah yang berkualitas yang membuat penduduk kelompok usia sekolah yang ingin mendapatkan pendidikan yang baik sering kali bermigrasi ke DIY. Selain itu, Provinsi merupakan kota pelajar dan kota budaya yang memiliki banyak peluang kerja yang menarik minat pada migran untuk bertempat tinggal di DIY. Selain itu DIY memiliki fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Hal ini mendorong migrasi lansia yang mencari perawatan kesehatan yang baik ke DIY.



Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo (a.), Bantul (b.), Gunung Kidul (c.), Sleman (d.), Kota Yogyakarta (e.) dan DIY (f.) 2022
 Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

DIY tahun 2022 masuk ke dalam piramida stasioner karena struktur usia penduduknya telah mencapai tingkat stabil. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan fertilitas, peningkatan kesehatan umum, dan pelayanan kesehatan yang baik. Piramida stasioner cenderung pada komposisi kelompok usia dewasa (15-64 tahun) yang dominan. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif yang berpotensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah memiliki jumlah yang relatif tinggi. Selain itu, juga terjadi adanya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup, sistem kesehatan, dan perawatan bagi lansia.

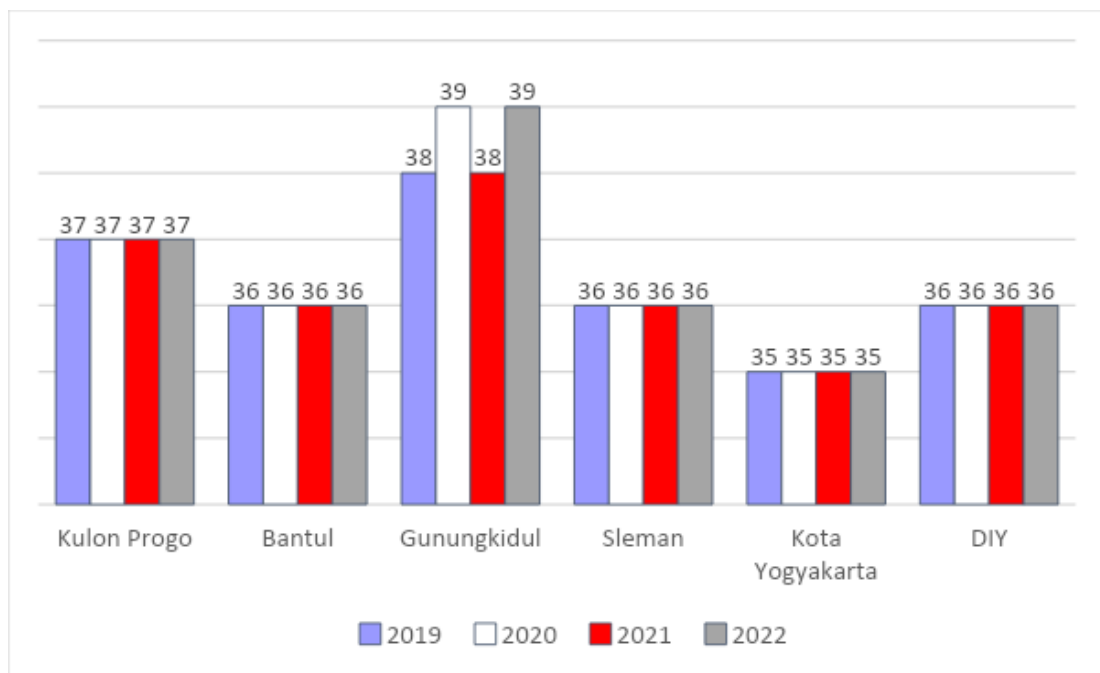
Dampak yang terjadi pada masa mendatang dengan penduduk berpiramida stasioner adalah perubahan dalam struktur populasi. Jumlah populasi muda akan menjadi lebih sedikit sementara jumlah populasi tua akan menjadi lebih banyak. Dampak lainnya adalah peningkatan kebutuhan sosial dan kesehatan bagi populasi lansia, yang mungkin membutuhkan penyesuaian kebijakan dan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan.

E. Median Penduduk

Umur median penduduk adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama di suatu populasi. Ini berarti bahwa 50 persen dari populasi berusia di bawah umur median dan 50 persen berusia di atas umur median. Dengan menggunakan ukuran umur median dapat ditentukan kategori penduduk suatu wilayah yakni penduduk muda jika umur median kurang dari 20 tahun, penduduk menengah (*intermediate*) jika umur median pada rentang 20-29 tahun, dan penduduk tua jika umur median lebih dari 30 tahun.

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu dan melihat

karakterisasi populasi yang menua. Negara-negara maju umumnya memiliki umur median yang lebih tinggi dibandingkan negara yang berkembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pengurangan angka kelahiran, dan perkembangan ekonomi yang lebih baik.



Gambar 3. 2. Umur Median Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2019-2022

Umur median penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 tahun terakhir adalah 36 tahun, yang berarti setengah dari penduduk DIY pada tahun 2019-2022 berusia di bawah 36 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 36 tahun. Umur median ini terletak pada lebih dari umur 30 tahun. Kategori umur median di tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY masuk kedalam kategori penduduk tua (*old population*). Umur median tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul (nilainya 39 tahun) dan umur median terendah berada di Kota Yogyakarta (nilainya 35 tahun). Dengan kata

lain, penduduk DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai penduduk tua (*old population*).

Banyaknya penduduk yang berusia di atas 36 tahun, maka mengindikasikan juga banyak penduduk yang memasuki masa lanjut usia. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan beban sosial dan ekonomi, misalnya perawatan kesehatan atau ketersediaan fasilitas penunjang bagi lansia. Sedangkan banyaknya penduduk yang berusia di bawah 36 tahun, menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki banyak pemuda.

Pemuda dianggap sebagai potensi sumber daya yang penting bagi pembangunan, karena mereka masih dalam usia produktif dan dapat berkontribusi secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk mengembangkan kebijakan yang proaktif dalam menghadapi perubahan demografis ini. Kebijakan yang tepat akan mampu memaksimalkan potensi penduduk usia produktif, memastikan pemerataan pendidikan dan kesehatan bagi semua generasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat usia lanjut. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan bagi suatu daerah.

F. Rasio Beban Tanggungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk tidak produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan jumlah penduduk produktif (penduduk usia kerja 15-64 tahun) yang mencerminkan angka beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif (usia kerja) (Setiawan, 2017). Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan yang dibicarakan dalam studi demografi sering disebut *age dependency ratio*. Hal ini disebabkan karena rasio ini lebih merupakan perbandingan antara penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja. Meskipun tidak akurat secara ekonomi, rasio

ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2010).

Tabel 3. 6.
Jumlah Penduduk Usia Muda, Produktif dan Lanjut Menurut Gender
di Kabupaten/Kotase-DIY Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	0-14 tahun (penduduk usia muda)		15-64 tahun (penduduk usia produktif)		64 tahun ke atas (penduduk usia lanjut)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kulon Progo	45.298	41.985	150.120	151.317	24.358	30.513
Bantul	102.948	97.025	333.468	335.879	43.326	51.599
Gunung Kidul	73.939	69.018	260.071	259.725	49.732	62.761
Sleman	118.347	111.910	377.065	384.688	48.054	57.891
Kota Yogyakarta	42.676	40.696	142.676	149.423	15.846	21.480
DIY	383.208	360.634	1.263.400	1.281.032	181.316	224.244

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan (Setiawan, 2017). Berdasarkan pembagian struktur usia produktif-non produktif, struktur penduduk DIY didominasi usia produktif dengan jumlah penduduk 2.544.432 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.281.032 jiwa adalah perempuan dan 1.263.400 jiwa adalah laki-laki.

Terlihat dari Tabel 3.6 menunjukkan bahwa tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul, perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan laki-laki di usia produktif. Sama halnya pada penduduk nonproduktif usia lanjut usia yang mana seseorang telah memasuki masa pensiun atau pada usia 65 tahun keatas juga didominasi oleh perempuan di Provinsi DIY.

Jumlah penduduk usia lanjut di Provinsi DIY adalah 405.560 jiwa. Dari jumlah tersebut, 224.244 jiwa adalah perempuan dan 181.316 jiwa adalah laki-laki. Sedangkan pada penduduk nonproduktif usia muda (penduduk yang berusia 0-14 tahun) didominasi oleh laki-laki. Penduduk usia muda di

Provinsi DIY adalah 743.842 jiwa. Dari jumlah tersebut, 383.208 jiwa adalah laki-laki dan 360.634 jiwa adalah perempuan.

Tabel 3. 7.
Penduduk Usia Muda, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Tua dan Beban Tanggungan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	0-14 tahun (penduduk usia muda)		15-64 tahun (penduduk usia produktif)		64 tahun ke atas (penduduk usia lanjut)		Jumlah Penduduk	Rasio Beban Tanggungan
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		%
Kulon Progo	87.283	19,68	301.437	67,95	54.871	12,37	443.591	47,16
Bantul	199.973	20,74	669.347	69,42	94.925	9,84	964.245	44,06
Gunung Kidul	142.957	18,44	519.796	67,05	112.493	14,51	775.246	49,14
Sleman	230.257	20,97	761.753	69,38	105.945	9,65	1.097.955	44,14
Kota Yogyakarta	83.372	20,20	292.099	70,76	37.326	9,04	412.797	41,32
DIY	743.842	20,14	2.544.432	68,88	405.560	10,98	3.693.834	45,17

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Rasio ketergantungan yang memperhatikan usia muda dan usia lanjut memberikan gambaran kelompok umur mana yang berkontribusi paling besar atau sedikit dalam rasio ketergantungan total. Rasio ketergantungan di Provinsi DIY pada tahun 2022 sebesar 45 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 45 penduduk usia nonproduktif, 29 diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 16 lainnya berasal dari kelompok usia lanjut. Rasio ketergantungan penduduk usia tua meningkat dari 5 tahun terakhir, yaitu 15,7 persen pada tahun 2017 menjadi 15,9 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harapan hidup rata-rata penduduk DIY. Sebaliknya, rasio ketergantungan penduduk usia muda semakin menurun selama 5 tahun terakhir, dari 30,4 persen pada tahun 2017 menjadi 29,2 persen pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi akibat penurunan rata-rata jumlah anak yang dipunyai oleh perempuan (Lembaga Demografi FEUI, 2010).

G. Struktur Keluarga

1. Kepala Keluarga

Terlihat pada Tabel 3.8 jumlah kepala keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 berjumlah 1.280.297. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 20.079 kepala keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, tampak bahwa Kabupaten Sleman memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak sebanyak 382.525 Kepala Keluarga, sedangkan Kota Yogyakarta memiliki jumlah kepala keluarga terendah sebanyak 142.871 Kepala Keluarga.

Pada tahun 2022, Kabupaten Sleman mencatat total 8.743 kepala keluarga baru, yang merupakan penambahan tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di DIY. Sementara itu, Kota Yogyakarta mencatat penambahan kepala keluarga terendah dengan hanya 963 kepala keluarga. Sehingga Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan pertumbuhan terbesar, sedangkan Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan terendah.

Tabel 3. 8.

Jumlah Kepala Keluarga Menurut di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penduduk		Laki-laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Kulon Progo	124.588	30.631	155.219
Bantul	270.212	67.801	338.013
Gunungkidul	219.137	42.532	261.669
Sleman	300.508	82.017	382.525
Kota Yogyakarta	104.393	38.478	142.871
DIY	1.018.838	261.459	1.280.297

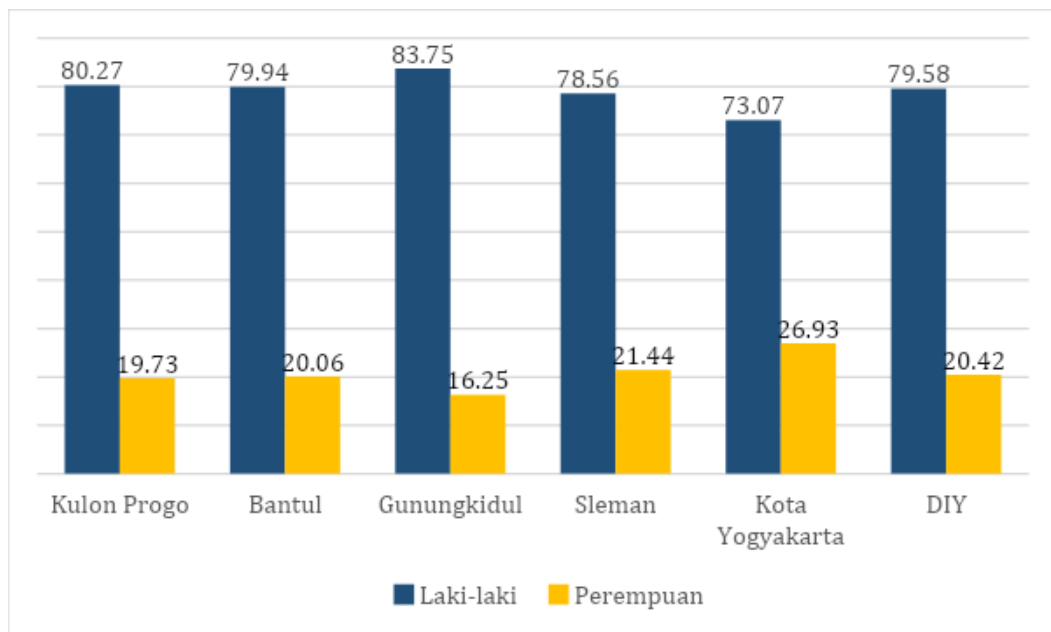
Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022

Kepala rumah tangga memiliki peran yang besar dalam perekonomian rumah tangga untuk mencari nafkah, tidak hanya untuk menghidupi diri sendiri namun juga masih bertanggung jawab dalam merawat anggota keluarga lain (Wattie, 2007). Kepala keluarga biasanya adalah laki-laki, tetapi dapat juga perempuan. Kepala keluarga memiliki tugas dan kewajiban untuk

memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Kepala keluarga juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban keluarga (Setiawan, 2017). Mayoritas kepala keluarga di DIY adalah laki-laki, meskipun persentasenya menurun dari tahun sebelumnya dari 79,8 di tahun 2021 menjadi 79,58. Hal ini sesuai dengan pernyataan Febriasih et al. (2008) menyatakan bahwa laki-laki dikonstruksikan sebagai kepala keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Namun, persentase kepala keluarga dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,2 persen mengalami peningkatan sebanyak 0,22 persen menjadi 20,42 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan sebagai kepala keluarga di wilayah tersebut. Penyebab peningkatan persentase perempuan sebagai kepala keluarga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan harapan hidup perempuan.



Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Jika harapan hidup perempuan meningkat, maka para perempuan memasuki usia tua dan menjadi kepala keluarga meningkat pula. Selain itu, adanya perubahan status perempuan menjadi janda juga ikut meningkatkan jumlah dan persentase kepala keluarga perempuan. Perceraian atau kematian suami dapat menyebabkan perempuan menjadi kepala keluarga (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020). Peningkatan persentase kepala keluarga perempuan ini menunjukkan perubahan sosial dalam struktur keluarga di DIY. Peran perempuan dalam keluarga semakin penting dan perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memimpin keluarga.

Fenomena kependudukan yang mengalami peningkatan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan perlu mendapatkan perhatian yang mendalam dikarenakan adanya kerentanan yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengingat kepala keluarga perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi seperti modal usaha, pembiayaan, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, kerentanan sosial juga harus diperhatikan mengingat adanya stereotip gender dan norma-norma sosial yang membatasi peran dan keberdayaan perempuan dalam masyarakat. Kepala keluarga perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap konflik dan penindasan dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan kabupaten/kota, persentase kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi pada tahun 2022 berada di Kota Yogyakarta sebanyak 26,93 persen dan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 16,25 persen. Pentingnya kebijakan terkait dampak peningkatan jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan terletak pada adanya kerentanan yang terjadi meskipun gaya hidup tersebut dianggap sebagai tren modern. Hal ini membutuhkan perhatian karena perubahan demografis ini

dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mengingat adanya perbedaan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat perlu diterapkan untuk mengatasi kerentanan yang terjadi, dengan mempertimbangkan konteks budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan dengan kepala keluarga menunjukkan bagaimana individu atau keluarga lainnya yang bertempat tinggal di suatu rumah dan memiliki peran masing-masing dalam suatu rumah tangga berhubungan dengan kepala keluarga. Status hubungan dengan kepala keluarga dalam sebuah profil kependudukan sangat penting untuk melihat struktur keluarga di wilayah yang dikaji. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangga yang akan diidentifikasi dibagi menjadi suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu dan lainnya sesuai dengan Lampiran Permendagri No. 65 Tahun 2010.

Informasi ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana sebagian besar kepala keluarga yang memiliki istri apakah dipimpin oleh kepala keluarga laki-laki atau dipimpin oleh perempuan. Hal ini dikarenakan peran wanita dalam masyarakat semakin berkembang. Di sisi lain tradisi dan norma keluarga masih berperan dalam menjaga struktur yang lebih konservatif.

Berdasarkan data dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa di DIY Tahun 2022 sebagian besar kepala keluarga laki-laki masih memiliki istri. Sebanyak 86,8 persen kepala keluarga laki-laki masih memiliki pasangan. Sedangkan untuk kepala keluarga perempuan hanya 0,1 persen yang masih memiliki pasangan. Ini menguatkan bahwa kepala keluarga perempuan di DIY 99,9 persen adalah janda, baik akibat dari perceraian ataupun suaminya meninggal dunia.

Selain itu, pola pengasuhan anak juga dapat dilihat dari informasi ini. Jika hanya ibu yang dominan dalam mengasuh anak, ini mungkin menunjukkan kecenderungan peran perempuan dalam rumah tangga. Namun, terlihat dari Tabel 3.9 jika terdapat bantuan dari orang tua, mertua, pembantu dalam pengasuhan anak, ini dapat mengindikasikan pola pengasuhan yang lebih kolaboratif atau adanya dukungan dalam keluarga.

Tabel 3. 9.
Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	
Suami	22	17	18	54	145	256
Istri	109.194	234.547	198.884	257.751	84.423	884.799
Anak	165.112	372.869	261.940	432.901	166.521	1.399.343
Menantu	261	199	5.710	557	457	7.184
Cucu	4.217	5.630	14.396	7.752	5.853	37.848
Orang Tua	3.706	2.754	10.819	2.485	717	20.481
Mertua	1.160	1.237	12.674	1.136	360	16.567
Famili Lain	4.275	8.191	7.298	10.068	10.581	40.413
Pembantu	16	4	7	40	32	99
Lainnya	409	784	1.831	2.686	837	6.547
Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki	124.588	270.212	219.137	300.508	104.393	1.018.838
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	30.631	67.801	42.532	82.017	38.478	261.459
Jumlah Penduduk	443.591	964.245	775.246	1.097.955	412.797	3.693.834

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

3. Status Perkawinan

Status perkawinan adalah status hukum yang menggambarkan keadaan seseorang dalam hubungan pernikahan. Status perkawinan penduduk berdasarkan klasifikasi dari BPS dibagi menjadi status perkawinan belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Berdasarkan definisi dari

BPS Status perkawinan "belum kawin" mencerminkan bahwa seseorang belum menikah atau belum memasuki ikatan pernikahan yang sah menurut hukum. Status perkawinan "kawin" mengindikasikan bahwa seseorang telah sah secara hukum dalam ikatan pernikahan. Badan Pusat Statistik menambahkan informasi bahwa status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Status perkawinan "cerai hidup" mengindikasikan bahwa pasangan suami dan istri telah melalui proses perceraian dan mereka secara hukum telah resmi bercerai. Dalam status ini, kedua belah pihak masih hidup, namun ikatan pernikahan antara mereka dinyatakan telah berakhir. Status perkawinan "cerai mati" menggambarkan bahwa salah satu pasangan dalam pernikahan telah meninggal dunia. Dalam status ini, ikatan pernikahan berakhir karena kematian. Pasangan yang masih hidup secara hukum dianggap sebagai janda atau duda.

Tabel 3.10.
Status Perkawinan Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kulon Progo	175.601	39,59	230.099	51,87	7.330	1,65	30.561	6,89	443.591
Bantul	391.964	40,65	497.685	51,61	14.553	1,51	60.043	6,23	964.245
Gunungkidul	275.063	35,48	428.197	55,23	16.327	2,11	55.659	7,18	775.246
Sleman	461.209	42,01	550.188	50,11	21.552	1,96	65.006	5,92	1.097.955
Kota Yogyakarta	188.034	45,55	191.372	46,36	9.385	2,27	24.006	5,82	412.797
DIY	1.483.748	40,42	1.912.278	52,09	58.912	1,60	216.251	5,89	3.671.189

Sumber: Kemendagri. hasil olah DKB semester II tahun 2022

Berdasarkan data dari Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di DIY tahun 2022 didominasi oleh mereka yang sudah menikah dengan persentase sebesar 51,37 persen. Namun, terdapat juga proporsi yang signifikan dari penduduk yang belum kawin sebanyak 40,39

persen. Sedangkan penduduk yang bercerai mati sebesar 6,37 persen dan yang bercerai hidup sebesar 1,87 persen.

Meskipun persentase cerai hidup relatif kecil, jumlahnya secara absolut cukup tinggi yaitu 69.147 kasus di DIY yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kasus perceraian di DIY sebanyak 5.338 kasus perceraian dari tahun sebelumnya. Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan jumlah kasus cerai hidup tertinggi sebanyak 21.552 kasus perceraian, sementara Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah kasus cerai hidup terendah sebanyak 7.330 kasus perceraian. Dalam hal ini, Kabupaten Sleman menjadi area yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki jumlah cerai hidup tertinggi.

Meskipun jumlah penduduk yang bercerai hidup masih relatif kecil, perlu diupayakan agar peningkatan jumlah kasus ini tidak meningkat dengan cepat. Peningkatan pilar pembangunan keluarga menjadi penting untuk mengurangi jumlah kasus cerai hidup yang semakin meningkat dan mendukung keberlangsungan keluarga yang bahagia dan harmonis di DIY. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang mendukung keberlanjutan perkawinan dan keluarga baik melalui penyuluhan, pendidikan, dan peran aktif pemerintah serta masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai keluarga dan menjaga keutuhan rumah tangga serta memberikan pelayanan dan dukungan yang memadai bagi pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahannya. Upaya pencegahan dan pemulihan juga perlu dilakukan melalui program-program sosial dan dukungan mental serta emosional bagi pasangan yang bercerai hidup. Diharapkan dengan meningkatkan pilar pembangunan keluarga, pertumbuhan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup di DIY dapat diperlambat.

Tabel 3.11.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Gender di
Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kota /Kabupaten	Belum Menikah		Menikah		Cerai Hidup		Cerai Mati		TOTAL	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kulon Progo	95.958	79.643	114.235	115.864	3.066	4.264	6.517	24.044	219.776	223.815
Bantul	212.801	179.163	246.821	250.864	6.200	8.353	13.920	46.123	479.742	484.503
Gunungkidul	153.485	121.578	212.897	215.300	6.729	9.598	10.631	45.028	383.742	391.504
Sleman	248.390	212.819	274.012	276.176	8.335	13.217	12.729	52.277	543.466	554.489
Kota Yogyakarta	99.732	88.302	93.418	97.954	3.741	5.644	4.307	19.699	201.198	211.599
Jumlah	810.366	681.505	941.383	956.158	28.071	41.076	48.104	187.171	1.827.924	1.865.910

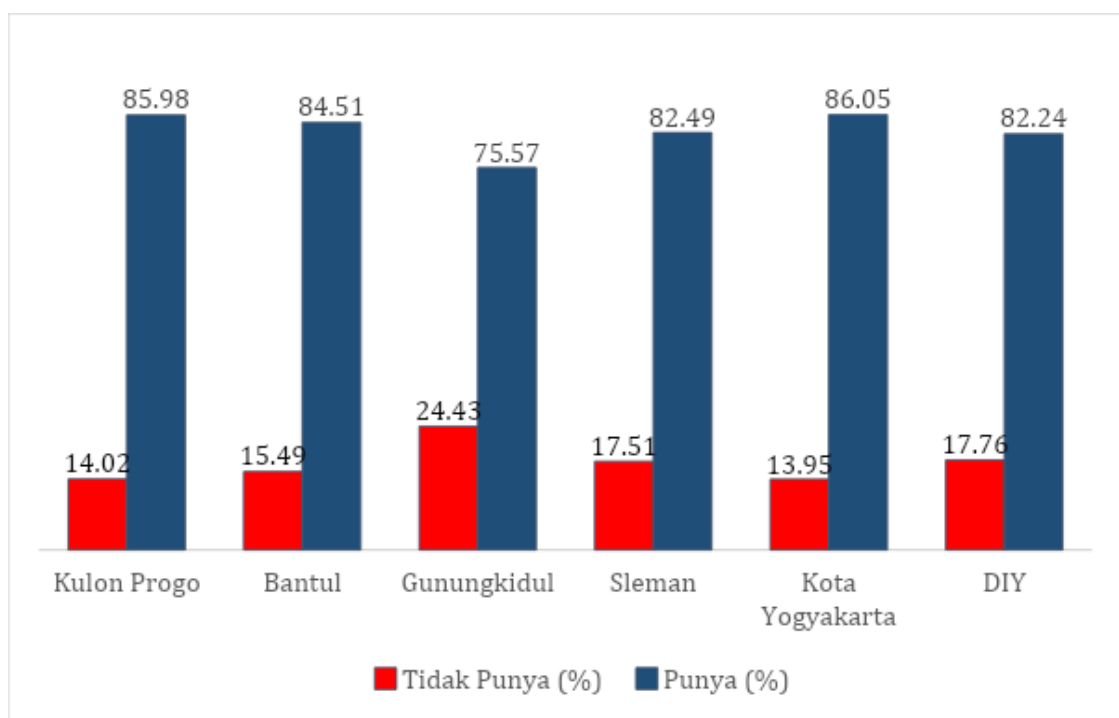
Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Berdasarkan gender, persentase penduduk laki-laki belum kawin lebih tinggi daripada penduduk perempuan di seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemungkinan adanya faktor-faktor seperti prioritas pendidikan atau karir yang membuat terjadinya penundaan pernikahan. Terlihat dari data pada Tabel 3.11 menunjukkan bahwa terjadi lebih banyak perceraian di kalangan penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki di DIY baik cerai hidup maupun cerai mati. Dua kondisi ini terjadi di semua kabupaten dan kota di DIY, yang menunjukkan bahwa tren ini umum di wilayah tersebut dan tidak terbatas pada satu daerah tertentu.

4. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah pengakuan negara akan sebuah pernikahan menurut agama dan kepercayaan yang berlangsung antara suami dan istri. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setelah seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan secara sah. Biro Tapem Setda DIY (2020) menjelaskan bahwa akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian formal dan material yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki peran penting dalam pembuktian legalitas dan kewajiban hukum dari ikatan perkawinan seseorang.

Berdasarkan data dari Gambar 3.4 menunjukkan kepemilikan akta perkawinan di DIY sebesar 82,24 persen yang mana capaian angka ini naik sebanyak 6,32 persen dari tahun lalu. Meskipun terdapat peningkatan dalam kepemilikan akta perkawinan di DIY, masih ada 17,76 persen pasangan yang belum memiliki akta perkawinan yang menunjukkan terdapat sekitar 1 pasangan tidak memiliki akta perkawinan dari 5 pasangan yang ada. Berdasarkan kabupaten/kota, capaian kepemilikan akta tertinggi berada di Kota Yogyakarta. Sedangkan yang terendah capaiannya berada di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.4 Persentase Kepemilikan Akta Pernikahan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Pentingnya kepemilikan akta perkawinan ini terletak pada keabsahan hukum status pernikahan serta perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta

perkawinan melalui sosialisasi serta mempermudah aksesibilitas dan proses administrasi dalam mendapatkan akta perkawinan. Dengan meningkatnya capaian kepemilikan akta perkawinan, diharapkan pasangan dapat lebih mudah mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Tabel 3.12
Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Tidak Punya		Punya		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kulon Progo	15.802	16.443	32.245	98.428	99.396	197.824
Bantul	32.819	44.282	77.101	213.983	206.528	420.511
Gunung Kidul	50.880	53.728	104.608	162.007	161.531	323.538
Sleman	46.342	49.980	96.322	227.643	226.150	453.793
Kota Yogyakarta	12.965	13.721	26.686	80.445	84.215	164.660
DIY	158.808	178.154	336.962	782.506	777.820	1.560.326

Sumber: Kemendagri. hasil olah DKB semester II tahun 2022

Berdasarkan gender, kepemilikan akta pernikahan didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 782.506 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan yang sudah menikah namun belum memiliki akta pernikahan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 178.154 perempuan. Permasalahan kepemilikan akta perkawinan ini, berdasarkan LKPJ Gubernur DIY 2020, terkait pada penduduk marjinal. Penduduk marjinal seringkali mengalami kendala dalam mendapatkan akses ke fasilitas penerbitan akta perkawinan, baik karena keterbatasan informasi, aksesibilitas maupun faktor ekonomi.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan. Pemerintah atau lembaga terkait dapat mengadakan program-program penyuluhan di wilayah-wilayah terpencil atau masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Program tersebut dapat melibatkan tenaga kesehatan, pengurus desa, atau tokoh masyarakat agar dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang prosedur penerbitan akta perkawinan.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas yang lebih mudah dan terjangkau bagi penduduk marginal untuk mendapatkan akta perkawinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek ekonomi dalam hal ini dikarenakan biaya penerbitan akta perkawinan yang saat ini masih relatif tinggi dapat menjadi kendala bagi penduduk marginal. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan subsidi atau pengurangan biaya penerbitan akta perkawinan bagi penduduk marginal. Hal ini dapat mempercepat dan mendorong penduduk marginal untuk mendapatkan akta perkawinan.

5. Struktur Agama Penduduk

Struktur agama penduduk mengacu kepada komposisi dan organisasi agama yang dianut oleh penduduk dalam suatu wilayah. Struktur agama penduduk dapat berubah seiring waktu karena perubahan demografi, migrasi, perubahan sikap dan keyakinan individu, serta pengaruh budaya atau globalisasi. Oleh karena itu, struktur agama penduduk merupakan konsep yang dinamis dan selalu berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dunia modern.

Struktur agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari data yang disebutkan, mayoritas penduduk DIY menganut agama Islam, yaitu sebanyak 92,94 persen. Kemudian, agama terbesar selanjutnya adalah Katolik diikuti oleh 4,45 persen penduduk, dan agama Kristen diikuti oleh 2,42 persen penduduk. Agama Islam menjadi mayoritas di DIY, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia umumnya juga memeluk agama Islam.

Sementara itu, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki jumlah pengikut yang lebih sedikit di DIY. Terlihat pada Tabel 3.13 bahwa agama Konghucu merupakan agama yang paling sedikit dianut di DIY sebanyak 65 pengikut atau 0,002 persen dari seluruh penduduk DIY. Struktur agama dalam jumlah pengikutnya hampir sama di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Tabel 3.13.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Agama	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
Islam	420.396	925.793	748.122	993.820	344.998	3.433.129
Kristen	5.643	12.681	12.780	32.525	25.779	89.408
Katholik	16.921	24.746	12.765	69.684	40.358	164.474
Hindu	25	785	968	1.151	467	3.396
Budha	591	195	369	713	1.139	3.007
Konghuchu	-	1	2	36	26	65
Aliran Kepercayaan	15	44	240	26	30	355
N	443.591	964.245	775.246	1.097.955	412.797	3.693.834

Sumber: Kemendagri. hasil olah DKB semester II tahun 2022

H. Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi DIY sebanyak 15.747 penduduk atau sekitar 0,43% dari populasi penduduk DIY.

Data yang terlihat pada Tabel 3.14 menjelaskan jumlah penyandang disabilitas di provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki. Penyandang disabilitas di DIY didominasi oleh penyandang disabilitas mental yang banyak terdapat di Kabupaten Bantul atau sebanyak 1.488 jiwa. Terdapat 8.582 orang penyandang disabilitas mental di provinsi DIY dengan 5.332 berjenis kelamin laki-laki dan 3.250 berjenis kelamin perempuan. Disabilitas mental merujuk pada kondisi kesehatan yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang, seperti gangguan kecerdasan, gangguan perkembangan, atau gangguan mental lainnya.

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas rungu di Provinsi DIY pada tahun 2022 sebanyak 2.255 jiwa. Disabilitas rungu merujuk pada kondisi ketidakmampuan atau keterbatasan pendengaran seseorang. Selanjutnya terdapat 2.054 orang penyandang disabilitas fisik di provinsi DIY. Disabilitas fisik merujuk pada kondisi ketidakmampuan atau keterbatasan pada kemampuan fisik seseorang, seperti kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh, atau gangguan mobilitas. Kemudian terdapat 1.078 penduduk penyandang disabilitas lainnya, 1.061 penduduk penyandang disabilitas netra dan terdapat 717 orang penyandang disabilitas fisik dan mental di provinsi DIY.

Tabel 3.14.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Penyandang Disabilitas	Kabupaten/Kota				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
DISABILITAS FISIK L	157	266	245	288	173
DISABILITAS FISIK P	138	194	195	235	163
DISABILITAS NETRA/BUTA L	81	123	112	149	90
DISABILITAS NETRA/BUTA P	56	119	115	140	76
DISABILITAS RUNGU/WICARA L	152	311	241	318	175
DISABILITAS RUNGU/WICARA P	131	265	210	285	167
DISABILITAS MENTAL/JIWA L	720	1488	1168	1230	726
DISABILITAS MENTAL/JIWA P	451	854	733	792	420
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL L	48	79	94	115	49
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL P	42	76	69	112	33
DISABILITAS LAINNYA L	54	129	49	161	183
DISABILITAS LAINNYA P	47	134	42	121	158

Sumber: Kemendagri. Hasil Olah DKB Semester II Tahun 2022

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami diskriminasi dan hambatan dalam mengakses berbagai hak dan kesempatan. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, dan pemberian insentif bagi lembaga yang memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.

Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat mengakses hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih adanya diskriminasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang disabilitas, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas.

BAB IV

KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDUDUK DATANG DAN PERGI

A. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang penting karena merupakan dokumen yang berisi pengakuan dan perlindungan negara berupa identitas awal bagi penduduk. Dalam SDGs capaian akta kelahiran menjadi salah satu indikator keberhasilan sehingga ditargetkan pada 2030 semua penduduk sudah memiliki dokumen akta kelahiran ini. Meskipun demikian beberapa kendala terjadi sehingga cakupan akta kelahiran belum bisa optimal seperti tidak tahu cara mengurus akta kelahiran, tidak tahu jika akta kelahiran penting, jarak lokasi pengurusan yang jauh, dan lainnya (Alfana, Wahyudi dan Aulia, 2018). Oleh karenanya kendala ini harus dieliminasi agar capaian kepemilikan akta kelahiran dapat terealisasi sesuai target dari SDGs di 2030.

Kondisi kepemilikan akta kelahiran di DIY menunjukkan perbaikan pada 2022 jika dibandingkan capaian sebelumnya. Hal ini diketahui dari naiknya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran menjadi 2.240.733 jiwa (Tabel 4.1). Jika dihitung pertambahannya dalam satu tahun ada penambahan sebanyak 71.406 akta kelahiran.

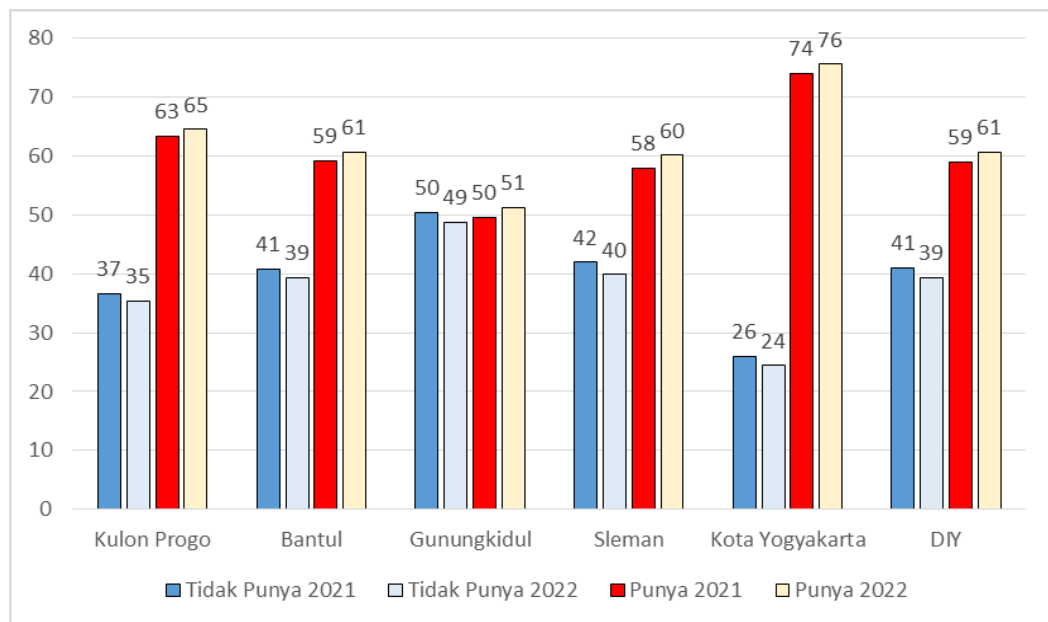
Tabel 4.1

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021			2022		
	Tidak Punya	Punya	Total	Tidak Punya	Punya	Total
Kulon Progo	162.197	280.677	442.874	157.213	286.378	443.591
Bantul	390.453	566.060	956.513	379.412	584.833	964.245
Gunungkidul	390.881	383.560	774.441	378.166	397.080	775.246
Sleman	456.860	631.249	1.088.109	437.591	660.364	1.097.955
Kota Yogyakarta	107.728	307.781	415.509	100.719	312.078	412.797
DIY	1.508.119	2.169.327	3.677.446	1.453.101	2.240.733	3.693.834

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022

Secara relatif, kepemilikan akta kelahiran di DIY meningkat menjadi 61 persen dari total penduduk (Gambar 4.1). Pertumbuhannya jika dihitung antara 2021 ke 2022 sebesar 2,83 persen. Jika pertumbuhan ini terus terjadi, sampai 2030 nilainya sekitar 75 persen. Artinya jika dengan pertumbuhan yang konstan seperti pada 2021-2022, target SDGs 2030 yakni seluruh penduduk memiliki akta kelahiran tidak akan tercapai. Oleh karenanya melihat capaian dua tahun ini disimpulkan bahwa perlu ada langkah percepatan agar kepemilikan akta kelahiran di DIY dapat sesuai target SDGs.



Gambar 4.1 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022

(Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2021 dan 2022)

Berdasarkan kabupaten/kota, capaian tertinggi kepemilikan akta kelahiran ada di Kota Yogyakarta dengan nilai 76 persen. Artinya bahwa dari setiap 100 penduduk kota ada 76 yang sudah memiliki akta kelahiran. Sedangkan sisanya sebanyak 24 belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan capaian terendah ada di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan golongan usia, diketahui bahwa capaian kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun sangat baik. Hal ini dilihat dari nilai persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun sebesar 98,92 persen (Tabel 4.2). Artinya dari 100 penduduk di DIY usia 0-17 tahun, hanya tinggal 1-2 orang yang tidak memiliki akta kelahiran. Tingginya kesadaran orang tua agar anaknya memiliki akta kelahiran menjadi faktor utama tingginya capaian kepemilikan akta kelahiran pada kelompok usia 0-17 tahun ini. Hal ini tercermin dari tingginya persentase kepemilikan akta kelahiran usia dini 0-4 tahun yang nilainya hampir 100 persen. Selain itu, pengurusan yang mudah yang difasilitasi pemerintah juga menjadi faktor penentu kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun begitu tinggi.

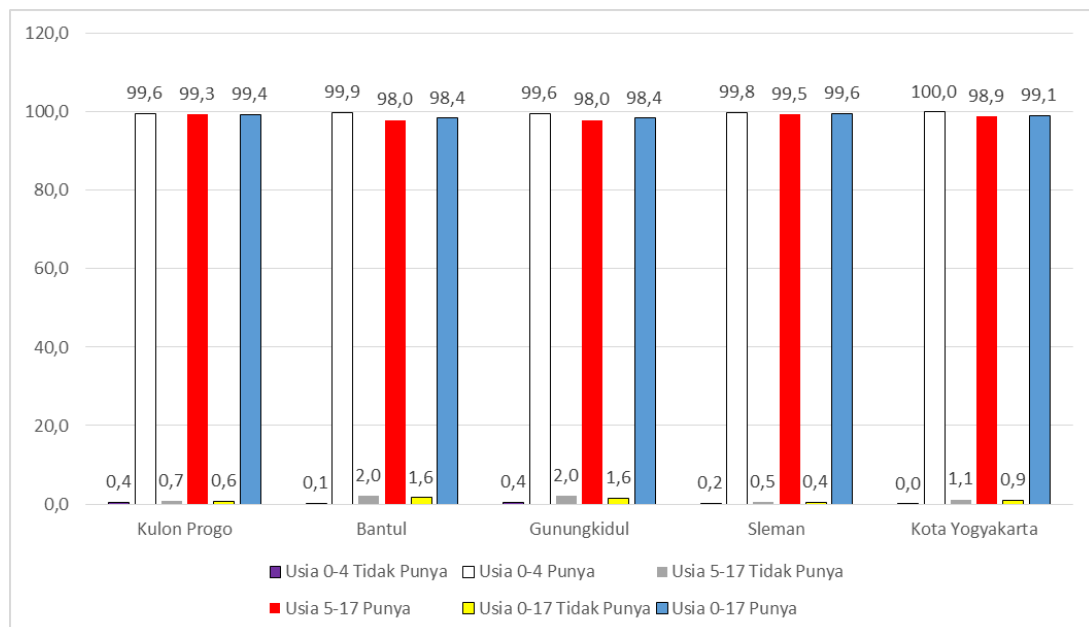
Tabel 4.2
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-4, 5-17, dan 0-17
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Golongan Usia	Kepemilikan	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY	Capaian DIY (%)
Usia 0-4 Tahunan	Tidak Punya	97	49	154	143	6	449	0,20
	Punya	25544	59585	43040	67013	24030	219212	99,80
	Total	25641	59634	43194	67156	24036	219661	100,00
Usia 5-17 Tahunan	Tidak Punya	485	4175	2429	821	857	8767	1,39
	Punya	70244	199596	118043	160520	75090	623493	98,61
	Total	70729	203771	120472	161341	75947	632260	100,00
Usia 0-17 Tahunan	Tidak Punya	582	4224	2583	964	863	9216	1,08
	Punya	95788	259181	161083	227533	99120	842705	98,92
	Total	96370	263405	163666	228497	99983	851921	100,00

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022

Tabel 4.2 sekaligus memberikan informasi penting bahwa program pemercepatan kepemilikan akta kelahiran diprioritaskan pada penduduk dengan kelompok umur 17 tahun ke atas. Temuan ini sama dengan temuan di tahun sebelumnya (Biro Tapem Setda DIY, 2022), sehingga perlu ditindak lanjuti ke depannya. Belum ada data rincian mengenai kelompok umur mana yang memiliki sumbangan terbesar dalam belum dimilikinya akta kelahiran di DIY. Dalam laporan ini sekaligus memberikan saran ke depan bahwa untuk profil perkembangan kependudukan pada 2024 isu khusus yang perlu dibahas adalah mengenai kepemilikan akta kelahiran.

Pada kelompok umur 0-17 tahun, kepemilikan akta kelahiran tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan pada usia awal 0-4 tahun, capaian tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan capaian sebesar 100 persen. Artinya seluruh penduduk di Kota Yogyakarta usia 0-4 tahun memiliki akta kelahiran. Capaian ini tentu perlu dicontoh oleh kabupaten lain di DIY agar kepemilikan akta kelahiran pada usia dini 0-4 tahun dapat 100 persen seluruhnya.



Gambar 4.2 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Golongan Usia di Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

B. ASFR (Age Spesific Fertility Rates) dan TFR (Total Fertility Rates)

Data kelahiran yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk membuat indikator fertilitas yang biasa digunakan untuk perencanaan pembangunan. Data kelahiran dapat digunakan untuk menghitung ASFR dan TFR. Indikator ASFR⁷ didefinisikan sebagai jumlah kelahiran tahunan untuk perempuan pada kelompok usia-usia tertentu per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut. Nilai ASFR diperoleh dengan menghitung jumlah kelahiran hidup pada perempuan pada kelompok umur tertentu dibagi jumlah semua perempuan pada kelompok umur yang sama pada periode waktu tertentu yang sama pula. Sedangkan TFR didefinisikan sebagai rata-rata anak yang dilahirkan perempuan selama masa usia suburnya⁸. Nilai TFR dihitung sebagai jumlah tingkat kesuburan menurut umur (ASFR) pada setiap kelompok umur, dibagi 1.000.

Nilai ASFR DIY diperoleh dengan menggunakan perhitungan langsung. Hal ini dapat dilakukan karena data kelahiran tersedia. Pola ASFR di DIY membentuk pola huruf U terbalik dengan puncak berada pada usia 25-29 tahun. Nilai ASFR usia 25-29 tahun DIY pada 2022 sebesar 136,53. Artinya terdapat 136-137 kelahiran oleh perempuan usia 1000 perempuan usia 25-29 tahun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 93,33.

Berdasarkan nilai ASFR yang ada di usia 10-14 tahun di DIY mengindikasikan bahwa terjadi kelahiran pada kelompok usia ini. Artinya ada perempuan usia sekitar SMP yang melahirkan anaknya. Berdasarkan jumlah absolutnya tercatat ada 8 kelahiran di DIY yang tersebar di 4 kabupaten di DIY. Di sisi lain terdapat perempuan di DIY yang melahirkan saat umurnya berada di usia lebih dari 49 tahun. Tercatat di DIY ada 17 kelahiran dari perempuan yang berusia 50-54 tahun (Lihat Tabel 4.3).

7

<https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/wfd2012/Metadata/ASFR-TF-MAC.pdf>

Tabel 4.3

Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup dan ASFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Golongan Usia	Kulon Progo			Bantul			Gunungkidul			Sleman			Kota Yogyakarta			DIY		
	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Wanita	Bayi Lahir Hidup	ASFR
10-14	15591	2	0,13	35562	3	0,08	25189	1	0,04	41476	2	0,05	15488	0	0,00	133306	8	0,06
15-19	15236	84	5,51	32804	189	5,76	24435	222	9,09	36888	235	6,37	15639	102	6,52	125002	832	6,66
20-24	15642	1111	71,03	33156	2213	66,75	26043	2559	98,26	38865	2090	53,78	15452	643	41,61	129158	8616	66,71
25-29	15474	2233	144,31	34079	4895	143,64	26143	3278	125,39	39083	5478	140,16	15109	1850	122,44	129888	17734	136,53
30-34	14122	1480	104,80	33837	3610	106,69	24192	2211	91,39	37816	4037	106,75	14402	1501	104,22	124369	12839	103,23
35-39	14918	789	52,89	35600	1855	52,11	24525	1162	47,38	40204	2281	56,74	15270	831	54,42	130517	6918	53,01
40-44	16083	225	13,99	37520	512	13,65	27314	384	14,06	44369	716	16,14	16596	247	14,88	141882	2084	14,69
45-49	15196	16	1,05	34401	40	1,16	26685	35	1,31	41614	48	1,15	15320	15	0,98	133216	154	1,16
50-54	15753	0	0,00	34857	2	0,06	29596	4	0,14	40829	5	0,12	15421	6	0,39	136456	17	0,13
55-59	15307	0	0,00	31721	0	0,00	26425	0	0,00	35045	0	0,00	14175	0	0,00	122673	0	0,00
60-64	13586	0	0,00	27904	0	0,00	24367	0	0,00	29975	0	0,00	12039	0	0,00	107871	0	0,00

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022 dan Data SIAK Kab/Kota se-DIY tahun 2022

Pola ASFR di seluruh kabupaten dan kota di DIY sama dengan pola umum yaitu pola U terbalik, dimana memiliki nilai tertinggi pada usia 25-29. Pada usia 10-14 tahun ditemukan kelahiran di 4 kabupaten di DIY. Temuan ini sama dengan temuan di tahun sebelumnya. Perbedaannya, pada 2022 Kota Yogyakarta yang tidak memiliki kasus kelahiran pada perempuan usia 10-14 tahun. Sedangkan di tahun 2021, hanya Kabupaten Kulon Progo yang tidak memiliki kasus kelahiran hidup dari perempuan yang berusia 10-14 tahun. Di tahun 2022 kasus tertinggi untuk kelahiran pada perempuan usia 10-14 tahun ada di Kabupaten Bantul.

Pemanfaatan data kelahiran dapat digunakan untuk menghitung nilai TFR. Nilai TFR diperoleh dengan menghitung hasil dari ASFR yang tersedia. Nilai TFR di DIY pada 2022 adalah sebesar 1,91 (Tabel 4.4). Nilai ini lebih besar dibandingkan nilai TFR pada 2021 dimana nilainya hanya sebesar 1,5. Nilai TFR 1,9 memiliki arti bahwa rata-rata anak yang dimiliki perempuan usia subur di DIY pada 2022 adalah sebanyak 2 anak. Dari sisi kependudukan peningkatan ini bagus karena kenaikan ini jika dapat dikondisikan menjadi 2,1 menunjukkan kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Berdasarkan kabupaten/kota, nilai TFR tertinggi disumbang oleh Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan nilai 1,73.

Tabel 4.4
Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup, ASFR dan TFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	ASFR (Per1000)	TFR=5 x ASR/1000
Kulon Progo	166.908	5.966	393,71	1,97
Bantul	371.441	13.405	389,89	1,95
Gunungkidul	284.914	9.908	387,05	1,94
Sleman	426.164	14.908	381,26	1,91
Kota Yogyakarta	164.911	5.229	345,47	1,73
DIY	1.414.338	49.416	382,16	1,91

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022

Kenaikan nilai TFR pada 2022 di DIY ini menarik untuk dibahas. Meringkas dari apa yang telah tertulis di pembahasan isu khusus di publikasi Biro Tapem DIY (2021) bahwa pandemi diduga akan membawa pengaruh dalam kondisi fertilitas di DIY. Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa pandemi diduga akan memberikan efek bagi fertilitas di DIY. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan kondisi tersebut.

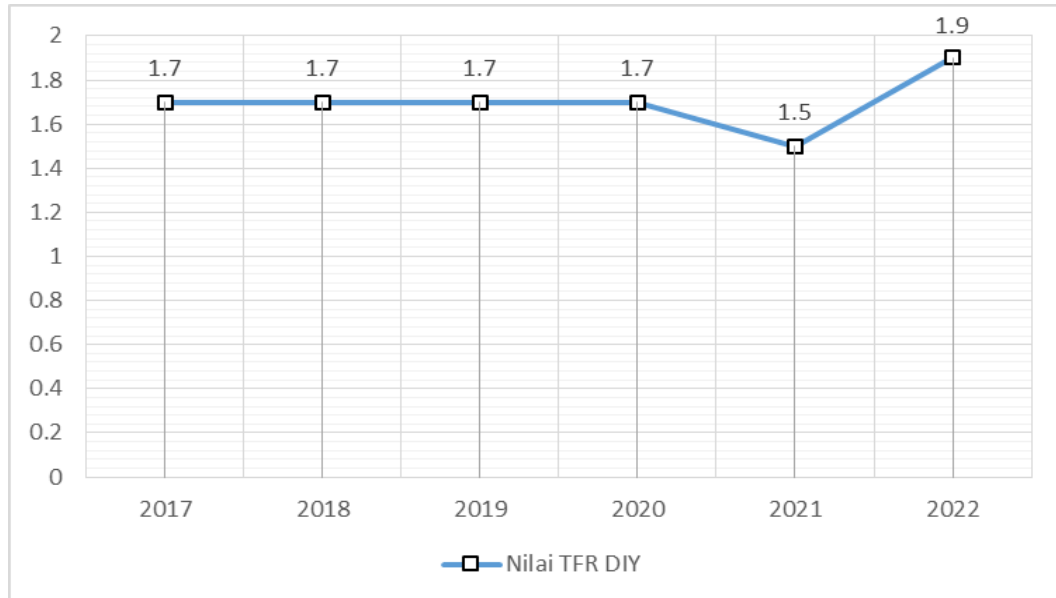
Pandemi Covid-19 memiliki dua sisi yang berbeda jika dikaitkan dengan fertilitasnya. Satu sisi Covid-19 diduga menyebabkan fertilitas menjadi naik (Anser et al., 2020; Azanella, 2020;). Tetapi di sisi lain, Covid-19 juga berpotensi kuat untuk menurunkan fertilitas (Luppi, Arpino and Rosina, 2020; Wilde, Chen and Lohmann, 2020; Berrington et al., 2021; Cohen, 2021).

Di DIY pandemi juga diduga memengaruhi fertilitas. Dilihat pada Gambar 4.3, diketahui bahwa pada 2020 dimana pandemi baru berjalan hampir 1 tahun nilai TFR belum terpengaruh. Saat itu nilainya sama dengan rata-rata capaian tiga tahun sebelumnya dimana kondisi masih normal, yaitu TFR di angka 1,7.

Pada tahun 2021 dampak pandemi mulai terasa yang dibuktikan dengan jumlah lahir hidup yang menurun drastis. Tingginya kecemasan membuat banyak pasangan diduga takut untuk memiliki anak pada 2020 sehingga kelahiran pada 2021 nilainya turun secara drastis. Saat itu nilai TFR sebesar 1,5, nilai yang turun dari kondisi stabil yang “normal” di empat tahun yang lalu. Kemudian saat kondisi pandemi telah terkendali terjadi *rebound* dengan kelahiran mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Akibatnya jika dihitung nilai TFR nya, nilainya di atas kondisi sebelum pandemi terjadi. Pada 2022 nilai TFR tercatat sebesar 1,91.

Berdasarkan kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa diduga kuat kondisi pandemi memengaruhi fertilitas di DIY. Hal itu dibuktikan dengan naik turunnya jumlah kelahiran hidup di DIY. Dilihat dari nilai TFR, pola

fertilitas yang terjadi adalah mengalami penurunan pada 2021 dan kemudian naik kembali di tahun 2022.



Gambar 4.3 Nilai TFR DIY 2017-2022

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2017-2022

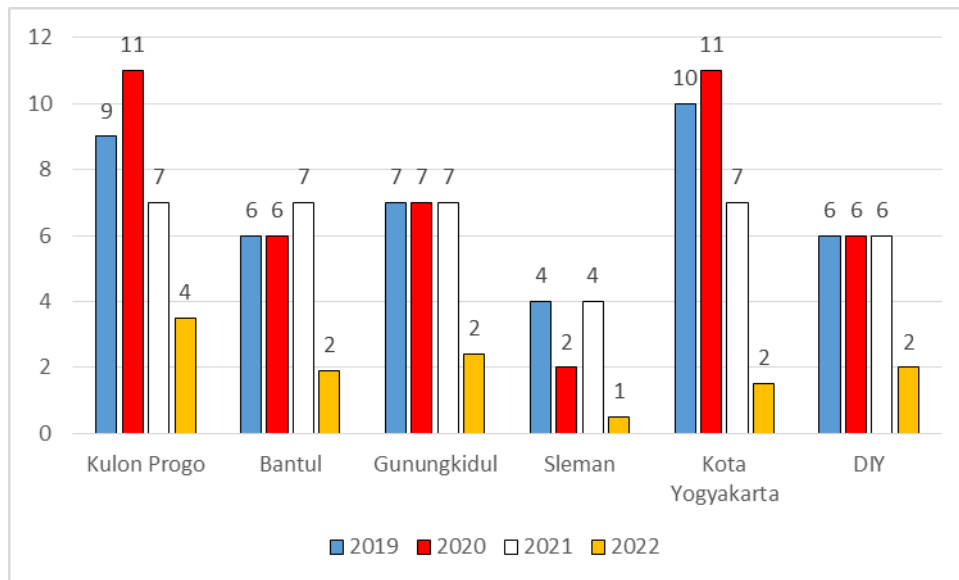
C. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi akan merupakan salah satu indikator mortalitas yang dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan bayi baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Semakin rendah nilainya maka diasosiasikan semakin baik derajat kesehatannya.

Angka kematian bayi dihitung dengan membagi jumlah kematian di antara bayi di bawah usia satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama²³ (Swanson and Siegel, 2004; Lundquist, Anderton, and Yaukey, 2015). Menggunakan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2022, angka kematian di DIY tercatat sebesar 2 dari 1.000 kelahiran hirup. Pencapaian ini menjadi yang terbaik dalam periode lima tahun terakhir. Tren penurunan

²³ https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind&Istilah_page=4

yang terjadi di tahun ini terlihat jelas dari data yang tersaji pada Gambar 4.4. Sejak 2019 sampai 2021 angka kematian di DIY sebesar 6 dari 1.000 kelahiran hidup, kemudian menjadi 2 pada 2022.



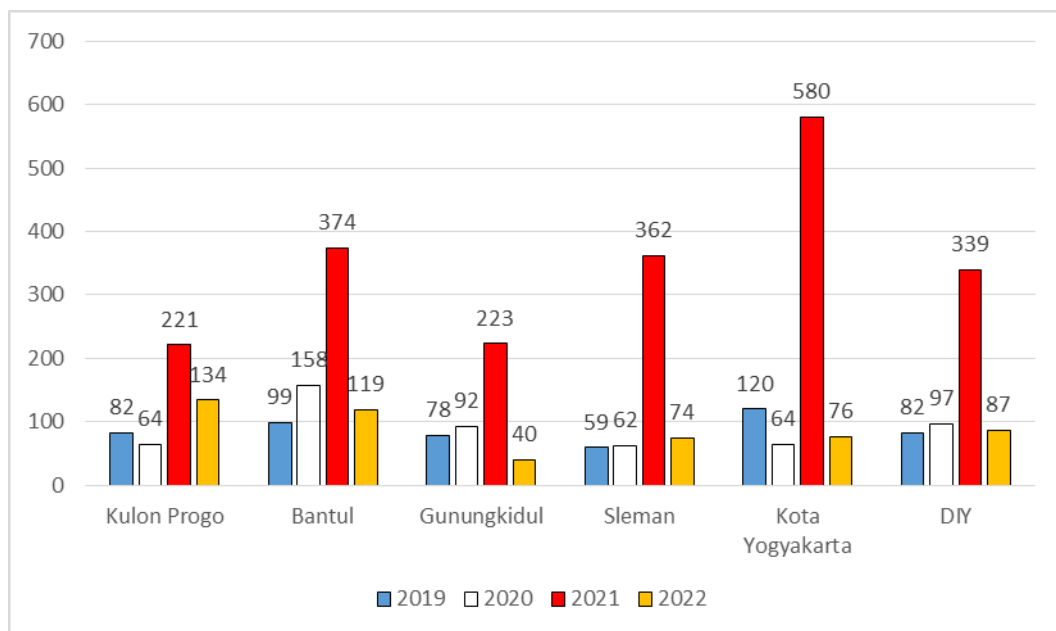
Gambar 4.4 Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2022

Berdasarkan Gambar 4.3, capaian terbaik untuk angka kematian bayi di DIY ada di Kabupaten Sleman dengan nilai 1 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan capaian dengan nilai angka kematian bayi tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo (4 per 1.000 kelahiran hidup). Pola penurunan di semua kabupaten dan kota ini dibanding tahun sebelumnya dikarenakan sudah tertanganinya pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab yang tinggi dari kejadian kematian bayi di DIY. Pada 2022, menurut data dari Dinkes DIY (2023) penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY saat ini sudah mengikuti pola umum seperti sebelum pandemi. Penyebab umum kematian bayi di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

D. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu di DIY mengalami pola penurunan pada 2022 jika dibandingkan nilai di tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 4.5, terjadi penurunan yang sangat tajam dari 2021 ke 2022. Pada 2021 angka kematian ibu dilaporkan banyak terjadi karena adanya pengaruh pandemi. Oleh karenanya angka kematian ibu di tahun 2021 sangat tinggi. Sedangkan pada 2022 pandemi telah mampu dikendalikan dan peningkatan layanan terus ditingkatkan sehingga pola secara umum kembali seperti saat sebelum pandemi.



Gambar 4.5 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2022

Dinas Kesehatan DIY menjelaskan tentang tren kematian ibu di DIY. Dalam laporan profil kesehatan DIY 2023 dijelaskan bahwa:

“Pada tahun 2015 penurunan jumlah kematian ibu sangat signifikan hingga menjadi sebesar 29 kasus. Namun pada tahun 2016 kembali naik tajam menjadi 39 kasus dan kembali sedikit turun menjadi 34 pada tahun 2017, tahun 2018 naik lagi menjadi 36 di tahun 2019 kasus kematian ibu hamil di

angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 kembali naik sebesar 40 kasus. Pada tahun 2021 kasus kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 131 kasus. Dari 131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Setelah melewati pandemi Covid-19 tahun 2022 ini kasus kematian ibu kembali menurun menjadi 43 kasus. Penyebab kematian tertinggi adalah karena perdarahan dan infeksi dengan jumlah kematian masing-masing 10 orang. Penyebab lain yang menyumbang kematian tertinggi adalah Kelainan Jantung Dan Pembuluh Darah dengan jumlah kematian sebanyak 9 orang dan Hipertensi dengan jumlah kematian sebanyak 7 orang. Ada 2 kematian ibu yang disebabkan karena Gangguan Autoimun dan 1 kematian ibu karena Gangguan Cerebrovaskular. Penyebab kematian ibu lainnya yang tidak spesifik sebanyak 4 orang”.

Penjelasan dari publikasi Dinas Kesehatan D. I. Yogyakarta (2023) tersebut dikuatkan data pendukung yang terdapat di Tabel 4.5. Kasus penyebab kematian ibu di DIY yang tahun lalu didominasi karena Covid-19, sebesar 61 persen tidak terjadi lagi di DIY. Oleh karenanya nilainya menjadi berkurang drastis dari kasus di 2021 ke 2022. Sementara pada 2022 penyebab kematian ibu didominasi oleh pendarahan dan infeksi dengan persentase keduanya mencapai 46,5 persen dari total penyebab lainnya.

Tabel 4.5

Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penyebab Kematian Ibu								
	Perdarahan	Gangguan Hipertensi	Infeksi	Kelainan Jantung Dan Pembuluh Darah*	Gangguan Autoimun**	Gangguan Cerebro vaskular***	Covid-19	Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus)	Lain-Lain
Kulon Progo	0	2	1	1	0	0	0	0	4
Bantul	4	2	6	2	1	1	0	0	0
Gunungkidul	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Sleman	4	2	3	1	1	0	0	0	0
Kota Yogyakarta	1	0	0	3	0	0	0	0	0
Diy	10	7	10	9	2	1	0	0	4

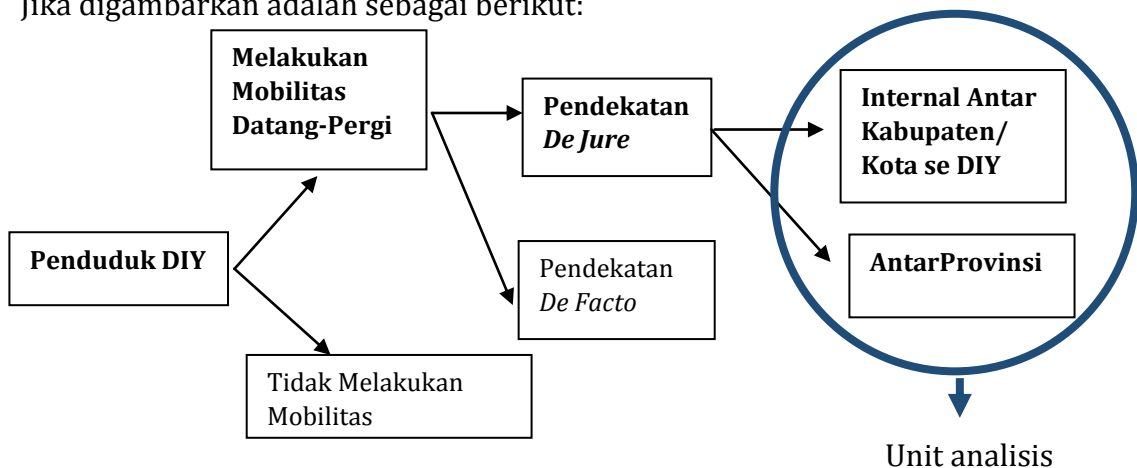
Sumber:Dinkes DIY pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2022

E. Penduduk Datang dan Pergi

Pembahasan penduduk datang dan pergi dalam bahasan ini memiliki definisi yang spesifik mengikuti batasan operasional yang disebutkan dalam Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2020). Batasan tersebut antara lain:

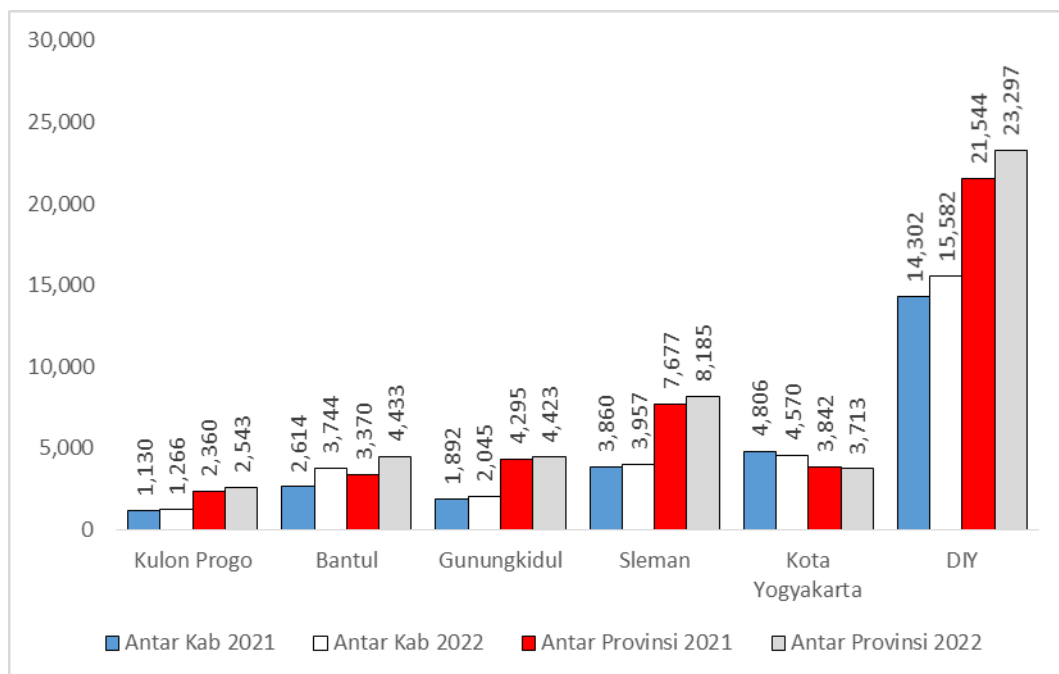
- Pendataan terkait penduduk datang dan pergi atau pindah yaitu penduduk yang telah melapor dan dicatat di kelurahan/desa dan kecamatan. Dicatat datang adalah penduduk yang memperoleh kartu keluarga di tiap kabupaten/kota. Dicatat pindah adalah penduduk yang menyerahkan kartu keluarga karena berdomisili di luar kabupaten/kota. Jadi, bukan definisi migrasi dalam artian pindah menurut batasan waktu dan jarak tertentu atau datang dan pindah dengan maksud untuk menetap di suatu daerah seperti yang lazim digunakan dalam studi migrasi.
- Pencatatan penduduk datang dan pindah ini bisa dikatakan lebih mengarah ke pendekatan *de jure* daripada *de facto*. Pendataan yang dilakukan dibagi menjadi 4 yaitu penduduk datang antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, penduduk datang antar provinsi, penduduk pergi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, dan penduduk pergi antar provinsi.

Jika digambarkan adalah sebagai berikut:



*Gambar disalin dari publikasi Bito Tapem DIY (2021)

Gambaran penduduk pergi di DIY dibedakan menjadi penduduk yang pergi antarkabupaten/kota dan pergi antarprovinsi bervariasi, dengan melihat perubahannya dalam dua tahun terakhir. Secara umum, gerak penduduk yang pergi antarprovinsi pada 2022 menunjukkan penambahan jika dibandingkan tahun 2021. Pola ini terjadi di empat kabupaten di DIY. Sedangkan di Kota Yogyakarta nilainya mengalami penurunan jika dilihat polanya dalam dua tahun terakhir (Gambar 4.6.). Yang perlu dicatat adalah dari data di tahun sebelumnya, kenaikan penduduk yang pergi antarprovinsi ini terjadi pascapandemi.

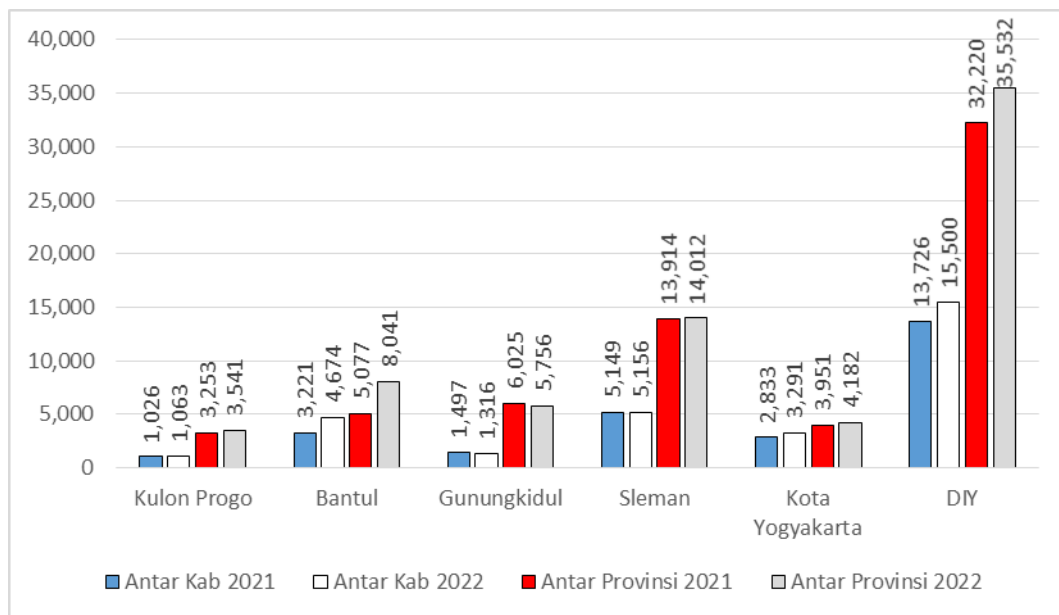


Gambar 4.6 Penduduk Pergi AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2021-2022

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, hasil olahan data SIAK semester II tahun 2021-2022

Berdasarkan Gambar 4.6., Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan jumlah penduduk pergi terbanyak baik antarkabupaten/kota ataupun antarprovinsi. Sementara penduduk yang paling sedikit melakukan perpindahan untuk pergi, baik antarkabupaten/kota ataupun antarprovinsi, adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pada penduduk datang, Gambar 4.7. menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penduduk yang datang antarprovinsi di semua kabupaten/kota di DIY, kecuali Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan pada penduduk datang antarkabupaten/kota terjadi kenaikan jumlah penduduk yang datang, kecuali Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 4.7 Penduduk Datang AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2021-2022

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, hasil olahan data SIAK semester II tahun 2021-2022

BAB V

PENDIDIKAN

A. Struktur Pendidikan Terakhir Penduduk

Pendidikan terakhir penduduk merupakan parameter kependudukan yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah dalam skala temporal (Heriawan, 2018). Pendidikan merupakan investasi penting yang dapat mempengaruhi pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Mantra, 2008; Tukiran, 2010). Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Human Development Report 2020, indeks pembangunan manusia adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di suatu negara yang mana pendidikan merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam perhitungannya karena pendidikan dapat meningkatkan ketiga indikator lainnya yakni dimensi ekonomi dan kesehatan. Menurut Mondal dan Shitan (2014) pendidikan secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan harapan hidup saat lahir karena pendidikan dapat meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan gizi.

Pendidikan terakhir yang ditempuh penduduk dibagi menjadi sepuluh klasifikasi level jenjang pendidikan formal terakhir ditamatkan, yaitu belum sekolah, belum tamat SD/MI, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, Akademi/DIII/S.Muda, Diploma IV/Strata I, Strata II, Strata III.

Untuk melihat struktur pendidikan ini, digunakan indikator pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk DIY. Indikator ini diketahui melalui sertifikat atau ijazah yang dimiliki. Semakin besar persentase penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan tertinggi, semakin tinggi kualitas pendidikan penduduk.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Terakhir
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

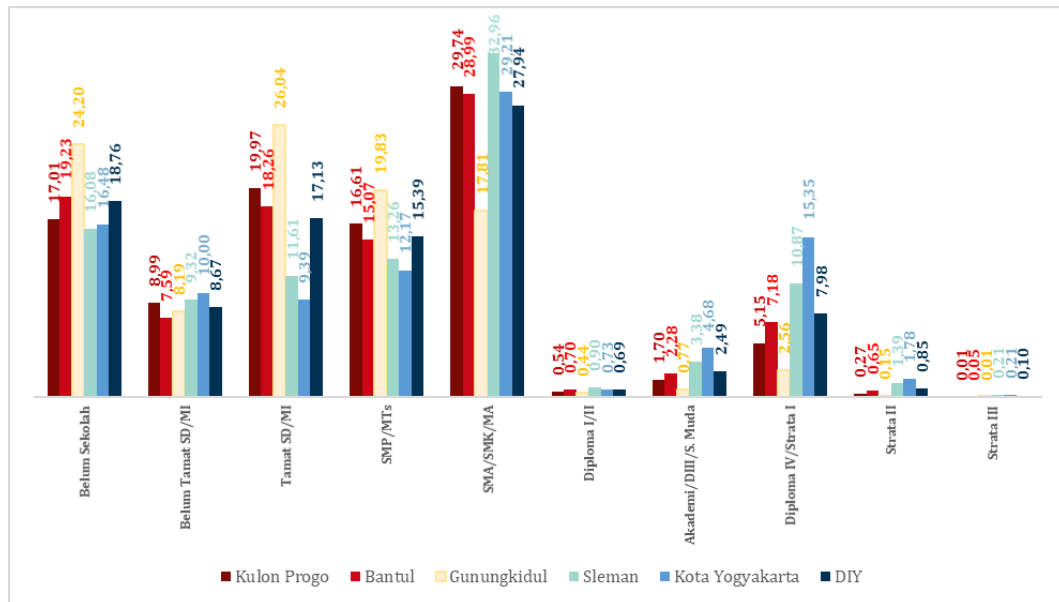
Jenjang Pendidikan	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
Belum Sekolah	75.477	185.462	187.604	176.529	68.045	693.117
Belum Tamat SD/MI	39.867	73.182	63.471	102.379	41.300	320.199
Tamat SD/MI	88.575	176.077	201.890	127.476	38.769	632.787
SMP/MTs	73.688	145.285	153.694	145.609	50.220	568.496
SMA/SMK/MA	131.934	279.556	138.081	361.940	120.563	1.032.074
Diploma I/II	2.405	6.704	3.428	9.886	3.014	25.437
Akademi/DIII/S. Muda	7.519	21.971	5.986	37.108	19.328	91.912
Diploma IV/Strata I	22.864	69.231	19.811	119.378	63.346	294.630
Strata II	1.210	6.276	1.197	15.297	7.346	31.326
Strata III	52	501	84	2.353	866	3.856
Jumlah	443.591	964.245	775.246	1.097.955	412.797	3.693.834

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022

Data mengenai penduduk menurut pendidikan terakhir menyiratkan kualitas penduduk di DIY. Dilihat dari jenjang pendidikan, Provinsi DIY pada tahun 2022 didominasi oleh jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 1.032.074 penduduk. Mayoritas penduduk berada pada jenjang pendidikan menengah atas merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul yang dominan berada pada jenjang tamat SD/MI sebanyak 201.890.

Tingkat pendidikan di DIY dapat dikategorikan baik, karena pendidikan penduduknya memiliki struktur yang menunjukkan dominasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan dasar. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat berarti adanya akses yang memadai terhadap pendidikan dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di DIY. Hal ini bisa berdampak positif terhadap pembangunan dan perkembangan masyarakat DIY, serta potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 5.1 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi DIY mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terlihat pada Gambar 5.1, persentase penduduk dengan pendidikan terakhir SMA sebesar 40,05 persen pada tahun 2022 yang mana nilai ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sebesar 39,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DIY.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY. Pada tahun 2022, lebih dari separuh penduduk di Kota Yogyakarta atau mencapai 52 persen penduduknya memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA/ sederajat ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan

upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul tingkat pendidikannya masih rendah yang ditunjukkan dari persentase tertinggi pada jenjang pendidikan SMP ke bawah, dengan persentase sebesar 78,25 persen. Mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki pendidikan terakhir jenjang SD kebawah sebanyak 58,43 persen atau lebih dari separuh penduduknya.

B. Struktur Pendidikan Penduduk Menurut Gender

Konsep struktur pendidikan menurut gender adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan. Sistem pendidikan yang responsif gender juga memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat kesenjangan gender dalam pendidikan, dan untuk mengembangkan kebijakan yang dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang responsif gender dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan data pada Gambar 5.2, pola struktur pendidikan penduduk di DIY menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki pada hampir seluruh jenjang pendidikan. Meskipun pola ini tidak sepenuhnya terjadi di semua kabupaten/kota di DIY. Di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, jumlah laki-laki yang belum tamat SD/MI lebih tinggi daripada perempuan dengan perbedaan yang tidak terlalu berbeda signifikan.

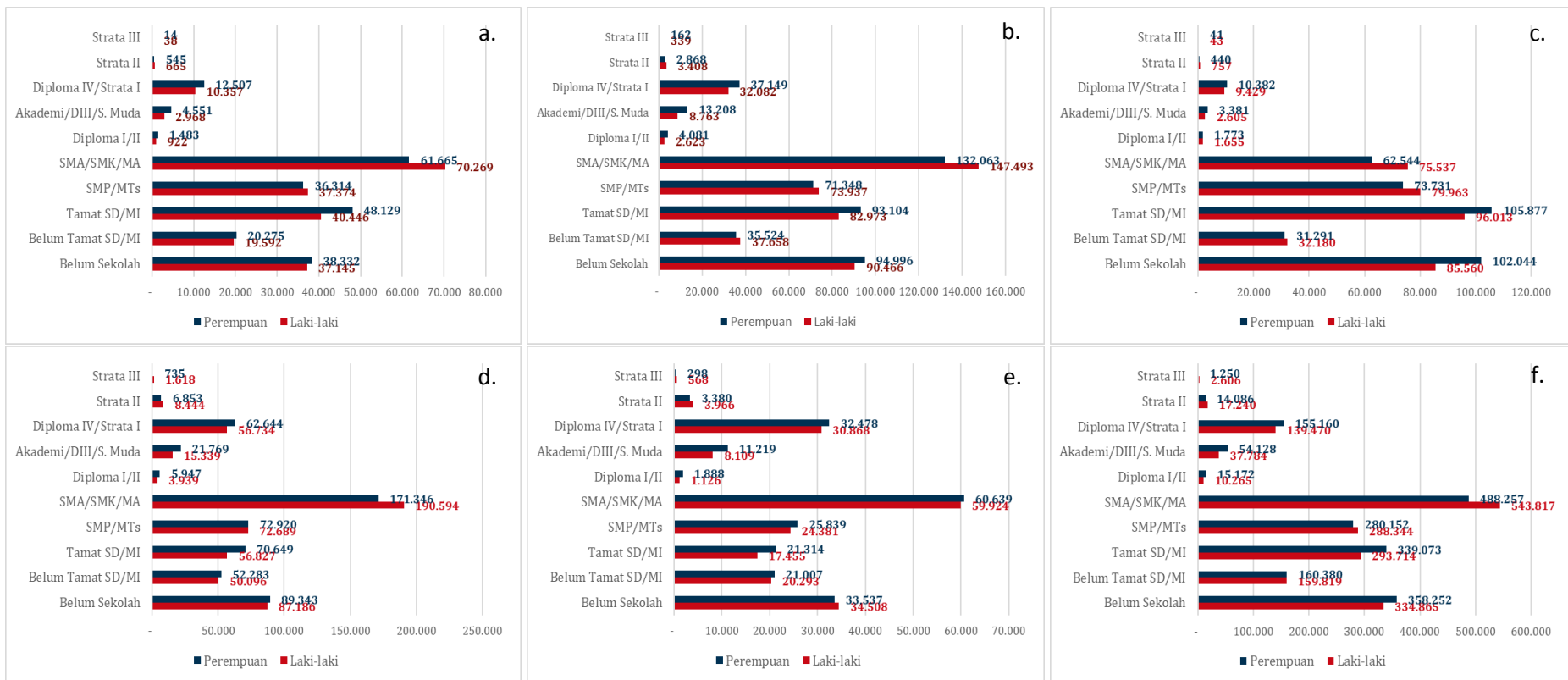
Pada jenjang SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Strata II, dan Strata III, di Provinsi DIY jumlah laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan sama halnya pada lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tingginya minat

laki-laki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dilihat pada 3 tahun terakhir, Provinsi DIY pada jenjang pendidikan tamat SD/MI ke bawah mengalami penurunan dari 27,02 di tahun 2021 menjadi 25,8 di tahun 2023. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi di Provinsi DIY terus menunjukkan kenaikan persentase. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan institusi pendidikan pada arah perbaikan dan peningkatan dalam sistem pendidikan di Provinsi DIY serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Tabel 5.2
Perbandingan Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk
Tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kabupaten/Kota se-DIY (%)

Jenjang Pendidikan	Kulon Progo			Bantul			Gunungkidul			Sleman			Kota Yogyakarta			DIY		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Belum Sekolah	17,38	17,27	17,01	18,97	19,28	19,23	24,46	24,39	24,20	16,55	16,47	16,08	15,09	15,92	16,48	18,78	18,90	18,76
Belum Tamat SD/MI	9,42	9,22	8,99	7,96	7,77	7,59	8,54	8,37	8,19	9,89	9,63	9,32	10,29	10,18	10,00	9,09	8,89	8,67
Tamat SD/MI	21,00	20,48	19,97	19,30	18,68	18,26	26,85	26,47	26,04	12,24	11,87	11,61	9,74	9,53	9,39	17,93	17,49	17,13
SMP/MTs	16,41	16,54	16,61	14,94	14,97	15,07	19,65	19,78	19,83	13,35	13,32	13,26	12,49	12,32	12,17	15,36	15,38	15,39
SMA/SMK/MA	28,64	29,09	29,74	28,57	28,72	28,99	16,85	17,23	17,81	32,11	32,45	32,96	29,80	29,39	29,21	27,29	27,53	27,94
Diploma I/II	0,56	0,54	0,54	0,73	0,71	0,70	0,47	0,46	0,44	0,92	0,91	0,90	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70	0,69
Akademi/DIII/ S. Muda	1,61	1,64	1,70	2,21	2,25	2,28	0,73	0,74	0,77	3,30	3,34	3,38	4,77	4,71	4,68	2,44	2,46	2,49
Diploma IV/Strata I	4,75	4,93	5,15	6,69	6,95	7,18	2,29	2,40	2,56	10,14	10,47	10,87	15,15	15,26	15,35	7,50	7,73	7,98
Strata II	0,23	0,25	0,27	0,59	0,62	0,65	0,14	0,14	0,15	1,29	1,34	1,39	1,71	1,75	1,78	0,79	0,82	0,85
Strata III	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21	0,10	0,10	0,10
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	443.003	442874	443.591	954706	956513	964.245	774609	774441	775.246	1.082.754	1088109	1.097.955	416117	415509	412.797	3671189	3677446	3.693.834

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2020, 2021 dan 2022



Gambar 5.2. Proporsi Jumlah Pendidikan Terakhir Menurut Gender di Kabupaten (a) Kulon Progo, (b) Bantul, (c) Gunungkidul, (d) Sleman, (e) Kota Yogyakarta, dan (f) DIY Tahun 2022

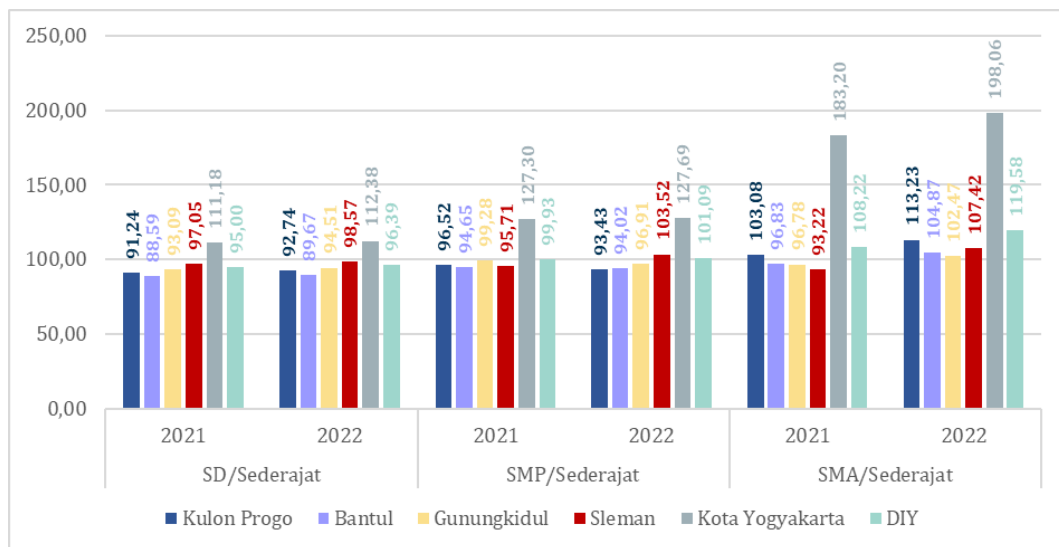
Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2022

C. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan pada suatu periode tertentu. APK adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengacu pada persentase siswa dalam kelompok usia yang terdaftar di tingkat pendidikan tertentu yang merupakan indikator yang paling sederhana untuk melihat kondisi setiap jenjang pendidikan di suatu daerah. Angka ini digunakan untuk mengukur akses pendidikan dan keberhasilan program pendidikan suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan dari Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan dengan target 95% (Berlian, N. 2011).



Gambar 5.3 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, data akhir tahun 2021 dan 2022

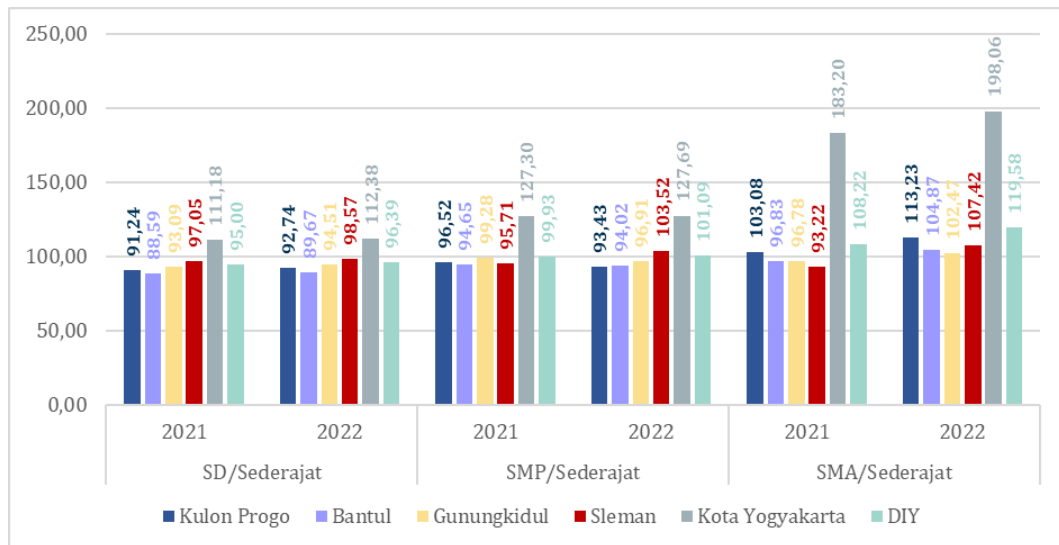
Terlihat pada Gambar 5.3 menunjukkan bagaimana kondisi APK di Provinsi DIY di setiap golongan umur berdasarkan jenjang pendidikannya, kelompok umur tersebut terbagi menjadi 3, yaitu umur 7-12 (SD/Sederajat), 13-15 (SMP/Sederajat), 16-18 (SMA/Sederajat). Nilai APK di Provinsi DIY mengalami peningkatan di setiap kelompok umur dari tahun 2021 hingga 2022, Peningkatan nilai APK tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan di Provinsi DY, artinya terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum dan menunjukkan adanya keberhasilan pada program pendidikan.

Berdasarkan ketiga jenjang pendidikannya, semua kabupaten/kota di DIY sebagian besar mengalami peningkatan kecuali Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang mengalami penurunan. Rendahnya nilai APK dapat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kapasitas fiskal, kondisi geografi, ketersediaan sarana dan prasarana dan tingkat pendidikan penduduk (Berliana, 2011) serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Nilai persentase APK pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi DIY berada di atas 95% atau di atas target yang menunjukkan terjadinya keberhasilan kebijakan wajib belajar di Provinsi DIY. Pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat terdapat nilai persentase APK lebih dari 100 persen. Artinya menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya (Safira dan Wibowo, 2021). Kondisi ini dikarenakan cara menghitung APK adalah dengan menggunakan jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sebagai pembilang dengan tanpa melihat umur siswa dengan angka penyebutnya menggunakan kelompok usia standar di setiap jenjang pendidikan. Menurut BPS, sejak 2007 pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

D. Angka Partisipasi Murni

Selain angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni (APM) juga merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat keberhasilan program pendidikan (Safira dan Wibowo, 2021). APM merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam persentase. APM menunjukkan partisipasi penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 5.4 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, data akhir tahun 2021 dan 2022

Perkembangan APM dalam 2 tahun terakhir pada hampir tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan pada tiap jenjang pendidikan. Kenaikan persentase ini menunjukkan kesesuaian jenjang pendidikan tertentu dengan usia penduduk pada jenjang pendidikan tertentu semakin tinggi. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pendidikan di suatu wilayah serta mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (Jatti, dkk, 2020). Selain itu, menurut Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Dikpora DIY Tahun 2022-2027 peningkatan ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan menengah telah menysasar penduduk dengan jenjang usia yang sesuai sejak program wajib belajar 12 tahun diterapkan pada tahun 2014.

Capaian APM untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir berada pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Capaian APM di Provinsi DIY pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat pada tahun 2022 sudah mencapai target nilai ideal atau sudah mencapai 100 persen. Nilai APM pada jenjang

pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat melebihi 100 persen ini dikarenakan banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah.

Hal ini sering terjadi di kota besar di mana siswa dari pinggiran kota bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya (Safira dan Wibowo, 2021).

E. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS)⁹ adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan angka putus sekolah adalah untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu wilayah dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Demikian juga sebaliknya semakin rendah angka putus sekolah, semakin baik kondisi pendidikan di suatu wilayah.

Menurut pencatatan Dikpora DIY, jumlah putus sekolah tertinggi di Provinsi DIY pada tahun 2022 berada di jenjang pendidikan SD dan SMK. Masing-masing mencapai 324 dan 319 penduduk yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMK. Kenaikan jumlah putus sekolah terbanyak dibandingkan tahun sebelumnya berada di Kabupaten Sleman sebanyak 279 siswa. Sedangkan penurunan jumlah putus sekolah tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya berada di Kabupaten Bantul sebanyak 284 siswa. Jumlah putus sekolah di Provinsi DIY tahun 2022 lebih tinggi pada

⁹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/12>

siswa perempuan sebanyak 512 sedangkan siswa laki-laki sebanyak 394.

Dinas Dikpora DIY (2022) menyebutkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah, diantaranya:

"Persoalan ekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial masih melatarbelakangi alasan anak-anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ataupun putus sekolah."

Dinas Dikpora DIY (2022) menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka putus sekolah, diantaranya:

"Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan melalui pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu."

Terkait dengan permasalahan putus sekolah tertinggi di DIY, Dinas Dikpora DIY secara khusus memberikan perhatian dan langkah-langkah kebijakan agar angka putus sekolah di DIY dapat ditekan. Langkah khusus tersebut yang dirangkum dari laporan Dinas Dikpora DIY (2022) antara lain:

1. *Penyediaan akses/bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah;*
2. *Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah/madrasah swasta jenjang pendidikan menengah dan khusus untuk mendukung operasional sekolah/madrasah dan meringankan beban ekonomi siswa;*
3. *Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan melalui pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu; dan*
4. *Pendataan menyeluruh sebagai bahan evaluasi pemerataan partisipasi pendidikan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun khusus. Melalui pendataan ini diharapkan data putus sekolah dapat*

dihimpun secara valid beserta kendala yang dihadapi masing-masing peserta didik yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah. Dari hasil pendataan akan didapatkan data pilah penyebab permasalahan yang diharapkan dapat diatasi baik melalui pemberian beasiswa atau pendekatan sosial bekerjasama dengan lembaga pendidikan terkait.

Tabel 5.3
Jumlah Murid Angka Putus Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022

Tingkat	Gender	Kulon Progo		Bantul		Gunungkidul		Sleman		Yogyakarta		DIY	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
SD	Laki-laki	5	5	71	23	22	6	9	0	0	3	107	37
	Perempuan	1	1	123	2	19	1	17	280	0	3	160	287
	Total	6	6	194	25	41	7	26	280	0	6	267	324
MI	Laki-laki	0	2	1	0	2	3	1	0	0	0	4	5
	Perempuan	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	2
	Total	0	2	1	0	3	3	2	2	0	0	6	7
SMP	Laki-laki	31	31	10	10	20	24	3	0	4	11	68	76
	Perempuan	2	2	3	3	5	3	0	95	0	3	10	106
	Total	33	33	13	13	25	27	3	95	4	14	78	182
MTs	Laki-laki	1	0	45	5	2	1	7	0	6	0	61	6
	Perempuan	0	0	15	0	0	2	1	1	0	0	16	3
	Total	1	0	60	5	2	3	8	1	6	0	77	9
SMA	Laki-laki	3	5	2	3	6	4	5	5	3	11	19	28
	Perempuan	3	6	7	1	13	0	1	2	0	5	24	14
	Total	6	11	9	4	19	4	6	7	3	16	43	42
MA	Laki-laki	3	14	9	0	0	0	0	1	0	0	12	15
	Perempuan	7	2	10	4	1	1	0	1	0	0	18	8
	Total	10	16	19	4	1	1	0	2	0	0	30	23
SMK	Laki-laki	17	78	45	31	59	47	34	11	17	60	172	227
	Perempuan	7	24	33	8	41	28	53	13	16	19	150	92
	Total	24	102	78	39	100	75	87	24	33	79	322	319

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan Tahun 2022

F. Rasio Sekolah Negeri / Swasta

Rasio sekolah negeri/swasta adalah perbandingan jumlah sekolah

negeri dengan jumlah sekolah swasta di suatu daerah. Perhitungan rasio sekolah negeri/swasta dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah sekolah negeri dengan jumlah sekolah swasta. Dilihat dari jenis sekolah di Provinsi DIY didominasi oleh jenis sekolah swasta di tiap jenjang pendidikan sekolah kecuali pada tingkat sekolah dasar.

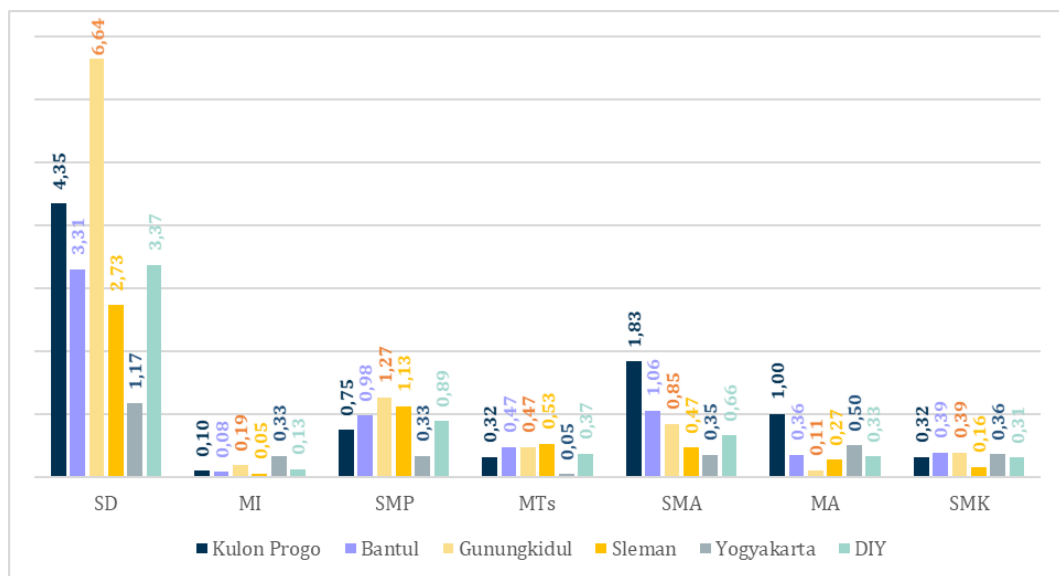
Tabel 5.4
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Tingkat Sekolah	Jenis Sekolah	Kabupaten/Kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
SD	Negeri	274	281	405	374	89	1423
	Swasta	63	85	61	137	76	422
	Jumlah	337	366	466	511	165	1845
MI	Negeri	3	3	13	2	1	22
	Swasta	30	38	68	37	3	176
	Jumlah	33	41	81	39	4	198
SMP	Negeri	36	47	61	54	16	214
	Swasta	48	48	48	48	48	240
	Jumlah	84	95	109	102	64	454
MTs	Negeri	6	9	9	10	1	35
	Swasta	19	19	19	19	19	95
	Jumlah	25	28	28	29	20	130
SMA	Negeri	11	19	11	17	11	69
	Swasta	6	18	13	36	31	104
	Jumlah	17	37	24	53	42	173
MA	Negeri	3	5	1	6	2	17
	Swasta	3	14	9	22	4	52
	Jumlah	6	19	10	28	6	69
SMK	Negeri	8	13	13	8	8	50
	Swasta	25	33	33	49	22	162
	Jumlah	33	46	46	57	30	212

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2022

Terlihat pada Tabel 5.4 bahwa jumlah Sekolah Dasar Negeri lebih banyak 1001 dibandingkan Sekolah Negeri Swasta dengan rasio 3.37. Berdasarkan kabupaten/kota rasio sekolah dasar negeri dan swasta paling tinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 6,64 yang menunjukkan untuk tiap sekitar 7 sekolah negeri terdapat 1 sekolah swasta.

Menurut Biro Tata Pemerintah DIY (2019) tingginya jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibandingkan dengan Sekolah Dasar Swasta (SDS) disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah di masa lalu pada tahun 1980an. Adanya kebijakan pembangunan SD Negeri di setiap kelurahan/desa bahkan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dibangun 2 SD Negeri di setiap kelurahan/desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Provinsi DIY.



Gambar 5.5 Rasio Sekolah Negeri dengan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2022

Sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya yakni MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK didominasi oleh jenjang pendidikan dengan jenis sekolah swasta. Tingginya jenis sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri di Provinsi DIY ini hampir terjadi di setiap kabupaten/kota DIY. Kondisi ini terlihat pada Gambar 5.5 yang menunjukkan nilai rasio sekolah negeri dan swasta kurang dari 1 yang artinya jumlah sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri di Provinsi DIY yang hampir terjadi di setiap kabupaten/kota.

Kondisi ini menurut laporan Biro Tapem DIY (2020) disebabkan banyaknya organisasi yang berbasis keagamaan, misal Muhammadiyah atau Kanisius yang juga menyelenggarakan pendidikan, disamping pemerintah. Sekolah swasta mencoba memperbaiki segala aspek, baik melalui peningkatan keuangan dengan menarik dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan sekolah secara komprehensif, memperbaiki segala tatanan dalam silabus maupun kurikulum, dan juga semua aspek yang dapat meningkatkan perkembangan peserta didik terutama dalam hal penekanan pada nilai-nilai agama. Hal ini menarik minat orang tua yang menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut (Perwita dan Widuri, 2023).

G. Rasio Guru – Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan ukuran perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dalam membimbing murid juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio ideal antara guru dengan murid didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 yang ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 5.5
Rasio Ideal Guru - Murid di Setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Rasio Ideal Guru-Murid
SD sederajat	1:20
MI sederajat	1:15
SMP sederajat	1:20
MTs sederajat	1:15
SMA sederajat	1:20
MA sederajat	1:15
SMK sederajat	1:15

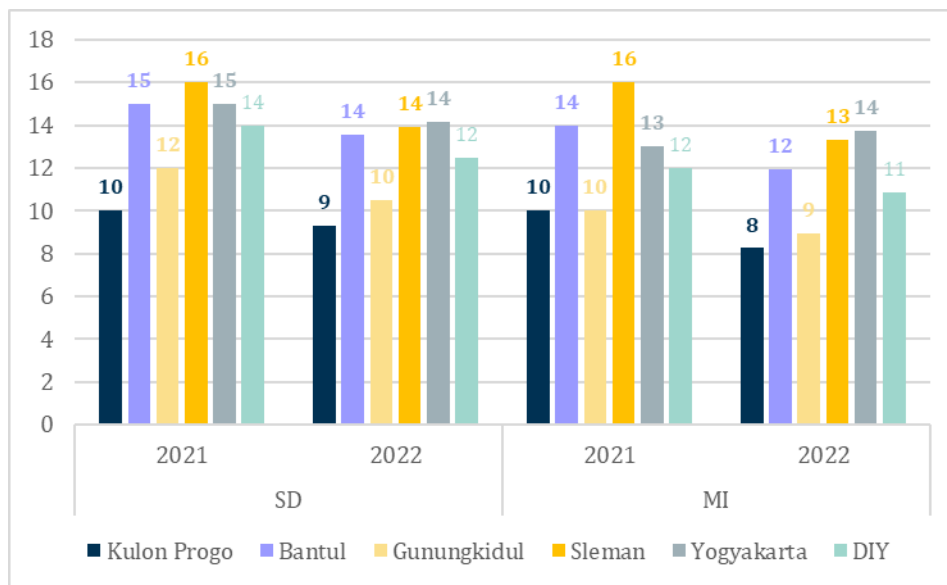
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17

Terlihat pada Tabel 5.5 terdapat 7 klasifikasi rasio ideal guru terhadap murid sesuai dengan jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat memiliki rasio ideal guru dan murid sebesar 1:20. Sedangkan pada jenjang MI sederajat, MTs sederajat, MA sederajat, dan SMK sederajat memiliki rasio ideal guru dan murid sebesar 1:15. Nilai rasio guru-murid yang lebih rendah atau tinggi akan mempengaruhi pada tingkat perhatian dan pengawasan guru terhadap murid.

1. Rasio Guru - Murid di SD dan MI

Pada jenjang pendidikan SD dan MI rata-rata rasio guru-murid tahun 2021 masing-masing sebesar 12 dan 11 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Rasio guru-murid di Provinsi DIY bahkan hingga tingkat kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan nilai lebih rendah dibandingkan nilai rasio ideal yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Nilai rasio guru-murid di masing-masing kabupaten/kota Provinsi DIY yang lebih rendah dari 1:20 untuk SD dan 1:15 untuk MI

Nilai rasio guru-murid ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak guru untuk setiap murid yang memberikan dampak positif pada prestasi siswa sehingga meringankan beban kerja guru dan memungkinkan mereka untuk fokus pada kualitas dibandingkan dengan kuantitas pengajaran. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian oleh Choi (2012) bahwa di bawah rasio siswa-guru yang lebih rendah, siswa menghabiskan lebih banyak waktu dalam tanggapan akademik aktif dan waktu keterlibatan akademik serta guru lebih sering memeriksa pemahaman siswa dan memberikan relevansi tugas yang lebih besar, lebih banyak umpan balik, instruksi yang lebih adaptif dan meningkatkan hasil prestasi siswa.

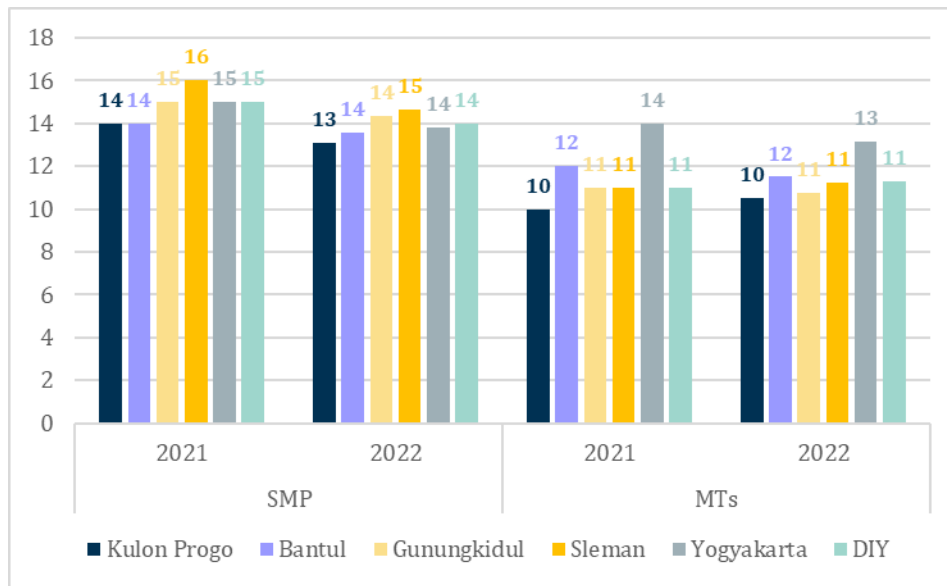


Gambar 5.6 Rasio Guru - Murid di SD dan MI di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY 2021 dan 2022

2. Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs

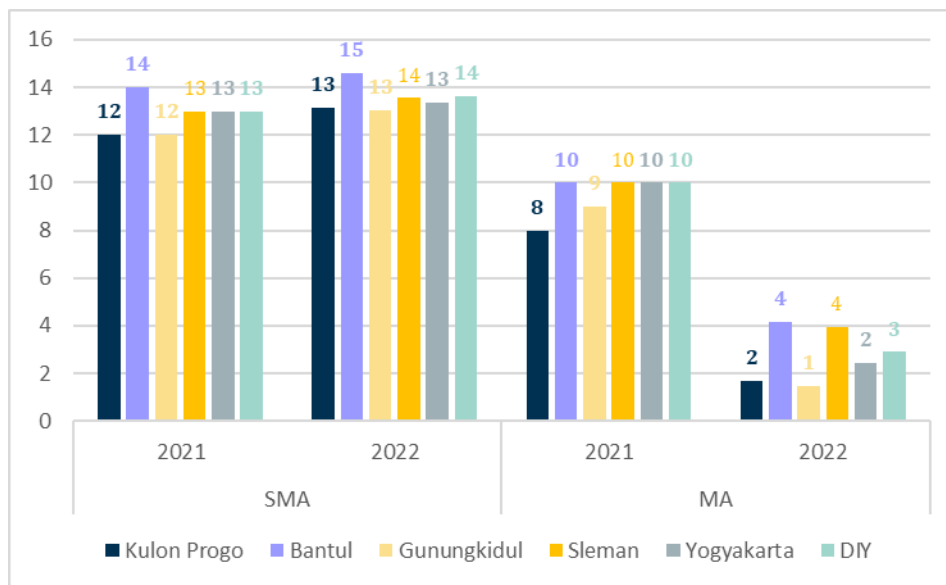
Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal rasio guru-murid untuk jenjang pendidikan SMP dan MTs masing-masing sebesar 1:20 dan 1:15. Terlihat dari Gambar 5.7 menunjukkan bahwa tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY, rasio guru-murid pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dan sudah memenuhi standar ideal yang ditetapkan. Rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SMP dan MTs di Provinsi DIY pada tahun 2022 masing-masing sebesar 1:14 dan 1:11. Angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada lebih sedikit murid untuk setiap guru, yang berarti bahwa setiap murid memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari guru yang dapat membantu memahami materi pelajaran, meningkatkan hasil belajar murid, dan meningkatkan kepuasan murid. Ketika murid merasa bahwa mereka mendapat perhatian yang mereka butuhkan dari guru, mereka lebih mungkin untuk menyukai sekolah dan terlibat dalam pembelajaran.



Gambar 5.7 Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

3. Rasio Guru - Murid di SMA dan MA

Rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SMA dan MA di Provinsi DIY pada tahun 2022 berada di rasio standar ideal. Berdasarkan data dari Gambar 5.8, rasio guru-murid di jenjang pendidikan SMA dan MA pada tahun 2022 masing-masing sebesar 1:14 dan 1:3. Berdasarkan kabupaten/kota, nilai rasio guru-murid berada dibawah rasio standar ideal jenjang pendidikan SMA dan MA yang ditetapkan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu masing-masing sebesar 1:20 dan 1:15. Rasio yang lebih rendah memungkinkan guru untuk memberikan lebih banyak perhatian individual kepada setiap murid. Ini dapat membantu murid untuk belajar lebih efektif dan mencapai potensi mereka yang lebih besar.



Gambar 5.8 Rasio Guru - Murid di SMA dan MA di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

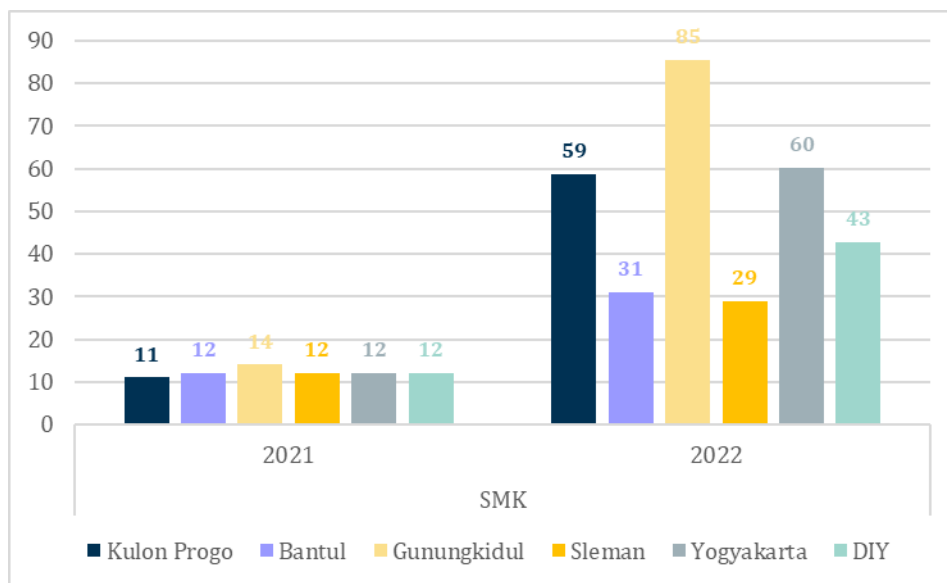
Namun, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan rasio guru-murid yang rendah. Rasio guru-murid yang rendah dapat membuat sekolah lebih mahal untuk dioperasikan. Ini karena sekolah harus membayar gaji lebih banyak kepada guru dan menyediakan lebih banyak fasilitas bagi murid. Kedua, rasio guru-murid yang rendah dapat membuat sulit bagi sekolah untuk menemukan guru yang berkualitas. Ini karena ada lebih banyak permintaan untuk guru daripada pasokan.

4. Rasio Guru - Murid di SMK

Rasio guru-murid di Provinsi DIY mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY pada jenjang pendidikan SMK. Berdasarkan data dari Gambar 5.9, peningkatan rasio guru-murid paling tinggi pada jenjang SMK berada di Kabupaten Sleman naik dari 1:14 pada tahun 2021 menjadi 1:85 di tahun 2022.

Rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi DIY pada tahun 2022 sebesar 1:43. Nilai ini jauh melebihi standar ideal yang

didasarkan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang seharusnya sebesar 1:15. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap guru bertanggung jawab terhadap 43 siswa pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi DIY. Kondisi ini akan sulit bagi guru untuk menemukan kapasitas setiap murid atau fokus pada kekuatan dan kelemahan masing-masing murid di kelas.



Gambar 5.9 Rasio Guru - Murid di SMK di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

Rasio guru-murid yang tinggi dapat membuat sulit bagi guru untuk memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Hal ini dapat membuat lebih sulit bagi guru untuk mengatasi kebutuhan siswa yang berbeda, seperti siswa yang membutuhkan dukungan khusus atau siswa yang berbakat. Rasio guru-murid yang tinggi juga dapat membuat lebih sulit bagi guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Akibatnya, guru akan menjadi lebih sulit untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan mengetahui bagaimana cara mendorong masing-masing murid secara unik untuk menuju keberhasilan.

Rasio guru-murid yang tinggi adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada prestasi siswa. Kondisi sesuai dengan penelitian Koc dan Celik (2015) yang mengungkapkan bahwa siswa dengan kelas rasio guru-murid tinggi cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah pada tes standar. Maka mereka menyarankan agar memperbanyak jumlah guru untuk mengurangi jumlah siswa per guru sehingga prestasi siswa dapat meningkat.

H. Jumlah Ruang Sekolah

Jumlah ruang sekolah merupakan salah satu sarana prasarana untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah. Jumlah ruang sekolah yang memadai sangat penting untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Berdasarkan data dari Tabel 5.6 terlihat bahwa Tingkat pendidikan SD sederajat memiliki jumlah ruang kelas paling banyak yang dilanjutkan SMA sederajat kemudian SMP sederajat. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2022. Jumlah ruang sekolah SD yang banyak dikarenakan jumlah siswa yang lebih banyak di jenjang SD sederajat daripada jenjang pendidikan lainnya serta SD sederajat merupakan jenjang pendidikan wajib belajar.

Tabel 5.6
Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Sekolah
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
SD	1.856	3.269	2.809	3.390	1.729	13053
MI	187	318	510	360	40	1415
SMP	618	1.173	968	1.360	747	4866
MTs	132	315	225	413	115	1200
SMA	235	541	272	580	645	2273
MA	59	223	84	278	101	745
SMK	466	720	758	942	570	3456

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2022

I. Perbandingan Siswa Per Kelas

Perbandingan siswa per kelas adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan jumlah siswa dengan jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini digunakan dalam konteks pendidikan untuk melihat kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan sehingga diperoleh data apakah jumlah siswa dalam setiap kelas sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Standar yang digunakan untuk batas ideal jumlah maksimal siswa per rombongan belajar didasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Jenjang pendidikan yang digunakan dari peraturan ini hanya pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Jumlah maksimal siswa yang ideal dalam satu rombongan belajar pada masing-masing jenjang pendidikan sebanyak 28, 32, 36, dan 36. Berikutnya akan dideskripsikan kondisinya di DIY pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 5.7
Standar Jumlah Rombongan Belajar dan Maksimal Siswa per Rombongan Belajar di Setiap Satuan Pendidikan

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimal Siswa per Rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-27	36
5.	SDLB	6	5
6.	SMPLB	3	8
7.	SMALB	3	8

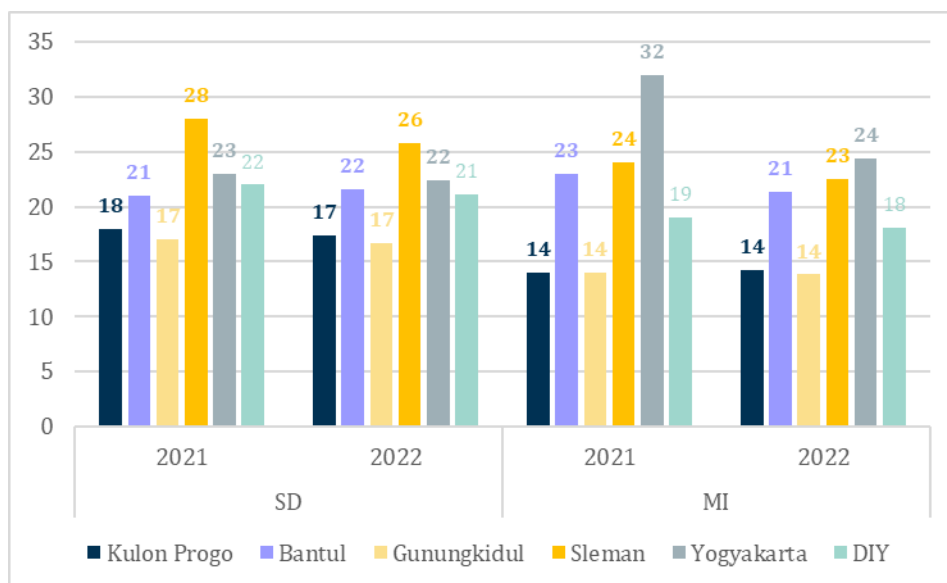
Sumber: Permendikbud No. 22 Tahun 2016

1. Jumlah Siswa Per Kelas di SD/MI

Jumlah siswa per kelas di SD/MI di Provinsi DIY pada tahun 2022 masih pada standar jumlah maksimal per rombongan belajar. Dibandingkan tahun lalu, nilai perbandingan ini mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD dan MI di Provinsi DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa

kepadatana kelas rendah yang berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran, karena guru dapat memberikan perhatian yang lebih kepada setiap siswa. Siswa juga dapat berinteraksi lebih intensif dengan guru dan teman-teman sekelas, sehingga lebih banyak kesempatan untuk belajar secara aktif.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, hampir semua angkanya mengalami penurunan kecuali pada Kabupaten Bantul pada jenjang pendidikan SD yang mengalami peningkatan dari 21 di tahun 2021 menjadi 22 namun masih pada standar ideal jumlah maksimal per rombongan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa minat orang tua siswa lebih tinggi menyekolahkan di SD dibandingkan MI.



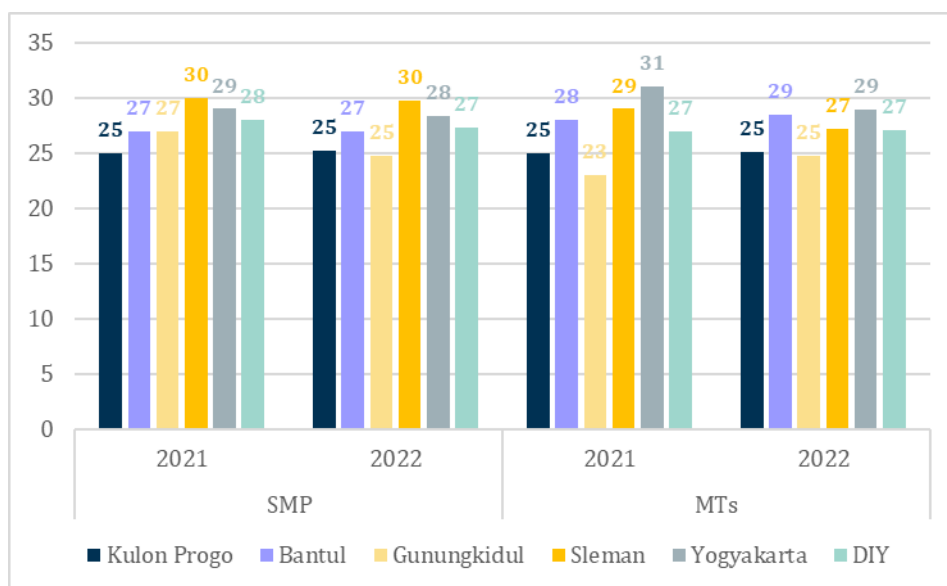
Gambar 5.10 Jumlah Siswa/Ruang SD/MI di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

2. Jumlah Siswa Per Kelas di SMP/MTs

Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016, jumlah siswa ideal dalam satu rombongan belajar tingkat SMP/MTs sebesar 32. Terlihat dari Gambar 5.15

bahwa jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP dan MTs di Provinsi DIY rata-rata sebesar 27. Jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas ini juga terjadi pada tiap kabupaten/kota di DIY.

Nilai jumlah siswa tiap kelas tertinggi pada SMP berada di Kabupaten Sleman sedangkan pada MTs berada di Kota Yogyakarta yang sama halnya dengan tahun sebelumnya. Jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang individual dari guru. Dengan jumlah siswa yang ideal, guru dapat lebih mudah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada setiap siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif.

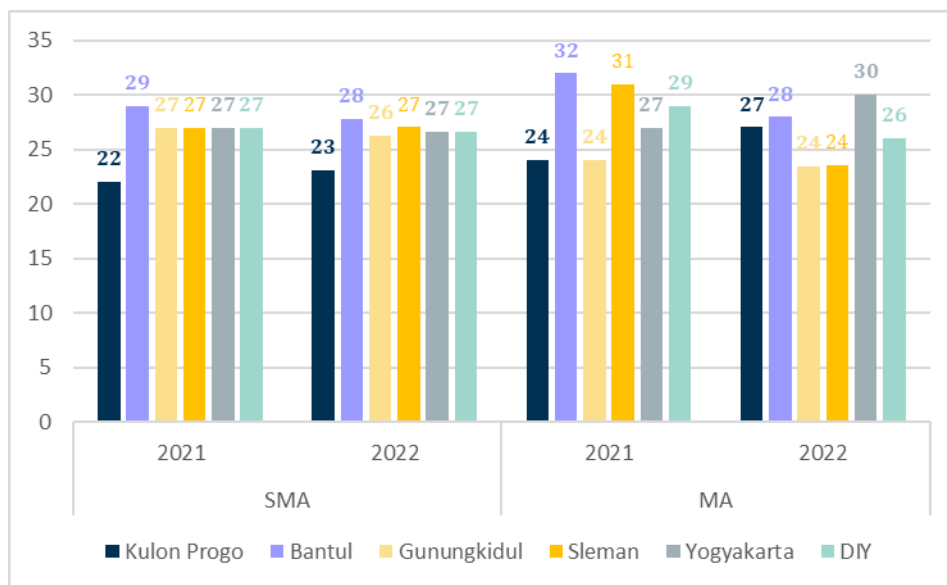


Gambar 5.11 Jumlah Siswa/Ruang SMP/MTs di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

3. Jumlah Siswa Per Kelas di SMA/MA

Jumlah siswa per kelas di DIY pada 2022 pada jenjang pendidikan SMA dan MA masih berada pada standar jumlah maksimal siswa per rombel yakni sebesar 36. Dibandingkan tahun sebelumnya rata-rata jumlah siswa per ruang pada jenjang pendidikan SMA tidak mengalami perubahan sebesar

27 sedangkan pada jenjang pendidikan MA mengalami penurunan dari 29 di tahun 2021 menjadi 26 di tahun 2022. Angka ini menunjukkan kelas berkepadatan rendah. Kepadatan kelas yang rendah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa. Siswa akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, dan mereka juga akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari guru jika mereka mengalami kesulitan.



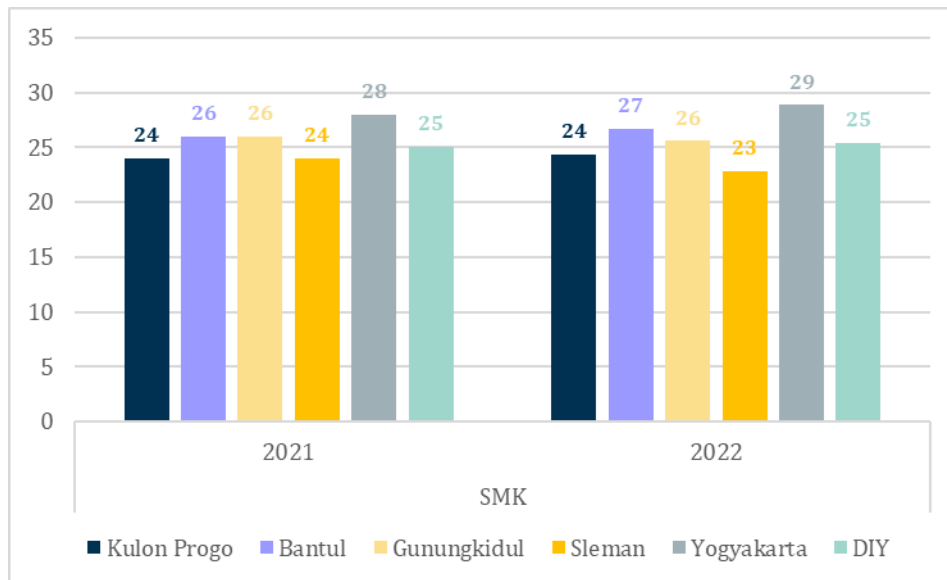
Gambar 5.12 Jumlah Siswa/Ruang SMA/MA di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

4. Jumlah Siswa Per Kelas di SMK

Jumlah siswa tiap kelas pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi DIY tahun 2022 berada pada standar ideal jumlah maksimal siswa per rombongan belajar menurut Peraturan Kementerian Pendidikan sebesar 36. Terlihat dari Gambar 5.17 bahwa jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi DIY rata-rata sebesar 25 yang stagnan atau tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas ini juga terjadi pada tiap kabupaten/kota di DIY yang mengalami kenaikan, penurunan dan bahkan stagnan jika dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 5.17).

Stagnan dalam perbandingan jumlah siswa per kelas dapat diinterpretasikan bahwa kepadatan kelas pada jenjang pendidikan tersebut relatif stabil. Ini berarti jumlah siswa yang mendaftar dan masuk ke setiap kelas tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya.



Gambar 5.13 Jumlah Siswa/Ruang SMK di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2021 dan 2022

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

A. Angkatan Kerja

Angkatan kerja¹⁰ merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Lebih mudahnya angkatan kerja ini merupakan penduduk yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pada 2022 jumlah angkatan kerja di DIY sebesar 2.949.992 jiwa (Tabel 6.1). Jumlah ini naik 18.121 jiwa dibandingkan jumlah pada tahun 2021. Penambahan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi ekonomi tambahan tenaga kerja ini tentu diharapkan memiliki efek positif bagi pembangunan. Apalagi jika sebagian besar angkatan kerja ini adalah mereka yang sedang aktif bekerja.

Tabel 6.1
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

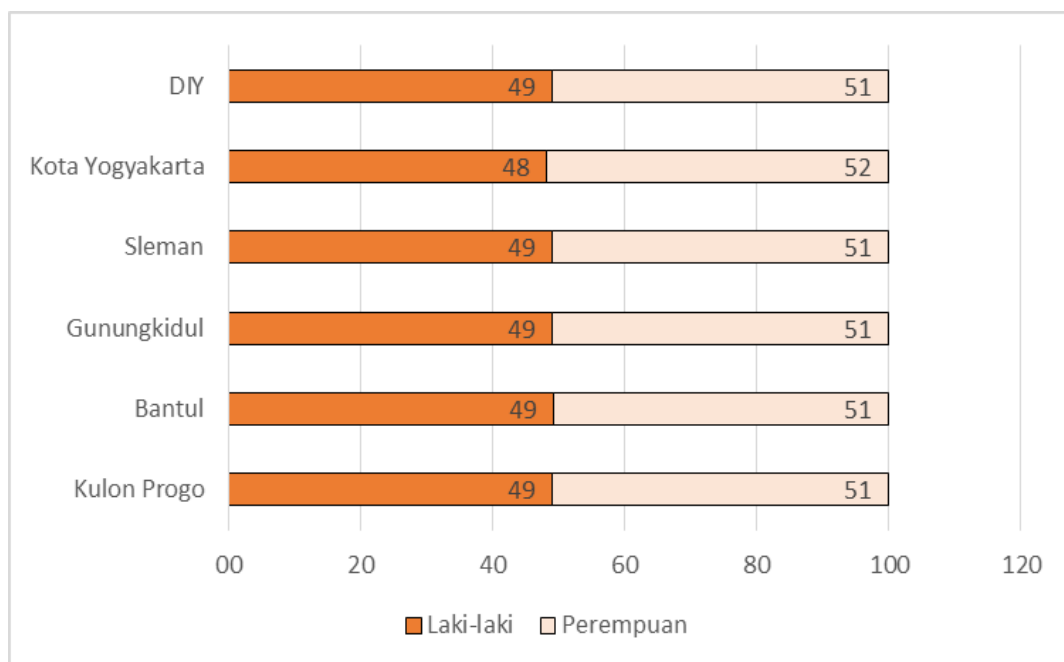
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kulon Progo	174.478	181.830	356.308
Bantul	376.794	387.478	764.272
Gunungkidul	309.803	322.486	632.289
Sleman	425.119	442.579	867.698
Kota Yogyakarta	158.522	170.903	329.425
DIY	1.444.716	1.505.276	2.949.992

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2022

¹⁰ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/47>

Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Sleman memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Hal ini wajar mengingat jumlah penduduk di Sleman merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sleman pada 2022 sebesar 867.698 jiwa. Sedangkan angkatan kerja paling sedikit dimiliki oleh Kota Yogyakarta, yakni sebesar 329.425, turun dibandingkan jumlah tahun lalu sebesar 331.394 jiwa.

Berdasarkan gender, angkatan kerja di DIY pada 2022 didominasi oleh perempuan. Hal ini dikarenakan kenaikan jumlah angkatan kerja perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Di DIY dan di seluruh kabupaten/kota di DIY perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Perbandingannya perempuan sebesar 51 persen dan laki-laki sebesar 49 persen dari total angkatan kerja yang ada (Lihat Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Persentase Angkatan Kerja Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Tingginya perempuan daripada laki-laki yang berada di pasar kerja di DIY disebabkan karena perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah memilih untuk masuk ke pasar kerja. Pola ini dimulai pada 2020, karena menurut Biro Tata Pemerintahan DIY (2020) pada 2019 persentase angkatan kerja perempuan di DIY baru sebesar 46 persen. Peran sektor domestik di DIY oleh para perempuan semakin menjadi mengecil. Peran tersebut akan diambil alih oleh perempuan lain yang bekerja dan dibayar atau lembaga yang mempekerjakan perempuan untuk bekerja di sektor domestik. Akibatnya perempuan banyak yang masuk ke dalam pasar kerja dan menjadi angkatan kerja aktif.

B. Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja

Angkatan kerja terdiri dari penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan belum bekerja. Berdasarkan Tabel 6.2, jumlah angkatan kerja di DIY tercatat sebesar 2.022.097 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut sebanyak 93,5 persen adalah penduduk yang bekerja. Sebagian besar penduduk di DIY bekerja sebagai karyawan swasta, tukang/buruh berkeahlian khusus dan di sektor pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan. Pola ini sama dengan jenis pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta (451.431 jiwa), tukang/buruh berkeahlian khusus (500.880 jiwa) dan bekerja di sektor pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan (349.744 jiwa). Jika ketiganya dipersentasekan secara kumulatif diperoleh angka 68,84 persen dari seluruh angkatan kerja yang bekerja di DIY. Selain ketiga jenis pekerjaan tersebut, wiraswasta (18,36 persen) juga menjadi yang terbanyak berikutnya dari jenis pekerjaan di DIY. Artinya dari semuanya, jenis pekerjaan tertinggi di DIY adalah sebagai tukang/buruh berkeahlian khusus, dengan jumlah yang paling banyak adalah bekerja sebagai buruh harian lepas (361.899 jiwa) dan buruh tani/ perkebunan (120.724 jiwa). Secara rinci jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan di DIY tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Gender
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Jenis Pekerjaan	Gender	Kabupaten/kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
Belum/ Tidak Bekerja	L	9.527	12.381	16.719	18.649	9.671	66.947
	P	8.051	15.891	14.925	16.456	8.532	63.855
	L+P	17.578	28.272	31.644	35.105	18.203	130.802
ASN	L	4.086	10.281	5.121	13.610	5.578	38.676
	P	3.610	9.872	3.847	12.501	5.020	34.850
	L+P	7.696	20.153	8.968	26.111	10.598	73.526
TNI	L	824	2.762	423	3.597	494	8.100
	P	11	103	6	131	27	278
	L+P	835	2.865	429	3.728	521	8.378
POLRI	L	1.317	3.239	918	3.998	734	10.206
	P	77	249	49	341	80	796
	L+P	1.394	3.488	967	4.339	814	11.002
Pejabat Tinggi Negara	L	29	36	31	44	22	162
	P	9	5	6	14	8	42
	L+P	38	41	37	58	30	204
Buruh/ Tukang Berkeahlian Khusus	L	17.316	132.019	60.981	98.900	15.879	325.095
	P	6.492	102.631	24.939	35.645	6.078	175.785
	L+P	23.808	234.650	85.920	134.545	21.957	500.880
Sektor Pertanian/Peternakan/ Perikanan	L	44.364	9.106	90.735	19.684	196	164.085
	P	47.458	10.143	113.725	14.190	143	185.659
	L+P	91.822	19.249	204.460	33.874	339	349.744
Karyawan BUMN/BUMD	L	621	1.538	522	3.588	1.414	7.683
	P	244	692	210	1.615	822	3.583
	L+P	865	2.230	732	5.203	2.236	11.266
Karyawan Swasta	L	29.328	58.324	38.602	101.227	44.147	271.628
	P	21.195	43.368	21.932	62.992	30.316	179.803
	L+P	50.523	101.692	60.534	164.219	74.463	451.431
Wiraswasta	L	30.776	58.766	42.425	48.384	33.604	213.955
	P	19.465	50.003	20.757	23.754	19.333	133.312
	L+P	50.241	108.769	63.182	72.138	52.937	347.267
Tenaga Medis	L	185	516	128	1.246	567	2.642
	P	900	2.226	530	3.952	1.485	9.093
	L+P	1.085	2.742	658	5.198	2.052	11.735
Pekerjaan Lainnya	L	7.421	14.190	10.037	21.248	7.388	60.284
	P	9.783	18.267	7.358	22.666	7.504	65.578
	L+P	17.204	32.457	17.395	43.914	14.892	125.862
Jumlah	L	145.794	303.158	266.642	334.175	119.694	1.169.463
	P	117.295	253.450	208.284	194.257	79.348	852.634
	L+P	263.089	556.608	474.926	528.432	199.042	2.022.097

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2022

Menurut kabupaten/kota, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai buruh/tukang berkeahlian khusus. Sedangkan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta.

C. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Tingkat pendidikan angkatan kerja menggambarkan kondisi angkatan kerja yang berada di pasar kerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya. Kondisi di DIY, angkatan kerja didominasi oleh angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Persentasenya sebesar 34,3 persen dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Diduga kuat hal ini berkaitan dengan gambaran banyaknya penduduk yang bekerja di jenis pekerjaan karyawan swasta atau wiraswasta.

Jika dilihat pada angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat ke atas persentasenya sebesar 49,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2022, angkatan kerja yang tersedia di DIY hampir setengahnya adalah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi/ SMA ke atas. Bahkan kualifikasi angkatan kerja dengan jenjang pendidikan S1 sampai S3 sebanyak 10,9 persen dari total angkatan kerja yang ada. Oleh karenanya sangat wajar jika pekerjaan dengan kualifikasi yang membutuhkan pendidikan tinggi juga tinggi jumlahnya di DIY.

Pendidikan dan pekerjaan angkatan kerja di DIY nampaknya memiliki hubungan. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul dengan pendidikan SD ke bawah (diatas 30 persen) didominasi oleh penduduk di sektor pertanian. Sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan angkatan kerja berpendidikan SMA ke atas (di atas 60 persen) didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Tabel 6.3.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender di
Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

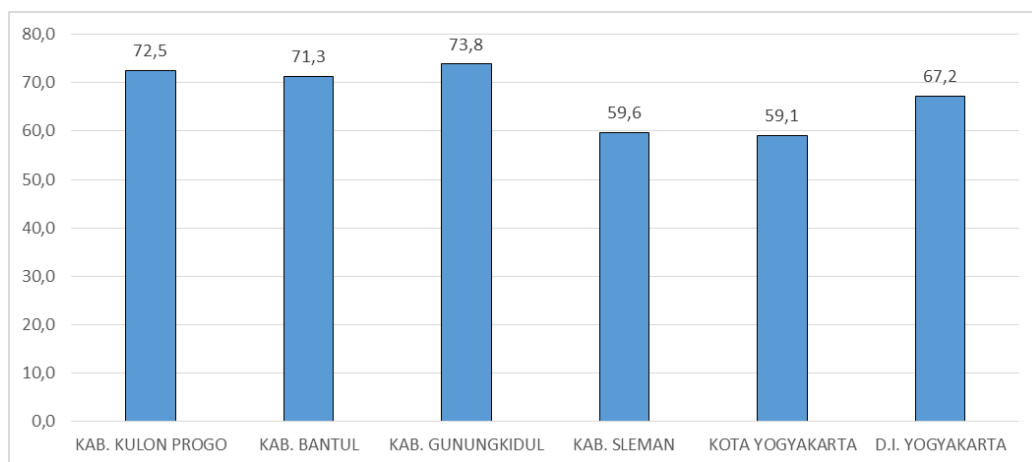
Wilayah		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
TIDAK/ BELUM SEKOLAH	L	5.132	12.837	28.780	7.725	2.573	57.047
	P	8.937	21.906	49.042	14.690	3.610	98.185
	JML	14.069	34.743	77.822	22.415	6.183	155.232
BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	L	10.248	21.388	21.240	22.516	13.261	88.653
	P	11.361	20.219	21.127	25.681	13.909	92.297
	JML	21.609	41.607	42.367	48.197	27.170	180.950
TAMAT SD/ SEDERAJAT	L	39.930	81.928	95.416	54.751	17.162	289.187
	P	47.626	91.993	105.254	68.542	21.003	334.418
	JML	87.556	173.921	200.670	123.293	38.165	623.605
SMP/ SEDERAJAT	L	37.370	73.809	79.928	72.489	24.369	287.965
	P	36.307	71.200	73.684	72.714	25.824	279.729
	JML	73.677	145.009	153.612	145.203	50.193	567.694
SMA/ SEDERAJAT	L	70.268	147.492	75.536	190.590	59.924	543.810
	P	61.665	132.059	62.544	171.341	60.639	488.248
	JML	131.933	279.551	138.080	361.931	120.563	1.032.058
DIPLOMA I/II	L	922	2.623	1.655	3.939	1.126	10.265
	P	1.483	4.081	1.773	5.947	1.888	15.172
	JML	2.405	6.704	3.428	9.886	3.014	25.437
AKADEMI/ DIPLOMA III/ S.MUDA	L	2.968	8.763	2.605	15.339	8.109	37.784
	P	4.551	13.208	3.381	21.769	11.219	54.128
	JML	7.519	21.971	5.986	37.108	19.328	91.912
DIPLOMA IV/ STRATA I	L	10.357	32.081	9.429	56.734	30.868	139.469
	P	12.507	37.149	10.382	62.644	32.478	155.160
	JML	22.864	69.230	19.811	119.378	63.346	294.629
STRATA II	L	665	3.408	757	8.444	3.966	17.240
	P	545	2.868	440	6.853	3.380	14.086
	JML	1.210	6.276	1.197	15.297	7.346	31.326
STRATA III	L	38	339	43	1.615	568	2.603
	P	14	162	41	735	298	1.250
	JML	52	501	84	2.350	866	3.853
Jumlah	L	177.898	384.668	315.389	434.142	161.926	1.474.023
	P	184.996	394.845	327.668	450.916	174.248	1.532.673
	JML	362.894	779.513	643.057	885.058	336.174	3.006.696

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

D. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY pada 2022 sebesar 67,19 persen. Jika melihat tren enam tahun ke belakang, secara umum nilai TPAK di DIY mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya angkatan kerja di DIY. Berkurangnya angkatan kerja ini secara alamiah disebabkan oleh turunnya fertilitas atau nilai migrasi netto yang negatif pada usia kerja. Penyebab penurunan TPAK yang menurun juga dapat disebabkan karena naiknya penduduk yang menjadi bukan angkatan kerja karena para perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau semakin tingginya penduduk usia kerja yang sekolah. Atau dimungkinkan ada faktor lainnya yang menjadi sebab nilai TPAK di DIY menjadi turun dalam beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan kabupaten/kota, nilai TPAK tertinggi ada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan buruh/tukang dengan keahlian khusus yang tidak mengenal pensiun diduga kuat menjadi penyebab tetap tingginya nilai TPAK di ketiga kabupaten tersebut. Sementara itu di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi yang terendah nilai TPAK nya. Tingginya penduduk yang berstatus sekolah dan mengurus rumah tangga menyebabkan nilai TPAK di keduanya menjadi lebih rendah.

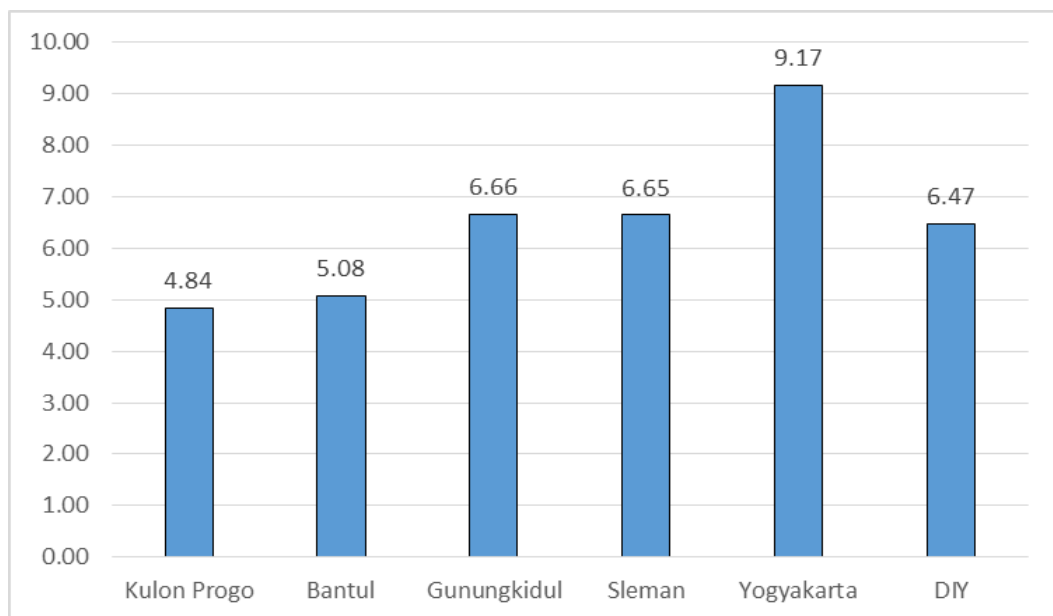


Gambar 6.2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II Tahun 2022

E. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹¹ didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada 2022 pengangguran terbuka di DIY sebesar 6,47. Artinya bahwa dari 100 angkatan kerja ada sekitar 6 orang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nilai TPT di DIY sendiri dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan kabupaten/kota, nilai penganggur terbuka ada di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan yang tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan nilai 9,17 persen (Gambar 6.3).



Gambar 6.3 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2022
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II Tahun 2022

F. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja¹² didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Secara absolut

¹¹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>

¹² <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

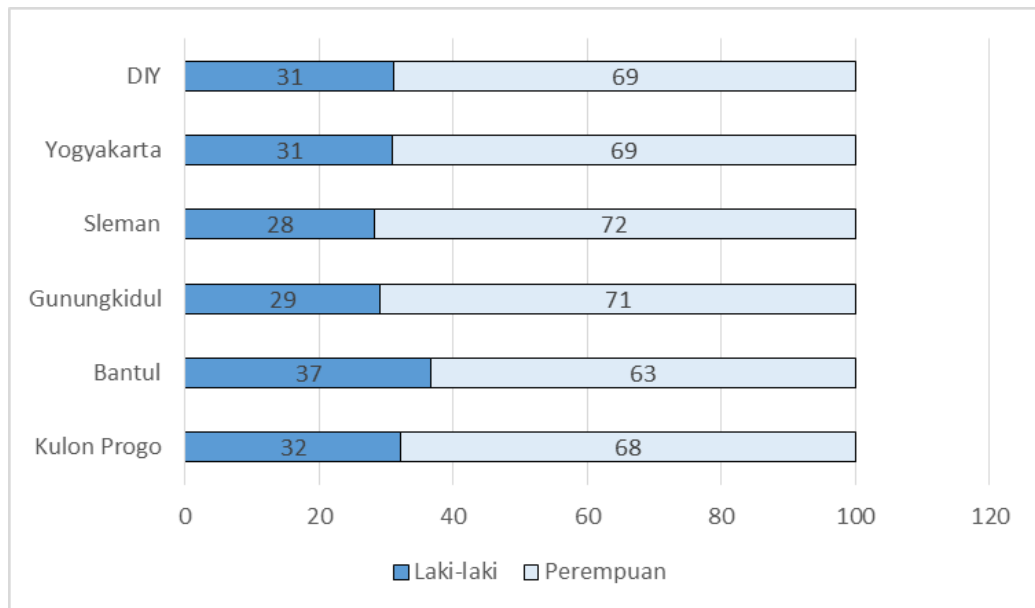
jumlah bukan angkatan kerja di DIY sebesar 986.382 jiwa (Tabel 6.4). Jumlah tersebut didominasi oleh pelajar/mahasiswa (51 persen).

Tabel 6.4.
Jumlah Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Gender
Di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022

Status	Gender	Kabupaten/Kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
Mengurus Rumah Tangga	L	0	49	29	86	2	166
	P	39.248	70.087	80.138	171.560	57.272	418.305
	L+P	39.248	70.136	80.167	171.646	57.274	418.471
Pelajar/Mahasiswa	L	27.404	72.460	43.966	81.547	37.547	262.924
	P	26.382	66.943	37.749	76.537	34.416	242.027
	L+P	53.786	139.403	81.715	158.084	71.963	504.951
Pensiunan	L	4.766	9.519	4.856	18.869	5.089	43.099
	P	2.077	4.431	1.515	8.583	3.255	19.861
	L+P	6.843	13.950	6.371	27.452	8.344	62.960
Jumlah	L	32.170	82.028	48.851	100.502	42.638	306.189
	P	67.707	141.461	119.402	256.680	94.943	680.193
	L+P	99.877	223.489	168.253	357.182	137.581	986.382

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

Pada aspek gender, pada 2022 bukan angkatan kerja didominasi oleh perempuan (Gambar 6.4). Pola ini sama jika melihat kondisi ke belakang bahwa perempuan lebih banyak dibanding laki-laki pada bukan angkatan kerja. Hal ini disebabkan perempuan banyak menyumbang pada kriteria bukan angkatan kerja mengurus rumah tangga. Berdasarkan kabupaten/kota, bukan angkatan kerja perempuan tertinggi persentasenya ada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 6.4. Persentase Bukan Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY di Tahun 2022

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022

BAB VII

SITUASI KEPENDUDUKAN SAAT RASIO KETERGANTUNGAN D.I. YOGYAKARTA DIPERKIRAKAN OPTIMAL

Bab VII merupakan bab khusus yang membahas isu penduduk di DIY. Pada tahun ini isu yang dibahas adalah mengenai kondisi kependudukan di DIY saat *dependency ratio*/ rasio ketergantungan optimal. Data dasar yang digunakan bersumber dari Administrasi Kependudukan (Admindex) Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022. Pembahasan isu ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memotret kondisi kependudukan di suatu daerah ketika rasio ketergantungan di daerah tersebut mengalami titik optimal. Gambaran tersebut menjadi informasi berharga khususnya bagi dasar kebijakan kependudukan di masa depan.

Rasio ketergantungan disebut mengalami titik optimal ketika nilai rasio ketergantungan berada di nilai paling rendah. Dalam studi demografi momentum ini biasanya hanya terjadi sekali waktu, karena setelah berada pada nilai terendah tersebut, nilai rasio ketergantungan akan naik kembali. Di Indonesia provinsi yang telah mengalami momentum tersebut adalah DKI Jakarta dan Bali. Oleh karenanya, tanpa ingin melewatkan kondisi tersebut

maka pada tahun ini gambaran kependudukan DIY ketika kondisi rasio kependudukan optimum perlu untuk dibahas.

Pembahasan pada bab ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah mengenai penjelasan umum mengenai rasio ketergantungan. Bagian kedua membahas mengenai rasio ketergantungan di Indonesia, dan posisi DIY saat ini. Ketiga membahas mengenai kondisi kependudukan di DIY saat rasio ketergantungan diperkirakan optimal. Keempat membahas implikasi dan arah kebijakan ke depan.

A. Rasio Ketergantungan: Salah Satu Indikator Penting Dalam Kependudukan

Rasio ketergantungan adalah ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk usia kerja di suatu negara atau wilayah¹³ (Swanson & Siegel, 2004). Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam struktur penduduk (Hayes, 2023). Nilai rasio ketergantungan dapat bergeser seiring bertambahnya usia populasi secara keseluruhan. Pergeseran tersebut biasanya mengikuti pola penduduk usia muda, stasioner kemudian menuju ke penduduk tua. Saat populasi berada pada penduduk muda rasio ketergantungannya akan tinggi, kemudian akan menjadi kecil ketika menuju penduduk stasioner, dan kembali tinggi rasio ketergantungannya ketika penduduknya menjadi tua.

Hayes (2023) menyatakan bahwa rasio ketergantungan yang tinggi berarti usia kerja, dan ekonomi secara keseluruhan, menghadapi beban yang lebih besar dalam mendukung populasi yang muda atau menua. Rasio ketergantungan kaum muda mencakup mereka yang berusia di bawah 15 tahun, dan rasio ketergantungan lansia berfokus pada mereka yang berusia di atas 64 tahun. Berbagai peraturan ketenagakerjaan membuat individu yang berusia kurang dari 15 tahun tidak mungkin dipekerjakan untuk penghasilan pribadi apapun. Seseorang yang berusia 64 tahun pada

¹³ <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/1119>

umumnya dianggap sebagai usia pensiun normal dan belum tentu diharapkan menjadi bagian dari angkatan kerja. Oleh karenanya penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun memenuhi syarat sebagai tanggungan karena seringkali mereka perlu menerima dukungan dari luar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hayes (2023) melanjutkan bahwa rasio ketergantungan hanya mempertimbangkan usia ketika menentukan apakah seseorang aktif secara ekonomi. Faktor-faktor lain dapat menentukan apakah seseorang aktif secara ekonomi selain usia, termasuk status sebagai pelajar, sakit atau cacat, orang tua yang tinggal di rumah, pensiun dini, dan pengangguran jangka panjang. Selain itu, beberapa orang memilih untuk terus bekerja setelah usia 64 tahun juga tidak diperhitungkan. Oleh karenanya ukuran ini merupakan ukuran kasar dalam indikator kependudukan.

Rasio ketergantungan¹⁴ yang baik adalah rasio ketergantungan yang rendah. Rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa ada cukup banyak orang dalam angkatan kerja yang dapat mendukung penduduk usia muda dan lansia. Rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa ada cukup banyak orang dalam angkatan kerja yang dapat mendukung populasi yang bergantung. Rasio ketergantungan yang lebih rendah biasanya menandakan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk orang dewasa lanjut usia serta pensiun yang lebih tinggi. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tekanan pada ekonomi karena populasi yang bergantung terlalu besar untuk ditopang oleh angkatan kerja.

Pada tahun 2021, negara dengan rasio ketergantungan terendah adalah Qatar dengan rasio 18,38. Rendahnya rasio ketergantungan ini dikarenakan tingginya migrasi dari luar yang sebagian besarnya berada pada usia produktif. Sedangkan negara dengan rasio ketergantungan tertinggi

14

<https://www.investopedia.com/terms/d/dependencyratio.asp#:~:text=A%20good%20dependency%20ratio%20is,as%20well%20as%20higher%20pensions.>

sebesar 108,92 adalah Niger. Goujon et al (2021) menyatakan bahwa Niger memiliki pertumbuhan populasi tercepat di dunia, di antara negara-negara kurang berkembang. Dengan tingkat kesuburan rata-rata di atas tujuh anak per wanita dalam dekade terakhir, pertumbuhan populasi yang cepat akan berlanjut dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan rasio ketergantungan di Niger sangat tinggi.

Heskett (2008) menyatakan bahwa rasio ketergantungan berguna sebagai indikator umum kesehatan ekonomi dan sosial di masa depan. Oleh karenanya kondisi tersebut harus dikelola dengan tepat, baik secara mikro maupun makro. Heskett (2008) melanjutkan:

“Ekonom Harvard David Bloom dan David Canning mengaitkan setidaknya sepertiga keberhasilan ekonomi suatu negara dengan rasio ketergantungan, sesuatu yang dapat diprediksi bertahun-tahun sebelumnya berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang tentang tren demografis. Misalnya, mereka memuji keberhasilan ekonomi Irlandia karena rasio ketergantungan yang sangat meningkat bersama dengan faktor-faktor lain karena memberikan penekanan kuat pada kebijakan pendidikan untuk mempersiapkannya.”

Hal tersebut juga berlaku pada pemanfaatan beban ketergantungan yang tepat, terjadi di China dan India (Heskett, 2008).

Hayes (2023) menyatakan bahwa usia adalah faktor utama yang mempengaruhi rasio ketergantungan, karena menentukan siapa yang termasuk dan tidak termasuk dalam angkatan kerja. Akan tetapi, demografi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, kebijakan imigrasi, dan kebijakan pemerintah lainnya (seperti kebijakan satu anak di China sebelumnya). Jika suatu negara dapat menarik pekerja asing, itu akan membantu menumbuhkan tenaga kerja, demikian pula jika tingkat kelahiran tinggi, maka akan ada cukup banyak individu untuk menggantikan porsi tenaga kerja yang pensiun. Faktor-faktor ini akan membantu menurunkan rasio ketergantungan.

Rasio ketergantungan yang lebih rendah sangat ideal karena menandakan lebih sedikit beban tenaga kerja dalam mendukung mereka yang tidak bekerja. Oleh karenanya bagi negara yang memiliki angka fertilitas yang rendah, dalam jangka panjang akan memiliki masalah terkait rasio beban ketergantungan ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di negara-negara di Eropa bahwa permasalahan tenaga kerja menjadi hal yang menjadi isu krusial (Bloom et al., 2009; Muszyńska & Rau, 2012). Dikaitkan dengan Indonesia, potensi seperti ini juga dimungkinkan terjadi. Secara khusus, DIY juga berpotensi memiliki masalah ini ke depan karena saat ini fertilitas di DIY merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Sedangkan di sisi lain angka beban ketergantungan di DIY juga saat ini berada pada masa optimal, dan siap mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya “membaca” beban ketergantungan sangat penting agar kebijakan kependudukan dapat secara tepat dapat diambil untuk pembangunan di masa depan.

B. Gambaran Rasio Ketergantungan di Indonesia

Rasio ketergantungan diperoleh dengan membagi jumlah usia non produktif dengan usia produktifnya. Rasio ketergantungan di Indonesia berdasarkan kondisi terbaru dapat dilihat dari publikasi terbaru dari BPS (2023). Di Indonesia, pada 2020 nilai rasio ketergantungan sebesar 44,33 (Lihat Tabel 7.1). Artinya bahwa di setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat 44 penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Berdasarkan publikasi BPS (2023) tersebut pada 2020 nampaknya merupakan nilai terendah dari rasio ketergantungan jika melihat proyeksinya sampai 2030. Artinya pada 2020 merupakan kondisi optimal dari rasio ketergantungan di Indonesia. Pada 2020 diduga merupakan periode puncak dimana penduduk usia produktif paling optimal mampu menanggung penduduk usia non produktif. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil proyeksi BPS sebelumnya yang memanfaatkan data SUPAS 2015.

Tabel 7.1.
Rasio Ketergantungan Provinsi di Indonesia dan Proyeksinya, 2020-2030

Provinsi	2020	2025	2030
Aceh	48,71	47,74	47,77
Sumatera Utara	48,33	48,75	49,26
Sumatera Barat	47,09	47,57	49,68
Riau	46,24	45,58	45,24
Jambi	44,61	45,23	46,3
Sumatera Selatan	47,09	47,19	46,42
Bengkulu	44,77	45,45	46,76
Lampung	45,87	46,77	47,41
Kep. Bangka Belitung	42,71	43,14	45,32
Kep. Riau	43,71	43,63	43,72
DKI Jakarta	39,73	40,32	42,5
Jawa Barat	42,94	43,36	45,21
Jawa Tengah	43,16	44,93	47,42
DI Yogyakarta	45,4	46,36	48,05
Jawa Timur	42,34	44,31	46,85
Banten	42,89	42,6	42,67
Bali	42,61	43,79	47,23
Nusa Tenggara Barat	48,66	48,77	47,48
Nusa Tenggara Timur	55,18	54,9	53,92
Kalimantan Barat	44,87	44,92	45,97
Kalimantan Tengah	42,46	42,61	44,79
Kalimantan Selatan	46,25	47,16	46,61
Kalimantan Timur	42,7	40,17	39,58
Kalimantan Utara	42,59	41,7	44,11
Sulawesi Utara	45,13	45,93	47,18
Sulawesi Tengah	47,24	46,59	46,47
Sulawesi Selatan	45,84	44,85	47,17
Sulawesi Tenggara	49,84	48,74	48,8
Gorontalo	44,15	43,87	46,6
Sulawesi Barat	50,78	49,11	49,52
Maluku	46,92	45,74	48,13
Maluku Utara	47,6	46,2	45,87
Papua Barat	42,24	43,09	46,22
Papua	43,41	46,75	47,16
Indonesia	44,33	45,02	46,46

Sumber: BPS, 2023

Secara umum, nilai rasio ketergantungan provinsi-provinsi di Indonesia bervariasi. Memanfaatkan data proyeksi dari BPS (2023) kita akan mampu mengetahui apakah nilai rasio ketergantungan telah mencapai nilai optimal atau belum. Nilai optimal yang digambarkan nilai rasio ketergantungan terendah diblok dengan warna biru (Lihat Tabel 7.1). Setelah rasio ketergantungan mengalami nilai optimal, biasanya nilainya akan mengalami kenaikan. Oleh karenanya memahami kondisi kependudukan dimana masa periode rasio ketergantungan berada pada periode optimal merupakan informasi yang sangat penting. Gambarannya akan mampu digunakan untuk dasar pertimbangan kebijakan kependudukan apa yang akan dilakukan ke depan.

C. Kondisi Kependudukan di DIY Saat Rasio Ketergantungan Diperkirakan Optimal

Kondisi kependudukan di DIY secara umum dapat dilihat dari beberapa parameter kunci kependudukan. Pada aspek kuantitas dapat diwakili dari jumlah penduduk total, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dan rasio jenis kelamin. Pada aspek struktur penduduk dapat dilihat dari komposisi umur antara penduduk usia produktif dan usia nonproduktif. Dari struktur itu kemudian dapat dilihat rasio ketergantungannya. Selain itu indikator kepadatan penduduk juga penting untuk dilihat, indikator tersebut nantinya dapat digunakan untuk menghitung daya dukung lingkungan. Indikator berikutnya adalah fertilitas yang diwakili oleh TFR dan mortalitas yang diwakili oleh angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Pada aspek kualitas dilihat kualitas penduduk dari aspek pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada aspek pendidikan diwakili oleh indikator persentase penduduk yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas. Sedangkan ketenagakerjaan akan diwakili oleh TPAK. Secara rinci berikut adalah kondisi kependudukan di DIY saat rasio ketergantungan diperkirakan optimal.

Rasio ketergantungan saat optimal ditandai dengan nilainya yang terendah selama periode kependudukan tertentu. Tidak ada patokan nilai terendah dari rasio ketergantungan yang dialami oleh suatu wilayah, karena kondisinya berbeda antara satu wilayah dengan lainnya. Pada tabel 6.4 misalnya, di Indonesia dengan banyak provinsi memiliki periode waktu yang berbeda-beda ketika rasio ketergantungannya berada pada titik terendah. Melihat Tabel 7.1, sebagai contoh di Kepulauan Riau, diperkirakan nilai terendah ada di sekitar tahun 2025 sekitar 43,63 adalah nilai optimum rasio ketergantungannya, kemudian setelahnya diperkirakan nilainya naik. Di DKI Jakarta nilai optimal rasio ketergantungannya ada dinilai kurang dari 40 dan diperkirakan telah terjadi sebelum 2020. Tetapi di negara lain, di Qatar misalnya, nilai optimumnya ada di nilai 17¹⁵ pada sekitar 2009-2010, sebuah nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan Indonesia.

Berdasarkan Tabel 7.2, kondisi optimal rasio ketergantungan di DIY ada pada periode 2020-2022. Hal itu disimpulkan dari kondisi dimana rasio ketergantungan ada pada nilai terendah. Sebelum tahun 2020, nilainya ada pada angka 46, sedangkan mulai 2020 nilainya turun menjadi sekitar 45. Oleh karenanya potret kependudukan pada periode 2020-2022 ini penting untuk dibahas.

Jumlah penduduk di DIY pada periode 2020-2022 memiliki pola naik (Tabel 7.2). Melihat proses demografi, nilai fertilitas dan mortalitas pada 2022 menjadi faktor yang menjadikan jumlah penduduknya mengalami peningkatan. Tetapi salah satu faktor yang menjadi penyebab terus naiknya jumlah penduduk di DIY adalah migrasi netto yang positif (Lihat publikasi Biro tapem DIY, 2020-2021 dan Gambar 4.6 dan 4.7 pada laporan ini). Oleh karenanya proses migrasi di DIY menjadi faktor penting dan berperan dalam meningkatkan jumlah penduduk. Kondisi kependudukan pada periode 2020-2022 ini adalah semakin rendahnya persentase laki-laki dibanding dengan

¹⁵ <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=QA>

perempuan di DIY. Hal ini dilihat dari pola menurunnya rasio jenis kelamin di DIY, dari 98,21 menjadi 97,96.

Tabel 7.2.

Indikator Kunci Parameter Kependudukan DIY, 2020-2022

Parameter	Tahun		
	2020	2021	2022
PENDUDUK			
Laki-laki (jiwa)	1.819.057	1.820.400	1.827.924
Perempuan (jiwa)	1.852.132	1.857.046	1.865.910
Total (jiwa)	3.671.189	3.677.446	3.693.834
<i>Sex Ratio</i>	98,21	98,03	97,96
Komposisi Umur (%)			
0-14	20,40	20,32	20,14
15-64	68,90	68,93	68,88
65+	10,70	10,75	10,98
DR	45,14	45,07	45,18
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.152	1.154	1.159
FERTILITAS			
TFR	1,7	1,5	1,9
MORTALITAS			
Angka Kematian Bayi	6	6	2
Angka Kematian Ibu	97	339	87
PENDIDIKAN			
Pendidikan Terakhir SMA Ke Atas (%)	38,83	39,34	40,05
KETENAGAKERJAAN			
TPAK	78,26	108,22	119,58
	68,88	68,52	67,2

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2020-2022

Komposisi umur penduduk di DIY mengalami perubahan pada periode 2020-2022. Pada Tabel 7.2 diketahui bahwa struktur penduduk tua mengalami kenaikan. Pada 2020 persentase penduduk usia tua sebesar 10,7 persen, kemudian terus naik menjadi 10,98 pada 2022. Pada usia muda menalami penurunan pada 2020-2022. Sedangkan pada usia produktif setelah mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, nilainya mengalami

penurunan pada 2022. Konsekuensi turunnya usia produktif ini yang menyebabkan rasio kependudukan telah melewati masa optimalnya.

Kondisi fertilitas pada 2020-2020 mengalami fluktuasi. Pada 2020 nilainya 1,7 dan kemudian turun menjadi 1,5 pada 2021 dan kemudian naik lagi menjadi 1,9 pada 2022. Sedangkan untuk kondisi mortalitasnya juga mengalami dinamika perubahan nilai. Baik fertilitas atau mortalitasnya, perubahan nilai yang terjadi diduga ada hubungannya dengan Covid-19.

Kondisi pendidikan di DIY tergolong sangat baik. Hal ini dilihat dari terus naiknya persentase pendidikan penduduk yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas. Pada 2022 persentasenya sudah mencapai 40,05 persen. Sedangkan untuk TPAK, nilainya mengalami penurunan dari 2020 ke 2022. Diduga kuat ada hubungan antara naiknya pendidikan terakhir dengan nilai TPAK yang menurun. Hubungan tersebut adalah adanya dugaan bahwa penduduk usia kerja di DIY memilih untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya sehingga menambah lama waktu penduduk usia kerja ini untuk sekolah, dan berefek pada angkatan kerja yang menjadi semakin kecil.

D. Implikasi dan Arah Kebijakan

Simon et al (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator penting dari struktur usia adalah apa yang disebut sebagai rasio ketergantungan, yaitu rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja, biasanya berusia 15-65 tahun. Rasio ketergantungan yang rendah diinginkan karena menunjukkan bahwa secara proporsional terdapat lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat menghidupi penduduk muda dan lansia.

Bloom et al (2009) dalam kajiannya di Eropa menunjukkan bahwa perubahan proses demografi pada dinamika kependudukan berefek pada rasio ketergantungan. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat kesuburan yang terjadi di Eropa menurunkan rasio ketergantungan kaum muda dan meningkatkan pangsa usia kerja, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, dalam jangka panjang, beban ketergantungan pada usia tua

mendominasi penurunan ketergantungan kaum muda, dan tingkat kesuburan yang rendah akan menyebabkan pangsa usia kerja yang kecil tanpa adanya arus migrasi yang besar. Kondisi ini juga bisa terjadi di DIY mengingat fertilitas di DIY berada di bawah posisi kondisi ideal penduduk tumbuh seimbang. Migrasi masuk di DIY juga menunjukkan migrasi netto yang positif. Oleh karenanya seperti yang diungkapkan Bloom et al. (2009) bahwa rendahnya fertilitas perlu mendapatkan perhatian karena akan menimbulkan implikasi dan kebijakan yang tepat perlu dilakukan.

Bidisha et al. (2020) mengungkapkan bahwa struktur penduduk suatu wilayah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pertumbuhannya. Karena komposisi demografis yang berubah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jika dilengkapi dengan kebijakan publik yang efektif. Selain itu, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari populasi usia kerja sambil meningkatkan investasi, penting untuk melibatkan mereka dalam kegiatan produktif yang meningkatkan pertumbuhan dan menumbuhkan investasi dalam penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan gambaran dari kondisi kependudukan di DIY disimpulkan bahwa, dari data yang tersedia, periode 2020-2022 merupakan periode optimal dari rasio ketergantungan di DIY. Dari tiga tahun tersebut, nilai terendah pada 2021 yang memiliki arti bahwa kondisi paling optimal untuk rasio ketergantungan di DIY terjadi saat itu pada 2021. Momentum ini sayangnya belum dioptimalkan oleh DIY. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Pada 2022, momentum ini telah terlewat dimana rasio ketergantungan di DIY mengalami kenaikan kembali. Meskipun demikian, dengan melihat beberapa indikator kunci kependudukan di DIY ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi catatan, agar momentum rasio ketergantungan optimal yang telah terlewat dapat diperbaiki. Di antara catatan tersebut berisi implikasi dan arah kebijakan, antara lain:

1.) Fertilitas DIY mengalami dinamika naik turun pada 2020-2021.

Fertilitas di DIY dapat diwakili oleh indikator TFR yang dihitung dari angka kelahiran total. Pada 2021 nilai TFR turun tetapi pada 2022 nilainya mengalami kenaikan dari 1,5 menjadi 1,9. Hal ini mengindikasikan bahwa fertilitas di DIY masih dapat naik atau turun. Oleh karenanya pemerintah DIY dapat memilih antara dua pilihan. Pertama intervensi untuk menaikkan TFR sampai ke kondisi ideal, yang ditandai dengan nilai TFR 2,1. Kedua adalah menjaga agar nilai TFR DIY tetap di angka kurang dari 2,1.

Implikasi dari dua intervensi tersebut adalah jika nilai TFR dipertahankan di bawah 2,1 implikasinya jumlah penduduk usia muda akan berkurang dan ke depan isu ketersediaan angkatan kerja menjadi dampak ikutannya. Turunnya jumlah relatif orang yang bekerja dalam suatu populasi juga berdampak negatif pada jalur pertumbuhan ekonomi. Caldwell, Caldwell and McDonald (2002) menyatakan bahwa nilai TFR 1,5-1,7 berada pada kategori fertilitas moderat rendah (*moderately low fertility*), dimana nilai tersebut tergolong kurang ideal untuk mencapai *replacement level of fertility*¹⁶. Gubhaju & Moriki-Durand (2003), dalam studinya di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, menjelaskan bahwa implikasi dari nilai TFR di bawah *replacement level* antara lain akan menimbulkan penuaan penduduk, kekurangan tenaga kerja, peningkatan rasio ketergantungan lansia, dan feminisasi pada kelompok usia tua/lansia.

Di sisi lain, jika diarahkan untuk mencapai TFR 2,1 implikasinya bagi DIY adalah dalam jangka pendek penambahan jumlah penduduk akan menjadi lebih besar jika migrasi masuk tidak dikendalikan. Akibatnya kepadatan penduduk menjadi lebih tinggi dan tekanan penduduk juga meningkat. Dalam jangka panjang jika migrasi dikendalikan maka diprediksi rasio ketergantungan akan turun lagi dan harapannya jendela kesempatan kedua akan bisa terulang.

¹⁶ <https://www.wri.org/research/achieving-replacement-level-fertility>

Kebijakan yang diambil mengikuti arah intervensi apakah kebijakan yang diambil akan mempertahankan TFR di angka kurang dari 2,1 atau akan mengarah untuk mencapai TFR 2,1 menuju penduduk tumbuh seimbang. Kebijakannya akan seputar program pengendalian penduduk dan KB serta kebijakan pengendalian migrasi di DIY. Hal ini ke depan harus menjadi kajian yang penting di DIY. Jika intervensi yang dipilih adalah menjaga TFR tetap di bawah angka 2,1 maka contoh kebijakan yang diambil dapat berupa penguatan kembali program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di DIY misalnya mempertahankan capaian mCPR DIY tetap tinggi, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan di DIY atau menekan *unmet need* di DIY agar nilainya terus turun. Kebijakan lain yang dapat diambil untuk melawan risiko perubahan demografis akibat rendahnya fertilitas adalah dengan meningkatkan migrasi masuk yang spesifik di usia produktif. Sedangkan jika intervensi yang dipilih adalah meningkatkan TFR untuk menuju penduduk tumbuh seimbang maka kebijakan program pengendalian penduduk dan KB dapat dilaksanakan lebih longgar di DIY dalam periode tertentu. Dari sisi migrasi, di jangka panjang, kebijakan yang diambil adalah mengendalikan migrasi masuk ke DIY.

2.) Persentase lansia di DIY senantiasa naik dari 2020 ke 2022.

Kenaikan lansia di DIY harus menjadi isu prioritas ke depan. Data BPS (2003) bahkan memproyeksikan pada 2045 persentase lansia di DIY mencapai 18,44 persen. Persentase yang sangat besar tersebut perlu disiapkan agar tidak menjadi permasalahan baru di masa yang akan datang. Kenaikan lansia ini oleh Gubhaju & Moriki-Durand (2003) merupakan salah satu implikasi dari rendahnya fertilitas di suatu wilayah. Implikasi tersebut telah dirasakan DIY saat ini, dan prediksinya jika tidak segera diintervensi jumlah dan persentase lansia akan terus naik.

Implikasi dari persentase lansia yang tinggi akan berdampak pada beberapa aspek. Pertama dari sisi ketenagakerjaan. Penduduk yang telah berusia lansia secara produktivitas akan lebih rendah daripada usia

produktif. Penurunan produktivitas ini akan sedikit banyak memengaruhi aspek ekonomi. Kedua, Simon et al. (2012) menjelaskan bahwa beban ketergantungan yang tinggi di usia lansia juga akan berimplikasi pada sistem perawatan kesehatan dan skema bagi para pensiun.

Kebijakan yang dapat diambil adalah menyiapkan jenis pekerjaan yang tepat bagi lansia di DIY. Hal ini terkait budaya di DIY bahwa lansia di DIY bukanlah tipe lansia yang benar-benar pensiun di pasar kerja. Lansia di DIY merupakan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas yang tetap terus bekerja sampai batas fisik benar-benar menghalangi mereka untuk bekerja. Dengan persentasenya yang besar, jenis pekerjaan yang tepat perlu dikaji dan diuji agar lansia di DIY bekerja dengan produktivitas yang juga tetap terjaga. Melihat sumber daya alam yang tersedia, pekerjaan di sektor pertanian masih menjanjikan peluang.

Kebijakan di bidang perawatan kesehatan lansia juga menjadi penting. Lansia merupakan individu dengan tingkat kerentanan yang tinggi di aspek kesehatannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan program pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan bagi lansia. Program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang sudah terkondisikan di DIY perlu terus ditambah jumlahnya dan programnya juga perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Perawatan di rumah serta kebutuhan pengasuh/pelaku rawat informal atau profesional juga perlu mendapatkan perhatian. Hal ini untuk memastikan bahwa lanjut usia yang tidak sepenuhnya mampu merawat diri sendiri dapat menjaga kualitas tertinggi kehidupannya. Selain itu beberapa kebijakan yang masuk di Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia 2019 juga perlu dikuatkan kembali di DIY. Beberapa kebijakan yang dimaksud antara lain:

- a. Memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia.

- b. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lanjut usia.
- c. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa dan pihak terkait lainnya.
- d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia.
- e. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia.
- f. Meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Kesimpulan

Profil Perkembangan Kependudukan DIY 2022 memuat lima pembahasan pokok. Profil ini menggunakan data dari Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022 dan data dari instansi lain sebagai pendukungnya. Lima pembahasan pokok tersebut berisi 1.) jumlah komposisi penduduk dan struktur keluarga, 2.) kelahiran, kematian, penduduk datang dan pergi, 3.) kondisi pendidikan, d.) kondisi ketenagakerjaan, dan e.) isu khusus yang mengambil tema kondisi kependudukan saat rasio ketergantungan di DIY diperkirakan optimal. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain dideskripsikan sebagai berikut.

Pertama tentang jumlah, komposisi penduduk dan struktur keluarga. Jumlah penduduk DIY pada 2022 sebesar 3.693.834 jiwa, naik sebanyak 16.388 jiwa dari jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan penduduknya, pada 2021-2022 pertumbuhan penduduk di DIY sebesar 0,43 persen.

Penduduk DIY memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.159,46 jiwa/km. Kepadatan penduduk tertinggi ada di kota Yogya (12.701,45 jiwa/km) terendah di Gunungkidul (521,92 jiwa/km). Dari aspek persebaran, persebaran penduduk di DIY paling banyak terkonsentrasi di Kab Sleman dan Bantul.

Komposisi penduduk DIY dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin, median umur penduduk dan rasio ketergantungan. Nilai rasio jenis kelamin Provinsi DIY pada tahun 2022 sebesar 97,96 persen yang mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya bahwa penduduk di DIY didominasi oleh perempuan, dan cenderung mengalami kenaikan penduduk perempuannya jika dilihat dari tahun sebelumnya. Umur median penduduk DIY pada 4 tahun terakhir adalah 36 tahun. Umur median tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul (nilainya 39 tahun) dan umur median terendah berada di Kota Yogyakarta (nilainya 35 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk DIY didominasi oleh penduduk di masa *prime age*. Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari rasio beban tanggungan. Rasio ketergantungan di Provinsi DIY pada tahun 2022 sebesar 45 persen artinya 100 penduduk usia produktif di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 45 penduduk usia non produktif, 29 diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 16 lainnya berasal dari kelompok usia lanjut.

Struktur penduduk di DIY dapat dilihat dari piramida penduduknya. Piramida penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tiap kabupaten/kota nya termasuk kedalam jenis piramida penduduk stasioner, mengarah ke piramida tua. Berdasarkan struktur keluarga, jumlah kepala keluarga di DIY pada tahun 2022 berjumlah 1.280.297 yang mengalami peningkatan sebanyak 20.079 kepala keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kabupaten/kota, tampak bahwa Kabupaten Sleman memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak yakni 382.525 orang, sedangkan Kota Yogyakarta memiliki jumlah kepala keluarga terendah sebanyak 142.871 orang. Mayoritas kepala keluarga di DIY adalah laki-laki, meskipun persentasenya menurun dari tahun sebelumnya dari 79,8 di tahun 2021 menjadi 79,58 di tahun 2022.

Status perkawinan di DIY sebagian besar didominasi oleh mereka yang sudah menikah dengan persentase sebesar 51,37 persen. Sisanya

sebanyak 40,39 persen adalah penduduk yang belum kawin. Sedangkan penduduk yang bercerai mati sebesar 6,37 persen dan yang bercerai hidup sebesar 1,87 persen. Berdasarkan gender, persentase penduduk laki-laki belum kawin lebih tinggi daripada penduduk perempuan di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Akta perkawinan dimiliki oleh 82,24 persen penduduk DIY yang mengalami peningkatan 6,32 persen dari tahun lalu. Berdasarkan gender, kepemilikan akta pernikahan didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 782.506 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan yang sudah menikah namun belum memiliki akta pernikahan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 178.154 perempuan.

Tambahan pembahasan di laporan 2022 ini adalah membahas tentang penduduk penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di DIY sebanyak 15.747 penduduk atau sekitar 0,43% dari populasi penduduk DIY. Penyandang disabilitas di DIY didominasi oleh penyandang disabilitas mental mencapai 8.582 jiwa, terbanyak ada di Kabupaten Bantul sebanyak 1.488 jiwa.

Kedua membahas kelahiran, kematian, penduduk datang dan pindah, dimana membahas aspek komponen kualitas penduduk kelahiran (angka kelahiran total), kematian (bayi dan ibu), penduduk datang dan pindah dari dan ke DIY. Pada aspek kelahiran, jumlah kelahiran di DIY pada 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada indikator TFR, nilainya pada 2022 mencapai 1,9 naik dari tahun sebelumnya dengan nilai TFR sebesar 1,5 pada 2021. Kenaikan nilai TFR pada 2022 di DIY ini menarik untuk dibahas karena diduga pandemi memberikan efek bagi fertilitas di DIY. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan kondisi tersebut bahwa pandemi menyebabkan fertilitas naik. Pada aspek kematian, angka kematian bayi dan angka kematian ibu turun drastis dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena sudah terkendalinya Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab angka kematian bayi dan ibu pada tahun 2021.

Penduduk datang dan pindah di DIY, secara umum gerak penduduk yang pergi antarprovinsi dan antarkabupaten/kota pada 2022 menunjukkan penambahan jika dibandingkan tahun 2021. Pada penduduk datang, pola yang sama juga terjadi bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk yang datang di DIY baik penduduk yang datang antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota. Kenaikan ini terjadi di semua kabupaten/kota di DIY, kecuali Kabupaten Gunungkidul.

Aspek lainnya yang juga dibahas adalah tentang capaian akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran di DIY meningkat menjadi 61 persen dari total penduduk. Pertumbuhannya jika dihitung antara 2021 ke 2022 sebesar 2,83 persen. Jika progres pertumbuhannya konstan, sampai 2030 nilainya dihitung sekitar 75 persen. Artinya jika dengan pertumbuhan yang konstan seperti pada 2021-2022, target SDGs 2030 yakni seluruh penduduk memiliki akta kelahiran tidak akan tercapai. Oleh karenanya melihat capaian dua tahun ini disimpulkan bahwa perlu ada langkah percepatan agar kepemilikan akta kelahiran di DIY dapat sesuai target SDGs.

Ketiga adalah profil pendidikan di DIY yang dapat dilihat dari struktur pendidikan terakhir penduduk. Penduduk DIY pada tahun 2022 didominasi oleh jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 1.032.074 penduduk. Persentase penduduk dengan pendidikan terakhir SMA sebesar 40,05 persen naik sebesar 0,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY hal ini dikarenakan mencapai 52 persen penduduknya memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA/ sederajat ke atas. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul tingkat pendidikannya masih rendah yang ditunjukkan dari persentase tertinggi pada jenjang pendidikan SMP ke bawah, dengan persentase sebesar 78,25 persen. Pola struktur pendidikan penduduk di DIY menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki pada hampir seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SMP/Sederajat, SMA/Sederajat,

Strata II, dan Strata III, di Provinsi DIY didominasi oleh penduduk laki-laki sedangkan pada jenjang lainnya yakni SD/Sederajat kebawah, Diploma I/II, Akdemi/DIII/S.Muda, dan Diploma IV/Strata I didominasi oleh perempuan.

Profil kependudukan di DIY juga dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah. Nilai Angka Partisipasi Kasar di Provinsi DIY mengalami peningkatan di setiap jenjang pendidikan dari tahun 2021 hingga 2022 yang nilainya berada diatas 95% atau diatas target yang menunjukkan terjadinya keberhasilan kebijakan wajib belajar di Provinsi DIY. Perkembangan Angka Partisipasi Murni dalam 2 tahun terakhir pada hampir tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan pada tiap jenjang pendidikan. Capaian APM untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir berada pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masing-masing turun sebanyak 3,09 persen, 0,63 persen dan 2,39 persen.

Kasus putus sekolah juga menjadi isu menarik, jJumlah putus sekolah tertinggi di Provinsi DIY pada tahun 2022 berada di jenjang pendidikan SD dan SMK dengan nilai masing-masing mencapai 324 dan 319 penduduk. Kenaikan jumlah putus sekolah terbanyak dibandingkan tahun sebelumnya berada di Kabupaten Sleman sebanyak 279 siswa. Sedangkan penurunan jumlah putus sekolah tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya berada di Kabupaten Bantul sebanyak 284 siswa. Jumlah putus sekolah di Provinsi DIY tahun 2022 lebih tinggi pada siswa perempuan sebanyak 512 sedangkan siswa laki-laki sebanyak 394.

Keempat adalah ketenagakerjaan di DIY yang menelaah kondisi ketenagakerjaan, mencakup angkatan kerja, angkatan kerja yang bekerja, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka. Pada 2022 jumlah angkatan kerja di DIY sebesar 2.949.992 jiwa. Jumlah ini naik 18.121 jiwa dibandingkan jumlah pada tahun 2021. Penambahan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi ekonomi tambahan tenaga kerja

ini tentu diharapkan memiliki efek positif bagi pembangunan. Berdasarkan gender, angkatan kerja di DIY pada 2022 didominasi oleh perempuan.

Angkatan kerja di DIY 93,5 persen adalah penduduk yang bekerja. Sebagian besar penduduk di DIY bekerja sebagai karyawan swasta, tukang/buruh berkeahlian khusus dan di sektor pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan. Pola ini sama dengan jenis pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya. Angkatan kerja didominasi oleh angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Persentasenya sebesar 34,3 persen dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Diduga kuat hal ini berkaitan dengan gambaran banyaknya penduduk yang bekerja di jenis pekerjaan karyawan swasta atau wiraswasta. Jika dilihat pada angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat ke atas persentasenya sebesar 49,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2022, angkatan kerja yang tersedia di DIY hampir setengahnya adalah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi/ SMA ke atas. Bahkan kualifikasi angkatan kerja dengan jenjang pendidikan S1 sampai S3 sebanyak 10,9 persen dari total angkatan kerja yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY pada 2022 sebesar 67,19 persen. Berdasarkan kabupaten/kota, nilai TPAK tertinggi ada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan buruh/tukang dengan keahlian khusus yang tidak mengenal pensiun diduga kuat menjadi penyebab tetap tingginya nilai TPAK di ketiga kabupaten tersebut. Sementara itu di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi yang terendah nilai TPAK nya. Tingginya penduduk yang berstatus sekolah dan mengurus rumah tangga menyebabkan nilai TPAK di keduanya menjadi lebih rendah.

Aspek ketenagakerjaan lain yang dideskripsikan adalah angka pengangguran. Pada 2022 pengangguran terbuka di DIY sebesar 6,47. Artinya bahwa dari 100 angkatan kerja ada sekitar 6 orang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan kabupaten/kota, nilai

pengangguran terbuka paling rendah ada di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan yang tertinggi ada di Kota Yogyakarta dengan nilai 9,17 persen.

Terakhir adalah tentang Situasi Kependudukan Saat Rasio Ketergantungan DIY Diperkirakan Optimal. Rasio ketergantungan saat optimal ditandai dengan nilainya yang terendah selama periode kependudukan tertentu. Kondisi optimal rasio ketergantungan di DIY ada pada periode 2020-2022. Hal itu disimpulkan dari kondisi dimana rasio ketergantungan ada pada nilai terendah. Sebelum tahun 2020, nilainya ada pada angka 46, sedangkan mulai 2020 nilainya turun menjadi sekitar 45. Oleh karenanya potret kependudukan pada periode 2020-2022 ini penting untuk dibahas.

Situasi kependudukan saat rasio ketergantungan optimal dapat dilihat dari beberapa indikator kunci seperti jumlah penduduk, TFR, angka kematian bayi dan angka kematian ibu, persentase penduduk yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas dan TPAK. Jumlah penduduk di DIY pada periode 2020-2022 memiliki pola naik. Melihat proses demografinya, kenaikan jumlah tersebut disumbang oleh nilai fertilitas (TFR yang naik) dan mortalitas (angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang turun) pada 2022, selain migrasi netto yang terus positif. Situasi kependudukan dari kondisi pendidikan di DIY tergolong sangat baik. Hal ini dilihat dari terus naiknya persentase pendidikan penduduk yang berpendidikan SMA/ sederajat ke atas. Pada 2022 persentasenya sudah mencapai 40,05 persen. Sedangkan untuk TPAK, nilainya stabil di angka lebih dari 60 persen ke atas.

Dua isu besar yang perlu mendapat perhatian melihat situasi kependudukan di DIY saat rasio ketergantungan optimal adalah terkait fertilitas DIY mengalami dinamika naik turun pada 2020-2022 dan terus naiknya lansia di DIY. Pada isu pertama disimpulkan bahwa naik turunnya TFR di DIY pada 2020-2022 membuka kesempatan pelaksanaan dua skenario antara intervensi untuk menaikkan TFR sampai ke kondisi ideal (TFR 2,1)

atau menjaga agar nilai TFR DIY tetap di angka kurang dari 2,1. Implikasinya jika dipertahankan nilai TFR nya di angka kurang dari 2,1 adalah terjadinya penuaan penduduk, kekurangan tenaga kerja, peningkatan rasio ketergantungan lansia, dan feminisasi pada kelompok usia tua/lansia. Sedangkan jika diarahkan untuk mencapai TFR 2,1 implikasinya adalah dalam jangka pendek pertambahan jumlah penduduk akan menjadi lebih besar jika migrasi masuk tidak dikendalikan. Akibatnya kepadatan penduduk menjadi lebih tinggi dan tekanan penduduk juga menjadi meningkat. Dalam jangka panjang jika migrasi dikendalikan maka diprediksi rasio ketergantungan akan turun lagi dan harapannya jendela kesempatan kedua akan bisa terulang. Kebijakan untuk isu ini adalah intervensi di program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Kebijakan lain yang dapat diambil adalah dengan mengendalikan migrasi masuk di DIY.

Isu kedua adalah terkait persentase lansia di DIY senantiasa naik dari 2020 ke 2022 dan diprediksi terus naik sampai 2045. Implikasi dari persentase lansia yang tinggi akan berdampak sisi ketenagakerjaan, sistem perawatan kesehatan dan skema bagi para pensiun. Kebijakan yang dapat diambil di sisi ketenagakerjaan adalah menyiapkan jenis pekerjaan yang tepat bagi lansia di DIY. Kebijakan di bidang perawatan kesehatan lansia dan pensiun adalah a.) memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, b.) meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan lanjut usia, c.) membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia lintas program dan lintas sektor, d.) meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, e.) meningkatkan upaya peningkatan kesehatan lanjut usia, dan f.) meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- AbouZahr, C., Mathenge, G., Brøndsted Sejersen, T., & Macfarlane, S. B. (2019). Civil Registration and Vital Statistics: A Unique Source of Data for Policy. *The Palgrave Handbook of Global Health Data Methods for Policy and Practice*, 125-144.
- Anser, M.K., Yousaf, Z., Khan, M.A. et al. The impacts of COVID-19 measures on global environment and fertility rate: double coincidence. *Air Qual Atmos Health* 13, 1083–1092 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11869-020-00865-z>
- Asikin, M. (2023). *Grand Design Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*. Disampaikan pada: launching Review GDPK DIY tahun 2023-2045 pada 24 Juli 2023. Yogyakarta: BKKBN.
- Azanella, L. A. (2020). *BKKBN Memprediksi Angka Kehamilan Melonjak Selama Pandemi Corona, Ini Alasannya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/09/150000965/bkkbn-memprediksi-angka-kehamilan-melonjak-selama-pandemi-corona-ini?page=all>.
- Bappeda DIY. (2021). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2020*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bappeda DIY
- Bappeda DIY. (2022). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2021*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bappeda DIY

- Beltekian, E. (2018). *Why do Women Live Longer than Men?* Oxford Martin School. Diakses pada 07 September 2022, dari <https://ourworldindata.org/why-do-women-live-longer-than-men>
- Berlian, N. (2011). Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17. (1)
- Berrington, A., Ellison, J., Kuang, B., Vasireddy, S. and Hill, K. (2021) Recent trends in UK fertility and potential impacts of COVID-19. *CPC Working Paper*, 95. ESRC Centre for Population Change 45pp.
- Bidisha, S. H., Abdullah, S. M., Siddiqua, S., & Islam, M. M. (2020). How does dependency ratio affect economic growth in the long run? Evidence from selected Asian countries. *The Journal of Developing Areas*, 54(2).
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2019). *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2018*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2020). *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2019*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2021). *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2020*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- Bloom, D. E., Canning, D., Fink, G., & Finlay, J. E. (2009). *The cost of low fertility in Europe* (No. w14820). National Bureau Of Economic Research.
- BPS. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS. ISBN : 978-602-438-521-7
- BPS DIY. (2023). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2023*. Yogyakarta: BPS DI Yogyakarta. ISSN / ISBN : 2657-1218
- BPS Kabupaten Sleman. (2022). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*. BPS DIY.

- Choi, S. (2012). The effects of student-teaching applied reflective journal writing on pre-service special education teachers' teacher efficacy. *Special Education Research*, 11(1), 107. <https://doi.org/10.18541/ser.2012.02.11.1.107>
- Cohen, P. N. (2021). *Baby Bust: Falling Fertility in US Counties Is Associated with COVID-19 Prevalence and Mobility Reductions*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/qwxz3>
- Caldwell, J., Caldwell, P., & McDonald, P. (2002). Policy Responses To Low Fertility And Its Consequences: A Global Survey. *Journal of Population Research*, 19(1), 1-24. Retrieved July 31, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/41110736>
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. (2022). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2021*. Kota Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. (2022). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021*. Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. (2022). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021*. Wonosari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
- Dinas Kesehatan D. I. Yogyakarta. (2023). *Profil Kesehatan D. I. Yogyakarta Tahun 2022*. Yogyakarta: Dinas Kesehatan D. I. Yogyakarta
- Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY. (2022). *Rancangan Akhir RENSTRA 2022-2027 Rencana Strategis*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Febriasih, H. B. (2008). *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averoes Press.

- Goujon, A., Marois, G. & Sabourin, P. Deriving Niger's Demographic and Education Future to 2062 with Stakeholders: Which Results?. *Popul Res Policy Rev* 40, 617–627 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11113-020-09582-y>
- Gubhaju, B., & Moriki-Durand, Y. (2003). Below-Replacement Fertility In East And Southeast Asia: Consequences And Policy Responses. *Journal of Population Research*, 20(1), 1-18. Retrieved July 31, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/41110756>
- Jatti, A., Rakhmatika, M., Fadli, M.M., Jami, U.A., Listyaningsih, U., dan Alfana, A.F. (2020). *Analisis Kualitas Penduduk Berdasarkan Indikator Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2011 – 2013*. Diterima dari <https://www.researchgate.net/>
- Hayes, A. (2023). *What Is the Dependency Ratio, and How Do You Calculate It?* Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/d/dependencyratio.asp#:~:text=A%20good%20dependency%20ratio%20is,as%20well%20as%20higher%20pensions.>
- Heskett, J. (2006). How Do We Respond to the “Dependency Ratio” Dilemma?. *Harvard Business School Working Knowledge*, 18.
- Kelly, M., Mathenge, G., & Rao, C. (2021). Lessons learnt and pathways forward for national civil registration and vital statistics systems after the COVID-19 pandemic. *Journal of epidemiology and global health*, 11(3), 262.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI.
- Koc, N dan Celik, B. (2015). The Impact of Number of Students per Teacher on Student Achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177: 65 – 70

- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. (2010). *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lundquist, J. H., Anderton, D. L., and Yaukey, D. (2015). *DEMOGRAPHY The Study of Human Population (Fourth Edition)*. Illionis: Waveland Press, Inc.
- Luppi, F., Arpino, B., & Rosina, A. (2020). The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain, and the United Kingdom. *Demographic Research*, 43, 1399-1412. Retrieved June 30, 2021, from <https://www.jstor.org/stable/26967844>
- Mantra. I. B. (2004). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mikkelsen, L., Phillips, D. E., AbouZahr, C., Setel, P. W., De Savigny, D., Lozano, R., & Lopez, A. D. (2015). A global assessment of civil registration and vital statistics systems: monitoring data quality and progress. *The Lancet*, 386(10001), 1395-1406.
- Mills, S., Abouzahr, C., Kim, J., Rassekh, B. M., & Sarpong, D. (2017). *Civil Registration And Vital Statistics For Monitoring The Sustainable Development Goals*. The World Bank
- Mondal, M.N.I. and Shitan, M. (2014) Relative Importance of Factors on Life Expectancy in the Low and Lower Middle Income Countries. *Journal of Epidemiology*, 24, 117-124. <http://dx.doi.org/10.2188/jea.JE20130059>
- Muszyńska, M.M. & Rau, R. (2012). The Old-Age Healthy Dependency Ratio in Europe. *Population Ageing* 5, 151-162. <https://doi.org/10.1007/s12062-012-9068-6>
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022)*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Perwita, D dan Widuri, R. (2023). Telaah pendidikan: preferensi orang tua memilih sekolah swasta daripada sekolah Negeri. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan pembelajarannya*, 11 (1): 64-75
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur. *In Forum Ekonomi*, Vol. 18, No. 1.
- Safira, N dan Wibowo, Y. (2021). Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pakar Pendidikan*, 219 (2): 101-115
- Samosir, B dan Rajagukguk, W. (2015). *Demografi Formal*. Penerbit UKI Press.
- Setel, P., AbouZahr, K., Karpati, A., & Bratschi, M. (2018). Civil Registration and Vital Statistics (CRVS), and the Sustainable Development Goals (SDGs). In *International Conference on Civil Registration and Vital Statistics*. Dhaka, Bangladesh.
- Setiawan, B. (2017). *Demografi: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simon, C., Belyakov, A. O., & Feichtinger, G. (2012). Minimizing the dependency ratio in a population with below-replacement fertility through immigration. *Theoretical Population Biology*, 82(3), 158-169.

- Suthar, A. B., Khalifa, A., Yin, S., Wenz, K., Ma Fat, D., Mills, S. L., ... & Mrkic, S. (2019). Evaluation of approaches to strengthen civil registration and vital statistics systems: A systematic review and synthesis of policies in 25 countries. *PLoS Medicine*, 16(9), e1002929.
- Sousa, N.F.S, Lima, M.G, Cesar, C.L.G, Barros, M.B.A. 2018. Active Aging: Prevalence and Gender and Age Differences in A Population-Based Study. *Cad Saude Publica*. Vol. 34 (11). DOI: 10.1590/0102-311XER173317
- Swanson. D. A. and Siegel. J. S. (2004). *Introduction*. in Swanson. D. A. and Siegel. J. S. (eds). *The Methods and Materials of Demography*. 2nd Edition. California: Elsevier Academic Press.
- Tukiran. (2010). *Kependudukan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wilde, J., Wei, C. and Sophie, L. (2020) COVID-19 and the Future of US Fertility: What Can We Learn from Google? IZA Discussion Papers No. 13776.
- Wattie, A.M. (2007). Kondisi Ekonomi dan Budaya Lansia. Dalam Tukiran, Kutanegara, P.M., Pitoyo, A.J., Latief, M.S. 2007. *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weeks, J.R. 2017. Demographic Transition. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, B.S. Turner (Ed.). doi:10.1002/9781118430873.est0085
- Yanuarita, H. A., & Susanto, D. (2021). Analisis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Layanan Administrasi Pendataan Penerima Bansos COVID-19 di Kota Malang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2).
- Zeng, Y. (2006). *Sex Ratio Imbalance in China: Policy and Demographic Implications*. Oxford University Press.



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
tahun 2023